

**PROSIDING  
SEMINAR REFLEKSI  
AKHIR TAHUN &  
IPSK AWARD 2011**

Editor:

**Dr. Agus Eko Nugroho**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

# PENGANTAR

Globalisasi ekonomi dan informasi menyebabkan peran negara menjadi kurang signifikan dalam mengantisipasi pergerakan teknologi, barang, kapital serta manusia antar negara. Globalisme yang melahirkan rezim liberalisasi perdagangan dan investasi global, seperti kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi di ASEAN, dan antara ASEAN dengan China telah memberikan dampak positif dan negative bagi pembangunan Indonesia. Rendahnya daya saing industri nasional menyebabkan dominasi produk impor terhadap produk lokal di pasar domestic. Makin dominannya penguasaan kepemilikan investor asing di perbankan, perdagangan retail dan pasar modal berpotensi melahirkan isu-isu sosial politik yang mengancam stabilitas nasional. Implikasinya adalah bahwa ketahanan ekonomi, kedaulatan wilayah dan harga diri (*sovereignty*) bangsa menjadi sangat penting dalam mencermati konsekuensi dari adanya globalisasi dan regionalisasi yang terjadi.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertanggung jawab memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan terkait dengan globalisasi dan regionalisasi. Dalam konteks inilah, Kedeputusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI) melalui lima pusat penelitian di bawahnya telah melakukan berbagai kajian dan penelitian dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan berbagai tantangan tersebut. Sebagai kegiatan tahunan, Seminar Refleksi Akhir Tahun 2011 ini sebagai

sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai implikasi dari dinamika social yang terjadi untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong era baru tahun 2015. Secara lebih khusus seminar refleksi akhir tahun ini akan menekankan upaya memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang berbagai tantangan kedepan terkait dengan isu-isu globalisme dan regionalisme, ketahanan ekonomi, demokratisasi dan *civil society*, dan pengelolaan lingkungan dan energi.

Seminar Refleksi Akhir Tahun 2011 yang telah dilakukan dapat berjalan secara baik karena berbagai dukungan dan sumbangsing dari berbagai pihak. Kami memberikan ucapan terima kasih kepada para penulis dan penyaji makalah yang telah disampaikan dalam seminar tersebut. Makalah ini pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat luas dengan analisis yang telah dilakukan secara mendalam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelima Pusat Penelitian di Kedeputan IPSK-LIPI yang telah bekerja sama dan dukungan aktif terhadap kegiatan seminar tersebut. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua Panitai Pengarah dan Pelaksana, serta moderator dan editor yang bekerja keras untuk kesuksesan pelaksanaan dan penulisan prosiding seminar ini.

Jakarta, 4 Januari 2012

Deputi IPSK-LIPI

Prof. Dr. Ir. Aswatini, MA.

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
PENDAHULUAN .....	1
MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS GLOBAL .....	7
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN ENERGI...	21
DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY .....	42
GLOBALISASI DAN REGIONALISME: KOMPLEKSITAS ISU DAN PERTALIAN KEPENTINGAN ANTAR AKTOR.....	81
NOTULEN REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011 KEDEPUTIAN IPSK LIPI "MEMPERSIAPKAN INDONESIA MENYONGSONG ERA BARU 2015" .....	114

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Diakui ataupun tidak, pembangunan melibatkan sekaligus perbaikan (sisi positif) dan perusakan alam (sisi negatif). Pembangunan menghasilkan 'output kembar', yaitu pertumbuhan ekonomi (akumulasi kapital) dan kemiskinan, serta perusakan kualitas lingkungan. Implikasinya adalah bahwa pembangunan sangat mungkin tidak memberikan dampak pada kemakmuran, tetapi justru menyebabkan keretakan sosial, konflik sosial-politik, dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, pembangunan jelas tidak bisa dimaknai secara parsial sebagai proses akumulasi kapital (*growth-oriented strategy of development*). Pembangunan haruslah dimaknai secara holistik, yang tidak hanya mencakup pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial, yang sekaligus mempertimbangkan kelestarian alam.

Bila pada periode sebelum 1970an-1980an, pembangunan ekonomi diyakini sebagai kunci keberhasilan pembangunan, dewasa ini sebagian besar akademisi berpendapat bahwa pendekatan holistik sangatlah penting melihat kompleksitas kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi penting sebagai upaya meningkatkan standar hidup, tetapi harus melibatkan peningkatan indikator-indikator sosial lainnya, seperti peningkatan kebebasan berpolitik (demokratisasi), hak azasi manusia (*human right*), akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta

mempertahankan kualitas lingkungan. Seperti dikemukakan oleh Haq (1995), tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan hidup yang memungkinkan manusia hidup lebih lama, sehat dan kreatif.

Pembangunan adalah suatu proses transformasi kultural dari masyarakat suatu negara dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, proses jangka panjang ini bukan hanya terjadi pada periode reformasi yang terjadi sejak tahun 1998, tetapi suatu rangkaian proses transformasi yang dimulai sejak berdirinya republik ini. Meskipun, karakteristik pengelolaan ekonomi politik dan permasalahan yang dihadapi dari masing-masing rezim penguasa (Orde Lama, Orde Baru dan Rezim Reformasi) akan memberikan tekanan dan arah pembangunan masyarakat Indonesia. Misalnya, pada era Orde Baru kekuatan sentralistik pembangunan sangat kuat dan kebijakan ekonomi mulai diarahkan pada penguatan dunia usaha (korporasi) sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi nasional. Berbagai deregulasi perbankan dan pasar uang sejak akhir tahun 1980an memberikan angin segar pada dunia usaha dalam menransformasikan struktur produksi nasional menuju industrialisasi.

Pada Era Reformasi ini, pendalaman mekanisme pasar melalui liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kegiatan ekonomi nasional terus dilakukan. Meskipun, upaya meredam eksese negatif dari liberalisasi ini dilakukan melalui penetapan *multi-target* pembangunan, yaitu keseimbangan antara *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*. Dari sisi institusi politik, era reformasi melahirkan demokratisasi pengelolaan ekonomi kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah (Otda) dan penguatan peran *civil society*. Distribusi kekuatan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda dan masyarakat diharapkan akan meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam proses pembangunan yang dilakukan. Begitu juga, keseimbangan kekuatan politik dan kepentingan dari masing-masing stakeholders pembangunan, seperti pemerintah, korporasi, dan *civil society* diharapkan akan membawa proses pembangunan menjadi lebih ramah terhadap lingkungan.

Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi PBB di Rio de Janeiro tahun 1992 dan selanjutnya KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg

Tahun 2002 menyepakati bahwa negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia berkewajiban mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia, serta mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, salah satu tantangan terpenting bagi Pemerintah Indonesia ke depan adalah bagaimana penggunaan sumber energy bagi keberlanjutan pembangunan harus mengutamakan perbaikan kualitas lingkungan. Ketahanan ekonomi tidak hanya bagaimana memperkuat daya saing produksi, tetapi juga ketahanan pangan dan energy, termasuk penggunaan energy yang terbarukan.

Era globalisasi yang ditandai dengan pergerakan barang, kapital dan manusia serta implikasinya bagi keberlanjutan pembangunan nasional juga menjadi tantangan yang besar ke depan. Globalisme dan regionalism yang termenifestasikan pada liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala global dan regional, seperti kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN, dan antara ASEAN dengan China telah memberikan dampak positif dan negative bagi pembangunan Indonesia. Penurunan daya saing sector industri nasional di pasar domestic, penguasaan kepemilikan asing di sector perbankan, perdagangan retail dan pasar modal, serta beberapa konflik perburuhan antara tenaga kerja local dan tenaga kerja asing merupakan indikasi bahwa dinamika globalisasi dan regionalisasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Dalam konteks inilah ketahanan ekonomi, kedaulatan wilayah dan harga diri (*sovereignty*) bangsa menjadi sangat penting dalam mencermati konsekuensi dari adanya globalisasi dan regionalisasi yang terjadi.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga penelitian nasional dituntut untuk dapat memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah untuk dapat mengantisipasi bergagai tantangan terkait dengan globalisasi dan regionalisasi, ketahanan ekonomi, demokratisasi dan civil society serta lingkungan hidup dan ketahanan energy. Kedepan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI) melalui lima pusat penelitian di bawahnya telah melakukan berbagai kajian dan penelitian dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan berbagai tantangan

tersebut. Seminar refleksi akhir tahun 2011 ini sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai implikasi dari dinamika social yang terjadi untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong era baru tahun 2015. Secara lebih khusus seminar refleksi akhir tahun ini akan menekankan upaya memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang berbagai tantangan kedepan terkait dengan isu-isu globalisme dan regionalism, ketahanan ekonomi, demokratisasi dan civil society, dan pengelolaan lingkungan dan energy.

## 2. Tujuan

Mengacu berbagai kajian yang telah dilakukan lima Pusat penelitian di Kedeputan IPSK-LIPI, Seminar Refleksi Akhir Tahun 2011 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Pusat-pusat Penelitian di lingkungan Kedeputan IPSK-LIPI telah menganalisis secara kritis isu *Globalisme* dan *Regionalisme* dan bagaimana rekomendasi kebijakan ke depan dapat diberikan kepada pemerintah terkait dengan isu-isu tersebut.
2. Seberapa jauh kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Pusat-pusat Penelitian di lingkungan Kedeputan IPSK-LIPI telah menganalisis secara kritis isu Ketahanan Ekonomi dan bagaimana rekomendasi kebijakan dapat diberikan kepada pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional ke depan.
3. Seberapa jauh kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Pusat-pusat Penelitian di lingkungan Kedeputan IPSK-LIPI telah menganalisis secara kritis isu demokratisasi dan *civil society* dan bagaimana rekomendasi kebijakan dapat diberikan kepada pemerintah terkait untuk memperkuat demokratisasi dan peran *civil society* ke depan.
4. Seberapa jauh kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Pusat-pusat Penelitian di lingkungan Kedeputan IPSK-LIPI telah menganalisis

secara kritis isu pengelolaan lingkungan dan energy, dan bagaimana rekomendasi kebijakan dapat diberikan kepada pemerintah terkait pengelolaan lingkungan dan energy ke depan.

### 3. Moderator dan Pembicara

Dalam seminar Refleksi Akhir Tahun Kedepujian IPSK-LIPI, pembicara akan dilakukan oleh satu peneliti dari setiap Pusat penelitian. Susunan Topik dan pembicara dalam seminar tersebut adalah sebagai berikut:

Moderator : Drs Dundin Zaenudin, MA

Topik dan Pembicara :

No	Topik	Pembicara
1.	Globalisme dan Regionalisme	<i>Pulus Rudolf Yuniarto, MSI</i> Peneliti Pusat Penelitian Politik
2.	Ketahanan Ekonomi dan Civil Society	<i>Purwanto, SE, M.Ec.St</i> Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi
3.	Demokratisasi	<i>Dr Wijayanti, M.Litt.</i> Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
4.	Pengelolaan Lingkungan dan Energi	<i>Drs. Herry Yogaswara, MA</i> Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan

### 4. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan seminar Refleksi Akhir Tahun IPSK-LIPI ini akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2011 di Ruang Seminar Besar Widya Graha Lantai I, LIPI Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta.

## **5. Susunan Panitia**

Penanggung Jawab : Deputi IPSK-LIPI

Panitia Pengarah :

- (1) Kepala P2E-LIPI
- (2) Kepala P2P-LIPI
- (3) Kepala PSDR-LIPI
- (4) Kepala PMB-LIPI
- (5) Kepala PPK-LIPI
- (6) Dra Endang S. Susilowati PhD.

Panitia Pelaksana :

- (1) Ketua : Dr. Agus Eko Nugroho
- (2) Wakil ketua : Purwanto, SE Mec.St.
- (3) Sekretaris : Evi Ekayani, B.Sc
- (4) Bendahara : Balkis Triasantri, AMd
- (5) Anggota : Dra Tutik Iriani  
Dra. Dini Saptari  
Arvi Herdianto  
Firmansyah, S.Sos  
Susilo harianti, S.Sos  
Rukmiati  
Sutejo  
Christina Ratnasary, AMd
- (6) Notulen : Dr. Siswanto  
Dra. Mita Noveria, MA

# **MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS GLOBAL<sup>1</sup>**

*Oleh: Tim Peneliti Kedeputian IPSK-LIPI<sup>2</sup>*

## *Executive Summary*

*Makalah ini berupaya untuk memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pada saat ini berkaitan dengan upaya penguatan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan sekedar kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek tetapi juga kemampuan untuk mempertahankannya secara berkelanjutan. Untuk itu, selain mengelola ketahanan ekonomi yang sudah dicapai maka Indonesia juga harus dapat memberdayakan potensi ketahanan ekonomi yang dimilikinya dalam menghadapi tantangan perekonomian global semakin kompleks dan rentan terhadap gejolak krisis dan instabilitas ekonomi.*

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam "Refleksi Akhir Tahun IPSK LIPI" tanggal 20 Desember 2011, Gedung Widya Graha Lantai 1, LIPI, Jakarta.

<sup>2</sup> Tim penyusun makalah ini adalah Purwanto, Agus Syarip Hidayat, Esta Lestari, Putri Irma Yuniarti, dan Nurlia Listiani dibawah supervisi dari Agus Eko Nugroho, Latif Adam dan Siwage Dharma Negara.

*Penguatan kelembagaan ekonomi domestik dapat dilakukan dengan mempertegas pelaksanaan aturan formal dan memanfaatkan aturan non formal yang berlaku secara spesifik di masing-masing daerah. Peningkatan daya saing ekonomi dan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan melalui implementasi pembangunan soft dan hard infrastructures yang disesuaikan dengan kebutuhan investasi di setiap wilayah. Integrasi pembangunan sektor industri dengan sektor pertanian dalam agricultural based industries akan dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja yang diselaraskan dengan konsep koridor pembangunan ekonomi MP3EI untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan dan SDM maka perlu adanya koordinasi intensif antar lembaga pemerintah, pengusaha, dan swasta untuk mewujudkan grand desain yang lebih komprehensif untuk menanggulangi persoalan ketenagakerjaan. Selain itu, perlu adanya sentuhan kebijakan pemerintah yang bisa menjembatani pembentukan para wirausahawan yang handal bagi penciptaan lapangan kerja baru di sektor riil. Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan dalam makalah ini bagi penguatan ketahanan ekonomi tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang sama sekali baru tetapi dapat pula berupa rekomendasi normatif yang tetap akan bermanfaat dalam upaya menjaga konsistensi dari implementasi kebijakan yang mengarah pada kemampuan untuk menjaga keberlanjutan ketahanan ekonomi nasional.*

## **1. Latar Belakang**

Berbagai pengalaman krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi pentingnya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pengalaman terakhir pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang justru tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif<sup>3</sup>. Kemampuan untuk bertahan di tengah kondisi krisis menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia relatif cukup kuat dalam mengatasi dampak eksternal yang disebabkan oleh gejolak

---

<sup>3</sup> Laju Pertumbuhan PDB nasional tahun 2007 – 2010 berturut-turut adalah 6,3%, 6,0%, 4,6%, dan 6,1% (Data Strategis BPS, 2011)

perekonomian dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi yang kuat tidak hanya didasarkan pada kondisi jangka pendek tetapi harus dapat dipertahankan dengan mengelola faktor-faktor pendukung agar dapat menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Upaya memperkuat ketahanan ekonomi bukan hal yang mudah karena kompleksitas permasalahan dalam perekonomian yang bersifat dinamis. Pada dasarnya ketahanan ekonomi mencerminkan ketangguhan dan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala kompleksitas perekonomian global untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, penguatan ketahanan ekonomi tidak terbatas pada pencapaian stabilitas indikator makro ekonomi tetapi juga meliputi aspek-aspek yang membentuk perekonomian nasional yang tangguh. Banyak faktor yang dapat memengaruhi ketahanan ekonomi seperti stabilitas makro ekonomi, daya saing dalam sistem perdagangan internasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Manifestasi dari ketahanan ekonomi akan terlihat dari stabilitas perekonomian untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing, dan mampu mencapai tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ketahanan ekonomi menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk tumbuh secara mandiri dan berkualitas di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) IPSK 2010-2014 ketahanan ekonomi (*economic resilience*) diartikan sebagai penyesuaian dan pemulihan ekonomi setelah mengalami kerugian maupun penjagaan terhadap stabilitas ekonomi makro dan mikro. Hal ini ditunjukkan oleh adanya stabilitas ekonomi makro (*macroeconomic stability*), efisiensi pasar mikro (*microeconomic market efficiency*), *good governance*, dan juga beberapa indikator pembangunan social (*social development*). Untuk mengetahui sejauhmana potensi ketahanan ekonomi maka *policy paper* ini akan membahas beberapa faktor yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh para peneliti di lingkup Kedeputian IPSK – LIPI yang masih sejalan dengan tema

payung Ketahanan Ekonomi<sup>4</sup>, yaitu: (1) Kelembagaan ekonomi domestik, (2) Investasi dan perdagangan, (3) Peningkatan SDM dan ketenagakerjaan, dan (4) Kewirausahaan.

Keempat faktor diatas merupakan simpul-simpul penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi yang telah menjadi fokus kegiatan dari penelitian yang telah dan sedang dilakukan di IPSK-LIPI sebagai bagian dari pelaksanaan Renstra Kedepuitian IPSK 2010 – 2014. Oleh karena itu, meskipun tidak mencakup semua faktor yang memengaruhi ketahanan ekonomi sebagaimana telah disebutkan di atas, namun setidaknya pembahasan faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ekonomi dan beberapa rekomendasi yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Indonesia.

## **2. Permasalahan**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada saat yang bersamaan diharapkan juga dapat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang hanya didasarkan pada kuantitas pertumbuhan tidak serta merta membawa perbaikan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terindikasi dari masih adanya berbagai persoalan sosial ekonomi, melemahnya daya saing ekonomi, disparitas dalam pembangunan ekonomi, dan relatif masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu beberapa persoalan yang sekiranya penting untuk dikemukakan adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat perekonomian domestik dalam menghadapi pengaruh gejolak secara internal maupun eksternal?

---

<sup>4</sup>Tema payung kajian Ketahanan Ekonomi dalam Renstra IPSK – LIPI diantaranya Kajian Sumber Daya Ekonomi, Potensi Ekonomi Kreatif, Potensi kependudukan, Strategi Keberhasilan Ekonomi Negara Lain, dan Hubungan Internasional dan Regulasi Perdagangan (Renstra Kedepuitian IPSK – LIPI; hal. 92)

2. Bagaimana cara meningkatkan daya saing ekonomi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia?
3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan mismatch antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang *pro job* sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan?
4. Sejuahmana semangat kewirausahaan yang handal, kreatif dan inovatif dapat tumbuh di kalangan pelaku bisnis di Indonesia dalam upaya meningkatkan aktivitas perekonomian nasional?

### 3. Alternatif Solusi

Dari empat permasalahan yang dikemukakan di atas, beberapa alternatif solusi dalam upaya mendukung penguatan ketahanan ekonomi nasional, yaitu:

1. Kelembagaan Ekonomi Domestik dapat dikembangkan sesuai dinamika perekonomian yang berkembang melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam beberapa aspek, seperti (1) penerapan aturan hukum yang tegas, efisien, efektif, dan berkeadilan, (2) menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, (3) perlindungan konsumen, (4) pengakuan dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, (5) menghindari biaya transaksi yang tinggi dan *moral hazard*, (6) pilihan atas kepemilikan aset fisik dan non fisik, dan (7) penguatan peran norma dan keyakinan pada individu/komunitas sebagai modal sosial (Zamroni, 2004, dan Yustika, 2008).

Douglas C. North (1920 – 1989)<sup>5</sup> menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan-aturan formal berupa *rules, laws, dan constitutions* dan aturan informal berupa nilai,

---

<sup>5</sup> Pemikir Ekonomi Kelembagaan dan peraih Nobel Bidang Ekonomi tahun 1993.

norma, adat, kesepakatan. Implementasi aturan formal dan informal ini merupakan penentu terbentuknya karakter dan struktur kelembagaan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah, pelaku ekonomi, serta masyarakat menciptakan dan menggunakan instrumen kelembagaan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan. Kelembagaan yang membentuk adanya *good governance* sangat penting untuk memecahkan berbagai konflik kepentingan ekonomi yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sosial sebagai bagian dari kelembagaan informal. Dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, penguatan kelembagaan ekonomi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi domestik melalui peningkatan interaksi sosial-ekonomi, pengaturan sistem kompetisi pasar (*regulated competitive market system*), peningkatan produktivitas dan efisiensi, dan perkembangan inovasi dan kreatifitas dalam iklim persaingan usaha sehat yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan ekonomi tidak dapat dibangun melalui faktor-faktor ekonomi saja tetapi juga harus menggunakan komponen non ekonomi. Misalkan saja norma sosial yang berlaku di masyarakat seperti interaksi sosial, kearifan lokal, dan kepercayaan publik dapat menjadi bagian dari arsitektur kelembagaan ekonomi yang kuat. Hal ini diperlukan untuk menjadi penyeimbang dalam menghadapi aturan formal yang sudah dikeluarkan dalam bentuk aturan perundangan seringkali tidak memperhatikan faktor non ekonomi. Dalam hal ini, harmonisasi peran pemerintah pusat dan daerah perlu untuk diperkuat agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan karena perbedaan persepsi dalam memahami persoalan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat tentu saja diperlukan sebagai otoritas yang menguasai kepentingan nasional. Namun demikian, peran pemerintah daerah pun menjadi penting karena merupakan institusi lokal

yang memahami karakteristik dan potensi sosial ekonomi wilayahnya dalam upaya memperkuat kelembagaan ekonomi. Dengan adanya kelembagaan ekonomi yang baik maka akan mampu menjaga ritme dan harmonisasi hubungan antar stakeholders karena adanya kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

2. **Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif bagi daya saing ekonomi dengan memenuhi setidaknya lima prasyarat dasar, yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) kepastian hukum, (3) harmonisasi peraturan, (4) penciptaan iklim usaha yang kondusif, (5) reformasi birokrasi, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.** Lagi-lagi persoalan kelembagaan ekonomi memegang peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyediaan skema insentif bagi investasi juga masih diperlukan sebagai daya tarik yang akan menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara-negara lain yang juga menawarkan paket investasi pada sektor usaha/industri yang sama.

Dalam konteks perdagangan dan investasi global, Pemerintah harus mampu meningkatkan daya tawar di WTO, terutama untuk produk-produk pertanian dengan memanfaatkan mekanisme *safeguard* yang juga banyak diadopsi oleh negara-negara maju dan mengajukan skema PTA. Selain itu, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan melalui KAPET, KEK, kawasan berikat, maupun aglomerasi (klaster) masih perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mendorong investasi dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja ditingkat lokal dan daerah. Dalam konteks inilah harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung daya saing perekonomian. Pemerintah saat ini sedang menjalankan konsep koridor pertumbuhan ekonomi melalui MP3EI yang menjadikan koridor ekonomi berdasarkan

kewilayahan<sup>6</sup>. Pembangunan koridor pertumbuhan ini tentu saja akan bisa berjalan dengan baik apabila mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor usaha yang ada. Untuk dapat menarik minat investor tersebut maka perlu disediakan *soft* dan *hard* infrastruktur yang dibutuhkan bagi setiap pelaksanaan setiap proyek investasi di masing-masing koridor pembangunan.

3. **Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas SDM**, untuk menciptakan elastisitas kesempatan kerja yang mampu menyerap kesempatan kerja dengan kuantitas yang lebih baik diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 8-9% per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pergeseran serapan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier yang memiliki *backward* atau *forward linkage* yang cukup tinggi melalui transfer teknologi yang lebih intensif.

Penciptaan kesempatan kerja yang luas juga tidak terpisah dari kondusifitas iklim investasi sehingga pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang mendorong agar investor percaya untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Persoalan upah tenaga kerja seringkali pula menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia sehingga untuk menjaga besaran upah minimum riil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan tidak terlalu membebani pengusaha maka pemerintah hendaknya mampu memprediksi angka inflasi tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan perhitungan upah minimum di masing-masing daerah. Persoalan upah tidak terpaku pada rendahnya tingkat upah tetapi lebih kepada upaya pemenuhan kebutuhan biaya

---

<sup>6</sup> Koridor pembangunan ekonomi berdasarkan wilayah (1) Sumatera (kelapa sawit, karet, batubara, besi baja, dan jembatan selat sunda), (2) Jawa (Industri makanan dan minuman, tekstil, permesinan, transportasi, dan perkapalan), (3) Kalimantan (kelapa sawit, batubaran, bauksit, migas, perkapalan, besi, dan baja), (4) Sulawesi (pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, dan migas), (5) Bali – Nusa Tenggara (pariwisata, perikanan, dan peternakan), (6) Maluku – Papua (*Food estate*, tembaga, peternakan, perikanan, migas, dan nikel)

hidup yang salah satunya dipengaruhi oleh besaran inflasi. Tuntutan upah pada saat ini selalu dikaitkan dengan pengeluaran dan kebutuhan riil pekerja di masing-masing wilayah serta tentu saja adanya harapan bahwa upah yang diperoleh tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum karena setiap pekerja juga perlu memikirkan kemampuan untuk menabung sebagai antisipasi kebutuhan hidup di masa depan. Perlu juga untuk dipahami bahwa persoalan upah minimum sebenarnya bukanlah satu-satunya persoalan ketenagakerjaan yang dikeluhkan oleh pengusaha karena besaran pesangon, proses pemecatan tenaga kerja, dan masalah kontrak kerja juga persoalan yang kerap kali menimbulkan perselisihan dalam hubungan industrial pekerja dan pengusaha.

Persoalan pengangguran seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, dimana pengangguran yang tinggi akan menimbulkan peningkatan kemiskinan karena kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran seharusnya tidak ditempatkan sebagai turunan dan sisa dari target pertumbuhan ekonomi. Adanya keterkaitan antara kebijakan di setiap sektor yang terkoordinasi dengan baik dapat terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Jadi dalam mengatasi persoalan kemiskinan, aspek yang paling penting adalah bagaimana mendistribusikan hasil-hasil pembangunan agar lebih merata dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan program-program kesejahteraan. Sementara untuk persoalan ketenagakerjaan, bisa kita kaitkan dengan perluasan kesempatan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh investasi peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan yang terarah. Ini memang merupakan suatu konsep ideal dalam mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan yang sayangnya tidaklah mudah diimplementasikan. Ketepatsasaran berbagai program anti-memiskinan semestinya menjadi prioritas agar pembangunan

ekonomi yang dicapai memiliki karakteristik inclusive, dalam arti tidak menyebabkan marginalisasi kelompok miskin dan di saat yang bersamaan perlu adanya upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

4. *Innovator and Trader Entrepreneur*. Kewirausahaan merupakan salah satu alternative keberhasilan pembangunan sektor riil (industrialisasi) dalam perekonomian nasional. Dari hasil penelitian di beberapa industri misalnya yang pernah dilakukan pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT), setidaknya ada tiga tipologi wirausahawan yang berkembang di Indonesia, yaitu (1) wirausahawan inovator (*innovator entrepreneur*); (2) wirausahawan pedagang (*trader entrepreneur*); (3) wirausahawan kombinasi dari inovator dan trader (*innovator and trader entrepreneur*). Dari ketiga karakteristik wirausahawan di atas, mereka yang berada dalam kategori *innovator and trader entrepreneur* adalah yang paling bisa diharapkan untuk mengangkat industri nasional. Melalui tangan-tangan mereka inilah penciptaan daya saing produk yang mendasarkan pada inovasi akan lebih mudah dicapai. Wirausahawan seperti ini juga akan memberikan kontribusi yang besar terhadap industri nasional melalui penciptaan keterkaitan dengan industri pendukung dan industri terkait domestik. Lantas bagaimana upaya untuk menciptakan wirausahawan handal dalam industri nasional saat ini?

Sebuah pepatah mengatakan bahwa "seorang pemimpin yang hebat tidaklah dilahirkan, tapi pemimpin yang hebat adalah hasil sebuah didikan", maka hal yang sama juga berlaku dalam menciptakan wirausahawan-wirausahawan handal. Artinya, faktor kunci pembangunan kewirausahaan nasional terletak pada aspek pendidikan. Tentu saja pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan khusus yang bergerak dalam bidang-bidang yang terkait dengan basis industri nasional dan sumberdaya alam, mulai dari aspek perencanaan, produksi, teknologi, manajemen pengelolaan, pemasaran dan sebagainya.

Untuk membangun pendidikan yang baik akan terlalu berat jika dibebankan kepada sektor industri dalam melangkah sendirian menciptakan calon-calon wirausahawan handalnya. Aktor utama yang sebenarnya harus berperan aktif dalam membangun pendidikan kewirausahaan ini adalah pemerintah, yang bersinergi dengan pelaksana pendidikan (sekolah dan universitas) dan dunia usaha. Dalam jangka pendek, promosi pendidikan bidang industri perlu digalakkan secara intensif dengan memberikan insentif berupa beasiswa pendidikan atau ikatan dinas bagi para lulusannya. Sementara, pengembangan pendidikan industry dalam jangka menengah dan panjang perlu diarahkan pada pengembangan aspek penguasaan teknologi dan aspek manajerial industri. Jika kedua hal ini tidak segera dilakukan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin pengusaha yang memiliki jiwa *innovator and trader entrepreneur* akan semakin langka di Indonesia. Akibatnya, inovasi produk yang merupakan kunci pembentuk daya saing industry nasional di masa mendatang tidak akan berkembang.

#### 4. Rekomendasi

1. Berbagai gagasan mengenai penguatan kelembagaan ekonomi saat ini lagi-lagi membutuhkan keseriusan dari pihak pemerintah dan dukungan dari berbagai *stakeholder* yang ada. Dukungan yang paling dibutuhkan untuk konteks Indonesia sekarang adalah dari pihak pemerintah daerah, karena di era otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Kelembagaan ekonomi yang setidaknya dapat dibangun pada saat ini adalah meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penyusunan dan penentuan formulasi kebijakan, dalam membuat aturan formal dan aturan non formal, yang terkait dengan permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

2. Sinkronisasi pemenuhan prasyarat dasar (infrastruktur, SDM terampil, kepastian hukum, dsb) dan penyediaan sistem insentif harus segera dilakukan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini termasuk perbaikan soft and hard infrastructure untuk menurunkan biaya transaksi kegiatan ekonomi baik pada tataran produksi, distribusi dan pertukaran. Perbaikan kualitas infrastruktur keras seperti system transportasi nasional dan pelabuhan sehingga biaya logistic dapat diturunkan. Selain itu, perbaikan ketersediaan utilitas seperti air dan energy akan menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan investasi. Lemahnya pembangunan soft infrastructure seperti tidak harmonisnya peraturan, kompleksitas mendirikan dan menjalankan bisnis, dan praktek biaya tinggi harus diatasi dengan perbaikan implementasi otonomi daerah.
3. Pemerintah perlu untuk mengintegrasikan pembangunan sektor industri dengan sektor pertanian melalui pengembangan *agricultural based industries*. Pengembangan *agricultural based industries* memungkinkan sektor pertanian dan industri tumbuh dan berkembang secara bersamaan dan saling melengkapi. Ini disebabkan, tumbuhnya sektor pertanian dan industri akan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas sehingga dapat menekan kemiskinan. Upaya ini tentu saja harus tetap memperhatikan potensi wilayah yang dapat diselaraskan dengan konsep koridor pembangunan ekonomi yang dijabarkan dalam MP3EI yang secara rinci telah menjelaskan potensi lokal/kewilayahan untuk mendukung pembangunan ekonomi.
4. Terkait dengan aturan perundangan dan kebijakan ketenagakerjaan yang nampaknya belum sinkron maka perlu adanya koordinasi intensif antar lembaga pemerintah, pengusaha, dan swasta untuk mewujudkan grand desain yang lebih komprehensif. Misalnya, sistem pengupahan dan perekrutan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja harus diupayakan dengan melakukan perbaikan peraturan

ketenagakerjaan yang ada. Hal ini termasuk juga perbaikan system jaminan social ketenagakerjaan yang berpotensi mendorong produktivitas tenaga kerja nasional. Selain itu perlu adanya keseimbangan dalam keberpihakan aturan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja sehingga dapat meminimalkan perselisihan hubungan industrial yang dapat merugikan sektor industri.

5. Perlu adanya sentuhan kebijakan pemerintah yang bisa menjembatani pembentukan para wirausahawan yang handal melalui dunia pendidikan. Dalam jangka pendek, promosi pendidikan bidang industri perlu digalakkan secara intensif dengan memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang akan membuka jurusan khusus yang terkait dengan kebutuhan industri tertentu. Pada saat yang sama, beasiswa pendidikan kepada para pekerja di sektor industri yang berminat memperdalam keahliannya perlu disediakan beasiswa secara memadai. Kurikulum pendidikan pun perlu diarahkan pada pengembangan aspek penguasaan teknologi dan aspek manajerial industri. Hal ini perlu dilakukan mengingat sektor industri tidak akan bisa sendirian melahirkan pengusaha yang berjiwa *innovator and trader entrepreneur*. Tentu saja institusi pendidikan bukanlah satu-satunya wadah yang mampu menghasilkan wirausaha yang handal. Karakteristik social budaya juga memengaruhi kemampuan dari seorang wirausahawan dan ini tidak serta merta dapat dikondisikan dalam suatu sistem pendidikan formal semata. Hal ini dikarenakan ada proses-proses pembentukan karakter atau jiwa kewirausahaan yang diperoleh dari pendidikan non formal (pengalaman kerja, kreatifitas, semangat, dan sebagainya). Dalam hal ini, institusi pendidikan diharapkan bisa mentransformasikan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat dan mempercepat proses penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2011. *Data Strategis BPS*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010. *Renstra Kedeputan IPSK 2010-2014*, Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI, Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani, 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, Edisi Kedua, Bayu Media, Malang
- Zamroni, 2004. "Kelembagaan Dan Kebocoran Ekonomi Di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro", dalam Tjitroresmi (ed), 2004. *Ekonomi kelembagaan : kebocoran ekonomi dan konsep penanggulangannya*, Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, Jakarta

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN ENERGI<sup>7</sup>

Oleh: Tim Peneliti Kedepuitan Bidang IPSK-LIPI<sup>8</sup>

## 1. Pendahuluan

Kerangka acuan refleksi akhir tahun 2011 kedepuitan bidang IPSK LIPI menyebutkan bahwa,..."Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi PBB di Rio tahun 1992, mencakup beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian. Selanjutnya KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002 menyepakati bahwa negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia berkewajiban mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dimensi lingkungan bagaimana memperkuat dan manusia, serta mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, salahsatu tantangan terpenting bagi pemerintah Indonesia kedepan adalah bagaimana *penggunaan sumber-sumber energi bagi keberlanjutan pembangunan harus mengutamakan perbaikan kualitas lingkungan*. Ketahanan ekonomi tidak hanya bagaimana

---

<sup>7</sup> Makalah disampaikan dalam "Refleksi Akhir Tahun IPSK LIPI" tanggal 20 Desember 2011 di Gedung Widya Graha Lantai 1 LIPI

<sup>8</sup> Kontributor untuk makalah ini adalah Herry Yogaswara (PPK LIPI), Ary Wahyono (PMB LIPI), Irine Hiraswari Gayatri (P2P LIPI), Inne Dwiastuty (P2E), Paulus Rudolf Yuniarto (PSDR LIPI) dan Fajar Ibnu Tufail (PSDR).

memperkuat daya saing produksi, tetapi juga ketahanan pangan dan energy, termasuk penggunaan energi terbarukan. (TOR, 2011: 1). Sinergi antara pengelolaan lingkungan dan energi bertumpu pada kebijakan-kebijakan ketahanan energi yang memperhatikan kondisi lingkungan.

Kemudian Rencana Strategis (Renstra) IPSK 2010-2014 yang mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN serta Renstra LIPI bidang dinamika sosial dalam tema payung kajian IPSK "pegelolaan lingkungan, energi, pertambangan dan industri" memberikan arahan tentang beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, yaitu (1) membangun ketahanan energi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, (2) pemanfaatan energi alternatif pada berbagai jenis industri, (3) strategi sosial budaya dalam adaptasi perubahan lingkungan akibat pemanasan global, (4) Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, (5) pemahaman dan adaptasi masyarakat perkotaan dan perdesaan terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam serta pola penyakit yang ditimbulkan, (6) penanggulangan bencana alam, (7) pengelolaan sumber daya alam, energi dan industri di negara-negara tetangga dan (8) kemampuan diplomasi Indonesia dalam isu-isu lingkungan (IPSK LIPI, 2010 : 94).

Makalah ini merupakan *policy paper* yang harus diperlakukan sebagai suatu *working in progress*, mengingat renstra penelitian 2010-2014 sedang berjalan. Selain itu, perkembangan yang cepat dari perubahan lingkungan maupun kepentingan kebijakan di tingkat pusat dan daerah menyebabkan perlunya fokus-fokus tertentu yang akan ditampilkan dalam makalah ini. Oleh sebab itu, makalah ini memberikan fokus pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim, degradasi lingkungan dan masalah kebencanaan. Serta pilihan-pilihan kebijakan yang terkait dengan keamanan energi dan sumber-sumber energi.

Makalah kebijakan ini tidak mempunyai pretensi untuk mengkaitkan aspek "kebijakan pengelolaan lingkungan" dan "kebijakan energi". Kedua aspek kebijakan ini dapat dibaca sendiri-sendiri, walaupun pada tingkat tertentu terdapat keterkaitan, khususnya berkaitan dengan *Clean*

*Development Mechanism* (CDM) dan berbagai kesepakatan lainnya yang terkait dengan perubahan iklim. Namun, format penulisan yang dipilih adalah menampilkan kebijakan-kebijakan masing-masing, mengingat masih adanya *gap* metodologis dalam penulisan makalah kebijakan ini, yaitu penelitian-penelitian yang dilakukan dalam tema payung IPSK ini dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap Puslit di IPSK.

## **2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana**

Pengelolaan lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan baru dari adanya dampak perubahan iklim dan semakin kerapnya bencana yang terjadi, baik bencana alam, bencana ekologis maupun bencana yang dibuat oleh manusia maupun kebijakan. Selain itu, berbagai konflik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam terjadi dimana-mana. Walaupun dalam TOR tidak memberikan permasalahan lingkungan secara lebih rinci. Namun kami memandang perlu untuk memasukkan isu "perubahan iklim" dan "kebencanaan", mengingat keduanya adalah permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Kemudian berbagai penelitian yang dilakukan oleh puslit di lingkungan kedeputian bidang IPSK memberikan perhatian yang serius terhadap masalah perubahan iklim dan kebencanaan tersebut. Penelitian-penelitian tersebut ada yang dilakukan di Indonesia dan diluar Indonesia. Penelitian-pendilakukan di luar Indonesia sangat berguna sebagai bahan perbandingan maupun reflektif dikaitkan dengan kebijakan yang ada di Indonesia.

### **2.1. Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia didasarkan pada undang-undang yang relatif baru, yaitu UU 32 tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" sebagai pengganti UU 23 tahun 1997 tentang "Pengelolaan Lingkungan Hidup". Walaupun UU 32/2009 telah menampung prinsip-prinsip yang berkaitan dengan HAM, yaitu

pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Namun dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, undang-undang yang baru ini tidak akan mampu berhadapan dengan laju kerusakan lingkungan dalam bentuk eksploitasi pertambangan, pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, dan pencemaran lingkungan oleh industri. Selain itu, kebijakan pengelolaan lingkungan masih berbentuk *business as usual*, yaitu suatu kondisi yang didasarkan pada pemahaman tidak adanya tekanan-tekanan lingkungan yang bersifat luar biasa. Padahal dampak perubahan iklim sudah dirasakan dimana-mana. Selain itu, sebagai sebuah negeri yang rawan bencana, maka kerentanan masyarakat terhadap gangguan lingkungan semakin besar. Mengingat dampak perubahan iklim maupun bencana mengurangi daya dukung lingkungan dalam menyangga kehidupan manusia yang menempatinya.

Karakter lainnya dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dalam era otonomi daerah ini adalah sektoralisme yang masih sangat kuat dan pemberian kebijakan di tingkat daerah yang tidak lagi memperhatikan keberlanjutan. Hal ini diperparah dengan konflik kepentingan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumber daya alam, khususnya perijinan yang terkait dengan tambang, perkebunan dan kehutanan. Sektoralisme pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah berlangsung lama. Pengelolaan Sumber Daya Alam di bagi-bagi berdasarkan komoditas. Wilayah hutan dan hasil hutan kayu (*timber products*) menjadi kewenangan kementerian kehutanan. Hasil tambang dan energi menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Hasil laut menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Perkebunan menjadi kewenangan Kementerian Pertanian. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan negara lain. Misalnya di Filipina, salahsatu kementerian yang paling *powerfull* adalah *Department of Environmental and Natural Resources* (DENR), karena di kementerian tersebut sektor kehutanan hanya menjadi salah satu biro saja (*Bureau of Forestry*), Pertambangan menjadi *Bureau of Mining and Geoscience*, dan sebagainya.

Sedangkan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempunyai *portofolio* yang terbatas untuk mengatur sektor-sektor kehutanan, kelautan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Instrumen penegakan hukum yang dimiliki oleh KLH melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegakan hukum tentang pencemaran. Kegiatan preventif untuk melindungi tanah-air-hutan sukar dilakukan dengan keterbatasan tugas dan fungsi kementerian lingkungan hidup.

## **2.2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Perubahan iklim menurut definisi UNFCCC adalah perubahan pada iklim yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer global, sehingga ada yang disebut akibat oleh manusia dan akibat alami. Perubahan iklim sedang terjadi, ukuran-ukuran obyektif untuk mengukur perubahan iklim di beberapa tempat yang menjadi wilayah penelitian memang menunjukkan telah terjadi perubahan iklim. Demikian halnya dengan ukuran-ukuran "subyektif", berupa persepsi masyarakat dengan cara membandingkan situasi musim dan cuaca antara kondisi kekinian dan 20-30 tahun yang lalu.

Penelitian-penelitian di lingkungan Kedeputan IPSK memberikan perhatian bagaimana petani, nelayan dan masyarakat perkotaan beradaptasi dengan situasi-situasi yang terus menerus berubah dengan cepat. Untuk wilayah perdesaan, termasuk wilayah petani dan nelayan, perubahan iklim yang ditengarai sedang terjadi. Masyarakat petani dan nelayan secara dinamis mengikuti perubahan yang terjadi dengan lingkungan alamnya. Demikian halnya dengan masyarakat (miskin) perkotaan. Namun adaptasi yang dilakukan masih bersifat reaktif memperlihatkan bahwa penduduk masih rentan untuk dimasa mendatang. Demikian juga dengan kapasitas yang terbatas di tingkat rumah tangga perlu dilakukan penguatan untuk dapat mengurangi resiko di masa mendatang. Untuk itu diperlukan juga adanya peningkatan pengetahuan tentang perubahan iklim dan dampaknya serta tindakan

adaptasi yang harus dilakukan. Setidaknya penduduk perlu mengetahui siklus hidrologi sehingga dapat melakukan tindakan antisipasi.

Rekomendasi yang terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim ini adalah (1) pengarusutamaan adaptasi oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan adaptasi yang dilakukan penduduk. (2) Penyebarluasan informasi dan pengetahuan terkait perubahan iklim dan perubahan lingkungan serta (3) peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat daerah terhadap informasi perubahan iklim.

### **2.3. Pengelolaan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Konflik Pengelolaan sumber daya alam terjadi dimana-mana, yaitu konflik di kawasan hutan, pertambangan, perkebunan maupun pesisir dan laut. Salahsatu konflik yang secara intensif diteliti oleh peneliti bidang IPSK LIPI berkaitan dengan kenelayanan. Konflik kenelayanan berhubungan dengan isu IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing. *Illegal fishing* seperti terlihat pada kasus seperti penggunaan bom atau pencurian ikan oleh nelayan asing,

Charles (1992) membuat tipologi konflik sebagai berikut : *Pertama* adalah konflik berkenaan dengan permasalahan "*who controls the fishery,*" misalnya masalah akses terhadap wilayah dan sumberdaya laut. *Kedua*, adalah konflik terkait permasalahan '*how the fishery is controlled!*' Tipe konflik ini melingkupi konflik-konflik terkait penerapan aturan-aturan pengelolaan sumberdaya laut, alokasi kuota dan lain-lain. *Ketiga*, adalah konflik yang terkait hubungan antara penggunaan sumberdaya laut misalnya konflik-konflik antara nelayan yang memiliki latar belakang etnik, ras yang berbeda, atau konflik antara nelayan dengan jenis teknologi yang berbeda. *Keempat*, adalah konflik yang terkait hubungan antara nelayan dengan pelaku usaha laut lain seperti pelaku wisata bahari, konservasi dan industri. *Kelima*, adalah konflik yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penangkapan tetapi mempengaruhinya..

Penanganan konflik kenelayanan yang tidak berjalan efektif karena (1) sentralisasi manajemen sumberdaya laut yang menyebabkan

pemerintah pusat tidak bias menghandle dinamika dan konflik masyarakat nelayan (2) pemerintah pusat tidak mampu melakukan pengawasan terhadap kondisi sumber daya, dan pemerintah pusat tidak cukup memiliki informasi dan kedekatan hubungan dengan *user group* atau komunitas nelayan (3) perubahan-perubahan pola manajemen sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam semakin meningkat.

Rekomendasi yang lah (1) Praktek *co-manajemen* telah meyakinkan bahwa manajemen seperti ini dapat digunakan untuk mengurangi, kalau tidak menghilangkan, aspek-aspek negatif atau kekurangan dari manajemen yang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pada satu sisi dan masyarakat pada sisi yang lain (2) Representasi dalam proses negosiasi juga sangat penting.

#### **2.4. Kebencanaan: Kesiap-siagaan dan Perspektif Perbandingan.**

Wilayah-wilayah di Indonesia dikenal mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi, termasuk bencana-bencana dalam parameter hydrometeorologi maupun geoteknologi. Bencana-bencana dalam skala besar dari sisi luasan daerah yang terpapar, maupun korban jiwa dan harta benda seperti yang diakibatkan oleh banjir, tanah longsor, *low pressure*, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Selain itu bencana yang dilakukan akibat tindakan manusia seperti kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Kejadian gempa yang diikuti oleh tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darusalam dan Nias pada bulan Desember 2004, yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa meninggal atau hilang, serta hancurnya infrastruktur dalam skala yang masif telah menjadi momentum dari pentingnya melakukan mitigasi untuk menghadapi berbagai bencana yang dapat diprediksikan maupun yang tidak dapat diprediksikan. Kemudian rentetan bencana lainnya seperti gempa Nias tahun 2005, gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa Padang tahun 2009, kemudian

letusan gunung Merapi di Yogyakarta dan banjir bandang di Papua pada tahun 2010.

Selain kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak bencana, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kesadaran dan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di wilayahnya. Hasil studi yang dilakukan oleh LIPI di lima wilayah, yaitu Padang Pariaman, Bengkulu, Serang dan Maumere pada tahun 2007 menunjukkan bahwa masyarakat di kelima wilayah tersebut masih belum siap menghadapi bencana. Parameter yang dijadikan patokan untuk mengukur kesiap-siagaan tersebut adalah pengetahuan, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, serta kemampuan mobilisasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Cilacap memperoleh nilai 55, Padang Pariaman dan Serang nilai 54, Bengkulu dan Maumere memperoleh nilai 51. Nilai tersebut berdasarkan komposisi tingkat kesiapan masyarakat di suatu daerah dari kesiapan komponen masyarakat utama, yakni rumah tangga, komunitas sekolah (institusi sekolah, guru, dan siswa), dan pemerintah (institusi pemerintah kabupaten/kota).

Kemudian studi-studi diluar Indonesia yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan kedeputian IPSK LIPI seperti Amerika Serikat dan Cina telah memberikan perspektif perbandingan tentang bagaimana proses-proses Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dilakukan.

Studi yang dilakukan di Amerika Serikat, dalam aras kelembagaan, penelitian tentang lembaga pengelola bencana di Amerika Serikat (*Federal Emergency Management Assistance, FEMA*) memperlihatkan bahwa ada dua aspek kelembagaan yang penting untuk diperhatikan secara komparatif dengan lembaga pengelola bencana di Indonesia. Pertama, soal *governance*, yaitu pembagian kewenangan antara lembaga tingkat pusat dengan lembaga daerah. Di Amerika, FEMA memegang otoritas di tingkat federal, sementara itu pemerintah negara bagian (*state government*) bertanggungjawab untuk tingkat negara bagian (FEMA tidak memiliki lembaga tingkat negara bagian). Dari aspek struktural semacam itu, salah satu persoalan yang muncul adalah pembagian kewenangan antara

lembaga federal dan negara bagian. Secara komparatif, persoalan ini muncul juga dalam konteks lembaga pengelola bencana di Indonesia, yaitu soal pembagian kewenangan antara BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Nasional) and BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kedua, soal standard model pengelolaan. FEMA maupun BNPB sangat mementingkan adanya standard model pengelolaan dan mitigasi bencana, namun berbeda dalam hal perspektif yang dipakai. Apabila FEMA sama sekali tidak memanfaatkan forum dan instrumen internasional, sebaliknya BNPB sangat bergantung pada forum dan perangkat internasional yang dituangkan dalam *Hyogo Framework*. Namun demikian, kedua lembaga ini menekankan pentingnya standardisasi model tanggap bencana dan mitigasi bencana.

Studi yang dilakukan di China mengetengahkan tema sejarah bencana dan jaringan kelembagaan pemerintah-masyarakat China dalam menangani bencana. Hasil penelitian memperlihatkan, bencana menurut perspektif orang-orang China masih dipercaya sebagai suatu bentuk 'peringatan' dari langit. Secara tradisional, masyarakat China masih berpikiran bahwa bencana yang terjadi adalah 'kiriman' dari surga, penyebabnya adalah karena perilaku umat manusia yang 'tidak benar' di bumi. Bencana itu identik dengan pesan surga ke bumi yang menyebutkan bahwa surga yang tidak senang dengan keadaan yang terjadi di bumi. Lebih lanjut, bencana diyakini menjadi simbol hukuman dari surga serta tanda perubahan sosial dan politik di bumi. Satu hal yang terlihat dari pemerintahan Cina yang sentralistik terhadap bencana, yaitu, membangun kekuatan nasional (keterkaitan antar lembaga/departemen), termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan lain-lain, menjadi kekuatan inti penting untuk tanggap darurat bencana. Mobilisasi dan penyebaran kekuatan nasional untuk tanggap darurat menjadi titik pembelajaran terhadap respons pemerintah di tingkat nasional dan propinsi terhadap masalah bencana. Organisasi dan mekanisme koordinasi antara organisasi nasional dan badan pemerintah yang relevan dimaksimalkan. Jadi keuntungan sistem politik sentralistik lembaga sosialis China adalah bisa mengkonsentrasikan organisasi/ departemen yang ada bila terjadi bencana, kemudian membangun struktur tanggap darurat bencana, dan terlebih

lagi semakin meningkatkan kekuatan nasional, menunjukkan karakter bangsa Cina yang sangat baik serta memperlihatkan kepemimpinan yang kuat baik pemerintah pusat dan daerah dalam sistim manajemen bencana.

### ***Rekomendasi Kebijakan***

Membentuk peta kerentanan sosial, budaya, ekonomi yang bersifat *long-term* dan bersifat khusus, bukan merupakan generalisasi.

## **3. Masalah Energi**

Permasalahan dan alternatif kebijakan untuk masalah energi, menyangkut aspek keamanan energi dan opsi-opsi kebijakan untuk energi alternatif.

### ***3.1. Keamanan energi***

Berkaitan dengan keamanan energi, menurut definisi UNDP adalah ketersediaan pasokan energi dalam kuantitas yang cukup dengan harga yang dapat dijangkau. Masalah keamanan energi ini mengemuka sejak awal 1970-an yaitu adanya krisis minyak yang disebabkan oleh pembentukan kartel minyak yang mengakibatkan meningkatnya harga minyak karena adanya beberapa pemicu ketidak-seimbangan, yaitu:

- (1) karakteristik dasar permintaan dan penawaran terhadap minyak,
- (2) sebaran geografis,
- (3) hubungan antara diversifikasi energi dengan insentif harga.

Berkaitan dengan keamanan energi ini ada dua paradigma yang melandasi pembuatan kebijakan, yaitu paradigma energi sebagai komoditas strategis dan energi sebagai komoditas pasar. Paradigma pertama akan kuat dipengaruhi oleh pentingnya intervensi negara sedangkan yang kedua lebih terkait dengan mekanisme pasar.

Paradigma energi sebagai komoditas strategis didasarkan pada argumentasi menentukan pertumbuhan ekonomi nasional dan

pengamanan pasokan fisik membutuhkan institusi negara. Dalam paradigma ini ada beberapa contoh rekomendasi yaitu (1) Mengurangi ketergantungan energi dari sumber eksternal; (2) Pengendalian dan penguasaan terhadap wilayah yang menghasilkan energi; (3) Regulasi yang membatasi konsumsi domestik; (4) Penyimpanan energy dan (5) Penetapan harga energi oleh pemerintah. Sedangkan paradigma kedua memberikan tekanan pada Interdependensi perekonomian negara pengkspor dan pengimpor energy. Dalam paradigma ini, rekomendasi yang biasa dilakukan adalah (1) penentuan harga oleh pasar, (2) perusahaan negara diberlakukan sama dengan swasta guna melakukan investasi energi dan (3) melakukan kerjasama pada tataran regional antara negara pengekspot dan pengimpor

Pentingnya persoalan energi dicerminkan setelah dimasukkan sebagai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Energi secara umum dilihat sebagai aspek mendasar bagi pembangunan nasional Indonesia. Dinyatakan dalam RPJPN bahwa: "Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya".

Secara terminologis istilah keamanan energi, jika merujuk kepada RPJMN 2005-2009 tidak secara khusus dinyatakan sebagai persoalan keamaan nasional yang krusial. Sementara, realitas obyektif menunjukkan akan urgensi peran energi bagi keamanan nasional. Terganggunya keamanan energi akan mengganggu virvival dan berjalannya roda pembangunan dan kehidupan bangsa. Agenda mengenai energi hanya dimasukkan ke dalam bagian umum (Bab 1) mengenai Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional, sebagai "Pembangunan energi diprioritaskan pada upaya peningkatan efisiensi pemakaian energi; rehabilitasi infrastruktur energi; mengurangi ketergantungan pada impor BBM; meningkatkan pemakaian energi non-BBM; mengurangi subsidi secara bertahap dan sistematis; dan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing" (kilang minyak, pembangkit tenaga

listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM), serta fasilitas depot untuk penyimpanan.”

Sedangkan dalam RPJM 2010-2014, agenda keamanan energi dijadikan sebagai salah satu dari 11 prioritas pembangunan. Namun secara khusus agenda keamanan energi belum dipandang oleh pemerintah sebagai persoalan keamanan yang secara sistem sangat menentukan bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, agenda energi belum sepenuhnya dinyatakan sebagai masalah keamanan nasional, dan oleh karenanya tidak mustahil jika penanganannya masih bersifat sporadis.

### ***Pertimbangan Keamanan Energi***

Kebijakan energi di Indonesia perlu dirubah atau disesuaikan dengan beberapa pertimbangan yaitu (1) Keamanan energi, yaitu merupakan isu global dan agenda politik luar negeri dari banyak negara. (2) Energi penting karena pertumbuhan ekonomi nasional, komoditi pasar, komoditi strategis (politik-keamanan) (3) Industrialisasi + populasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan energi sedangkan jumlah energi terbatas. (4) Terjadi ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan energi hal ini berkaitan dengan isu kerjasama internasional (5) Laju energi meningkat 2% pertahun (6) Sumber energi utama yaitu minyak bumi, batubara, dan gas, (7) Indonesia mengalami krisis energi yaitu dari eksportir menjadi importir minyak bumi sehingga tidak adanya jaminan ketersediaan pasokan migas, ketimpangan antara pasokan migas dan kebutuhan domestik, ketimpangan dalam bauran energi (ketergantungan pada salah satu jenis bahan bakar), (8) Regulasi keamanan energi Indonesia yang terkait dengan UU Migas (2001), UU No.30/2009 ttg Ketenagalistrikan, UU No.27/2003 tentang Panas Bumi, UU Minerba (2008), UU No.30/2007, pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN), serta (9) UU No.30/2007 yaitu tujuan keamanan energi Indonesia: kemandirian pasokan energi; pasokan yg mencukupi bagi kebutuhan nasional; terjaminnya manajemen sumber daya energi yang optimal, terpadu dan berkelanjutan; perbaikan akses energi; peningkatan kapabilitas

pelayanan bagi sektor industri; penciptaan lapangan pekerjaan; kelestarian lingkungan hidup. Indonesia memiliki tantangan dan peluang dalam pengelolaan keamanan energi menghasilkan diplomasi untuk kerjasama bilateral, multilateral, internasional.

Dari aspek isu keamanan dan energi nasional yang telah ditelaah melalui dua tahun riset yaitu "Pengelolaan Keamanan Energi Nasional: Perspektif Keamanan Non-Militer" di tahun 2010 dan tahun sebelumnya, 2009 tentang "Strategi Keamanan Energi Nasional: Tinjauan Ekonomi Politik", yang menyimpulkan bahwa keamanan energi di Indonesia masih rentan jika terjadi suatu kejutan (*shock*) internasional sebagai akibat dominasi asing terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional. Strategi Nasional Energi 2006-2025 lebih merupakan dokumen yang kurang mekanisme penegakan hukum untuk implementasi. Selain itu, Indonesia merupakan negara penghasil energi, namun pada saat yang sama juga net-importir energi, dengan kenyataan perusahaan-perusahaan energi asing multinasional mendominasi eksploitasi energi nasional.

Temuan tersebut menggarisbawahi permasalahan mengenai bagaimana format persoalan keamanan energi sebagai persoalan keamanan non-militer. Secara khusus dengan menggunakan pendekatan *securitization* atau sekuritisasi, bagaimanakah kecenderungan keamanan energi nasional? Sejauh mana Indonesia memiliki kedaulatan atas energi nasional?

Pengelolaan energi nasional perlu memfokuskan kepada tatakelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) untuk memaksimalkan potensi dan terjadinya distribusi dan pengelolaan energi yang adil dan transparan untuk pembangunan Indonesia secara berkelanjutan dan bukannya justru menciptakan kerusakan bagi ekosistem dan lingkungan. Kondisi demikian diperlukan untuk memperkuat independensi energi Indonesia sebagai negara penghasil energi besar (kekayaan alam yang melimpah) serta memperkuat kedaulatan nasional atas sumber daya energi untuk mewujudkan cita-cita konstitusi. Selain, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan alternatif untuk mengurangi ketergantungan atas energi tak-terbaharukan. Visi dan blueprint

pengembangan sektor EBT perlu dipersiapkan secara matang sebagai acuan memperkuat energi nasional ke depan yang lebih ramah lingkungan. Indikator ketergantungan energi Indonesia sejak 2005-2007 menunjukkan kenaikan dengan tambahan kebutuhan minyak bumi mulai harus diimpor.

Dengan kondisi industri yang masih belum mapan, hal itu jelas menimbulkan sebuah kecemasan. Industri yang dimiliki Indonesia dituntut untuk terus berkembang sementara perubahan status dari eksportir kepada importir minyak bumi menuntut perubahan persepektif dalam perumusan strategi keamanan energi. Keamanan energi Indonesia melihat diversifikasi energi dan pembentukan distribusi domestik sebagai persoalan penting. Program diversifikasi yang dilakukan meliputi alih sumber energi dari minyak bumi sebagai pasokan utama kepada sumber non-minyak bumi, selain juga kedepannya kepada bentuk energi terbarukan. Persoalan distribusi domestik menjadi penting karena terkait dengan infrastruktur yang ada. Seperti negara berkembang lainnya, kelengkapan infrastruktur distribusi di Indonesia masih jauh dari layak. Kelengkapan infrastruktur distribusi energi dalam negeri yang dapat mengamankan pasokan dan efisiensi penggunaan energi.

### ***Rekomendasi Kebijakan***

Persoalan keamanan energi bukan hanya dan tidak semata dalam perspektif kebutuhan pasokan energi dan industri menjadi peluang Indonesia untuk lebih menerjemahkan strategi keamanan energinya lebih menyeluruh. Kebutuhan energi dan perdagangan energi yang sehat jelas sebuah solusinya. Efisiensi energi juga merupakan isu penting terkait dengan persoalan perubahan iklim.

Dalam konteks yang saling terkait tersebut keamanan energi tidak bisa melepaskan sisi intermestik dari pasar energi global. Keguncangan keamanan energi global akan berdampak pada kondisi keamanan energi domestic, yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sasaran lanjut dari strategi keamanan energi Indonesia. Dalam konteks demikian sekuritisasi keamanan energi di Indonesia sepatutnya diletakan.

Persoalan energi perlu mendapatkan perhatian secara lebih seksama di dalam mendesain sistem dan kebijakan dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi dilakukan salah satunya dengan penerapan mekanisme pasar dalam struktur energi nasional bukan berarti menysihikan pelaku energi domestik.

Penguatan terhadap kapasitas pelaku energi dalam negeri merupakan kondisi yang tidak bisa ditawar lagi, sebagai sebuah pemihakan negara kepada bangsa sendiri dan melepaskan dari hegemoni aktor energi global. Penanganan keamanan energi nasional memerlukan penguatan kelembagaan dengan kewenangan yang jelas. Dengan demikian kelembagaan yang menangani energi, dalam hal ini, Dewan Energi Nasional (DEN) perlu dilengkapi dengan kewenangan dan kapasitas dibandingkan kondisi saat ini.

Strategi untuk mengembangkan energi terbarukan harus lebih bisa membuka kesempatan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional berkaitan dengan Clean Development Mechanism (CDM).

Pengembangan blueprint energi nasional Indonesia ke depan perlu dilakukan secara transparan dan partisipatoris untuk menjamin kredibilitas suatu kebijakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional yang bertumpu kepada kekuatan dari dalam serta meminimalisir campur tangan kepentingan pihak asing dalam perumusan kebijakan sektor energi.

### **3.2. Kebijakan Energi Terbarukan**

Berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT) penelitian-penelitian yang ada di kedeputan bidang IPSk LIPI memeberikan fokus pada tiga sumber energi, yaitu panas bumi, bioetanol dan biodiesel. Secara lebih terinci latar belakang dan argumentasi kebijakan dari masing-masing sumber energi itu dapat dipaparkan dibawah ini.

### 3.2.1. **Energi Panas Bumi**

Ada beberapa alasan mengapa panas bumi perlu dikembangkan. *Pertama*, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar yaitu 28.000 MW atau sekitar 35 persen dari potensi dunia, namun saat ini baru memproduksi listrik panas bumi sebesar 1.189 MW atau peringkat ketiga setelah Amerika Serikat (2.687 MW) dan Filipina (1.968 MW)<sup>9</sup>. *Kedua*, panas bumi tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri, terutama dalam penyediaan bahan bakar pembangkitan tenaga listrik serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. *Ketiga*, bebas dari kenaikan (fluktuasi) harga bahan bakar fosil, tidak tergantung dari cuaca, *supplier*, kesediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar (Energiterbarukan.net, 2010). Bahkan Al Gore (2011) memprediksi, Republik Indonesia bisa menjadi negara superpower dalam penggunaan energi panas bumi sebagai sumber tenaga listrik, pada saat berpidato pada acara pembukaan "The Climate Project Asia Pacific Summit" di Jakarta tanggal 9 Januari 2011. Oleh karena itu untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia seharusnya industri Panas Bumi dapat dioptimalkan produksinya.

Beberapa permasalahan yang ada dalam penyediaan energi panas bumi adalah (1) Pembeli panas bumi saat ini hanya perusahaan yang mengoperasikan PLTP yaitu PT PLN (Persero), (2) Penggunaan kawasan hutan, Sebagian *site plant* panas bumi berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, (3) Banyak ijin yang dibutuhkan setelah IUP (Ijin Usaha Pertambangan) terbit dan (4) Perlu adanya jaminan dari Pemerintah atas *viability* PLN untuk membeli listrik dari energi panas bumi sesuai FTP II sebesar 3967 MW, sehingga diperlukan Keputusan Menteri Keuangan tentang jaminan kelayakan usaha PT PLN (Perpres No. 04/2010 Pasal 7) (5) Permasalahan Fiskal dimana harga keekonomian untuk wilayah dengan potensi panas bumi yang kecil, terutama di Indonesia bagian Timur lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>9</sup> <http://www.esdm.go.id/news-archives/56-artikel/3337-indonesia-sebagai-pusat-keunggulan-panas-bumi.html>

dengan harga keekonomian di wilayah Indonesia bagian Barat dan  
(6) Dari sisi pelaku industri, investasi panas bumi sangat tinggi

### ***Rekomendasi Kebijakan***

- (1) Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam hal kebijakan dan regulasi pendukung industri panas bumi seperti peningkatan insentif perpajakan, kemudahan perijinan usaha pada wilayah kerja panas bumi, dan penetapan mekanisme harga yang sesuai dengan biaya produksi pada wilayah kerja panas bumi yang berbeda.
- (2) Peningkatan kemampuan/kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan energi panas bumi dengan memperbaiki sistem koordinasi dan sinergi kebijakan antar sektor/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah misalnya dalam penetapan batas WKP dan perijinan usaha
- (3) Perlu keterlibatan para pengembang swasta dalam membangun industri pendukung dan industri terkait dengan pengembangan panas bumi agar dapat meningkatkan kemampuan industri lokal dalam bidang pengkajian sumberdaya, pemanfaatan teknologi, mesin dan peralatan, konstruksi, operasional dan perawatan fasilitas panas bumi.

### ***3.2.2. Energi Bioetanol***

Berkurangnya produksi dan cadangan minyak bumi dalam beberapa tahun terakhir memaksa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis pengembangan energi alternatif yang blahan yangherkelanjutan seperti biofuel. Salah satu produk biofuel yang telah dikembangkan di Indonesia adalah bioetanol. Industri bioetanol pada dasarnya merupakan infant industri yang memerlukan dukungan pemerintah, terutama dalam tataran operasional.

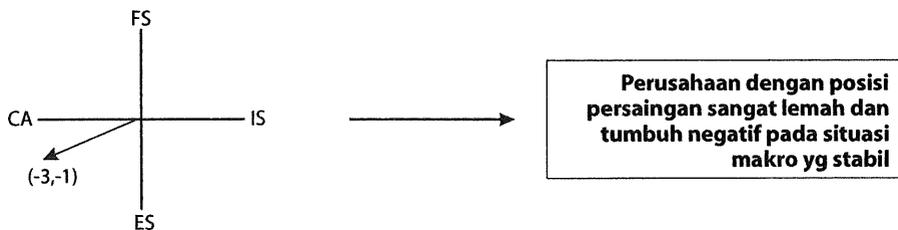
Walaupun pemerintah tampaknya memberikan perhatian terhadap opsi untuk bioetanol, namun beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan diantaranya adalah (1) Keterbatasan bahan baku masih menjadi

kendala, (2) Harga jual bioetanol belum bersaing dengan harga bahan bakar fosil (3) Adanya isu kompetisi bahan baku bioetanol (tebu/molases, ubi kayu, jagung) antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan. (4) Adanya isu dampak negatif bioetanol terhadap lingkungan melalui produksi bioetanol secara besar-besaran berpotensi menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati melalui monokultur bahan baku berikut praktek-praktek pertanian yang merusak kualitas lahan.

Untuk mengetahui peta pengembangan industri bioetanol di Indonesia dilakukan Analisis SPACE (Strategic Position & Action Evaluation) Matriks. Analisis SPACE Matriks adalah metode perumusan strategi untuk menilai sebuah industri berdasarkan faktor internal maupun eksternal dengan membagi kerangka kerja industri ke dalam empat kategori yaitu : *aggressive*, *conservative*, *defensive* dan *competitiv*. Sumbu Matriks SPACE menggambarkan dua dimensi internal yaitu kekuatan keuangan (FS-financial strength) dan keunggulan bersaing (CA-competitive advantage) dan dua dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan (ES-environment stability) dan kekuatan industri (IS-industry strength). Keempat faktor ini penentu paling penting dari posisi strategis organisasi secara keseluruhan.

Dari hasil perhitungan variable-variabel dalam menyusun sumbu matrik SPACE maka didapatkan vector penunjuk arah sumbu x dan sumbu y (-3, -1). Vektor penunjuk arah dalam yang terletak di sebelah kiri bawah atau kuadran defensif dari Matrik SPACE, yang menyatakan bahwa perusahaan harus mempernaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi defensif termasuk penghematan, divestasi, likuidasi dan diversifikasi konsentrik. Industri ini tergantung pada persaingan dan situasi makro. Strategi diversifikasi konsentrik (*Concentric Diversification*) atau terfokus adalah strategi yang dijalankan dengan menambah produk atau jasa baru, tetapi berhubungan (lihat gambar 1).

Gambar 1. Profil Strategi Industri Bioetanol



### Rekomendasi Kebijakan

- (1) pengembangan energi bioetanol berbahan baku komoditi pertanian seperti ubi kayu, ubi jalar, tebu, jagung, dan lainnya sebaiknya dilakukan pada wilayah atau lahan baru yang potensial bagi budidaya sehingga tidak mengganggu kebutuhan pangan dengan memperhatikan neraca energi dan pangan.
- (2) Insentif bagi pengusaha bioetanol dengan mekanisme yang menguntungkan pengusaha juga dibutuhkan agar harga keekonomian bioetanol mampu bersaing dengan harga BBM yang selama ini masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
- (3) peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pengembangan bioetanol karena sebagian besar kawasan pengembangan bagi bahan baku bioetanol berada di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki potensi pertanian pada produk-produk pertanian bahan baku bioetanol.
- (4) memanfaatkan teknologi yang lebih baik bagi peningkatan kapasitas produksi bahan baku, efisiensi proses produksi, dan harga yang semakin kompetitif pada aktivitas usaha skala kecil hingga skala besar.

### 3.2.3. Energi Biodiesel

Semakin berkurangnya cadangan energi fosil, terutama minyak bumi, maka Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan energi alternatif yang berkelanjutan. Alasan-alasan mengapa pengembangan bahan bakar alternatif menjadi hal yang mendesak bagi Indonesia. *Pertama*, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas BBM sangat tinggi, dimana tingkat konsumsi BBM dalam beberapa tahun terakhir telah melebihi tingkat produksinya. Bahkan saat ini Indonesia sudah menjadi *net importir* BBM. *Kedua*, fluktuasi harga bahan bakar minyak di pasar internasional menimbulkan risiko instabilitas bagi perekonomian. *Ketiga*, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat apabila harga minyak internasional terus meningkat karena Pemerintah masih memberi subsidi BBM di dalam negeri. *Keempat*, minimnya investasi di sektor minyak dan gas bumi, padahal cadangan minyak bumi kian menipis dan diperkirakan habis dalam waktu 10 tahun ke depan. *Kelima*, penggunaan bahan bakar berbasis fosil saat ini ditengarai telah menjadi penyebab utama perubahan iklim dunia (Murdiyarto 2003).

Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan bio-diesel adalah (1) Fluktuasi harga bahan baku CPO menyebabkan industri biodiesel menghadapi situasi ketidakpastian yang tinggi. (2) Masalah kebijakan subsidi BBM yang menghambat/merugikan bagi pengembangan industri biodiesel. (3) Masalah kepastian pasar di dalam negeri, pengusaha mengalami kesulitan dalam memproduksi biodiesel dalam jumlah besar karena khawatir pasar tidak dapat menyerap produksi mereka. (4) Masalah kapasitas produksi, sebagian besar pengusaha biodiesel belum memenuhi kapasitas produksi secara maksimal. Dan (5) Masalah ketersediaan bahan baku, dimana produksi CPO sudah mencapai sekitar 18 juta ton (dengan luas lahan 7,05 juta hektar), dari jumlah ini sebagian besar, sekitar 15 juta ton, diekspor dalam bentuk CPO, sisanya 3-4 juta ton diolah menjadi produk biodiesel<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan para pengusaha APROBI, Mei 2009.

## **Rekomendasi Kebijakan**

- (1) Pemerintah perlu menentukan harga patokan bagi produk biodiesel, menciptakan/mengkondisikan pasar bagi produk biodiesel, dan memastikan kontinuitas bahan baku.
- (2) Pemerintah perlu menciptakan insentif yang tepat bagi investor/pengusaha biodiesel agar mereka terpacu untuk masuk ke sektor produksi dan meningkatkan produksinya.
- (3) Pemerintah perlu secara hati-hati memperhitungkan agar jangan sampai biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan biodiesel ternyata melebihi biaya yang diperlukan untuk mengembangkan komoditas energi lain (termasuk bahan bakar konvensional) yang lebih hemat biaya (*cost effective*).
- (4) pemerintah harus berperan tanpa menciptakan distorsi pasar di dalam pengembangan pasar biofuel. Adanya pelarangan ekspor bahan baku biofuel seperti CPO misalnya juga bukan merupakan sesuatu hal yang menguntungkan perekonomian dalam jangka panjang.

## **Penutup**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal, makalah kebijakan ini memberikan uraian tentang berbagai opsi kebijakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, perubahan iklim, kebencanaan, keamanan energi dan pilihan sumber-sumber energi. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibaca sendiri-sendiri. Namun, pada sisi lain mempunyai tujuan normatif untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik melalui paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

# DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY*

Oleh : Tim Peneliti Kedeputusan IPSK-LIPI

## Ringkasan Executive

Demokrasi dan *Civil Society* merupakan tema yang sangat besar yang menggambarkan sumbangan IPSK-LIPI. Bahan yang dikaji adalah informasi dari penelitian yang dilakukan satuan kerja pada tahun 2010. Kajian ini melihat konteks demokrasi dan *civil society* yang dikembangkan oleh satker yang bersangkutan. Untuk membantu memetakan kajian yang ada maka dipergunakan *Civil Society Diamond* (CSD) dengan beberapa perubahan. CSD memberikan definisi yang jelas tentang batasan sehingga memudahkan melihat kajian yang termasuk *Civil Society* atau tidak. Dalam hal ini demokrasi diperlakukan sebagai konteks di mana *civil society* bernegosiasi. Selain itu kajian dari IPSK pada umumnya adalah kajian dalam kerangka *civil society*.

*Civil society* dapat dilihat pada tingkat makro yang berhubungan dengan infrastruktur, meso yang berkaitan dengan institusi, organisasi dan kelembagaan maupun mikro yang mengacu pada tingkat individual. Kemudian kajian melihat empat hal yaitu struktural, ranah, pengaruh dan nilai. Dari posisi tersebut, kajian terkonsentrasi pada tingkat meso pada keempat hal walaupun kajian mikro cenderung lebih terbatas, pada

tingkat makro kajian yang ada tersebar pada masalah struktural dan kelembagaan. Kajian yang tidak masuk pada kategori *civil society* menggambarkan kebutuhan negara seperti politik luar negeri, militer, polisi, keamanan non militer, efek pasar, BUMD dsb.

Terdapat beberapa tema yang muncul pada umumnya memperlihatkan kondisi saat ini yang membutuhkan perbaikan atau perhatian seperti kemiskinan. Juga usulan untuk memperbaiki situasi seperti kebutuhan akan strategi kebudayaan atau strategi nasional. Selain itu juga perhatian terhadap karakter masyarakat yang tidak dapat diabaikan yaitu karakter pluralistik. Kajian juga memperlihatkan perubahan sosial seperti transformasi sosial. Usulan yang perlu dikaji adalah masalah yang berhubungan dengan warganegara dan multikulturalisme, serta strategi kebudayaan.

Rekomendasi terdiri dari dua hal yang pertama adalah rekomendasi internal di mana memperlihatkan adanya tema yang dapat berkoordinasi antar satuan kerja yang ada. Kemudian adanya kebutuhan untuk mengangkat hal ini dalam kajian akademis yang memiliki kaitan dengan kebutuhan dan kebijakan yang ada. Yang kedua adalah rekomendasi eksternal yang berhubungan dengan sumbangan dari IPSK. Rekomendasi ini berkaitan dengan kajian yang telah disebutkan diatas, yaitu rekomendasi untuk memperhatikan kondisi riil masyarakat termasuk perubahan iklim yang perlu diantisipasi, kemudian usulan tentang tindakan yang perlu dilakukan seperti melakukan upaya seperti strategi kebudayaan. Kemudian memperhatikan karakter pluralis masyarakat Indonesia dan perubahan sosial yang terjadi dan yang terakhir adalah rekomendasi yang berhubungan dengan diskusi masalah kewarganegaraan dan strategi kebudayaan yang antisipatif.

## **2. Latar Belakang**

Makalah ini merupakan *review* tingkat awal dari kajian-kajian yang dilakukan Satuan Kerja dibawah IPSK – Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan. Tujuan dari ini yang menekankan pada isu Demokrasi

dan *Civil Society* adalah melihat "Seberapa jauh kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Pusat-pusat Penelitian di Lingkungan ke deputian IPSK-LIPI telah menganalisis secara kritis isu demokrasi dan *civil society* dan bagaimana rekomendasi kebijakan dapat diberikan kepada pemerintah terkait untuk memperkuat demokratisasi dan peran *civil society* ke depan"<sup>11</sup>

Seperti kita ketahui demokrasi dan *civil society* dikategorikan atas Negara (state), masyarakat (society), politik (politic) dan pasar (market). Kategori ini menampung proses dinamika, tantangan serta harapan, bahkan sering kali tumpang tindih karena sulit memecah masyarakat dalam komponen yang berdiri sendiri. Kompilasi ini memaparkan sumbangan pemikiran ke deputian IPSK pada masyarakat dan negara. Kategori menampung karakter pusat penelitian yang ada di IPSK seperti Pusat Penelitian Politik, Pusat Penelitian Ketenagakerjaan, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Ekonomi dan Pusat Penelitian Sumber Daya Regional.

Berhubungan dengan banyaknya tema yang dihasilkan maka dibutuhkan mekanisme untuk men' *dadah* 'nya. Batasan tentang *civil society* di dalam makalah ini menggunakan *Civil Society Diamond*. Dengan beberapa alasan yang pertama karena buku ini menggarap tujuan untuk memudahkan melihatnya. Yang kedua, terdapat kebutuhan untuk membuat sinergi antara kajian yang dilakukan dan yang ketiga adalah adanya kebutuhan untuk menyisir kegiatan mana yang dapat dimasukkan dalam masyarakat sipil. Selain itu terdapat kebutuhan untuk melihat konteks *civil society* lebih dalam.

Makalah menggunakan pendekatan ini karena ada kebutuhan untuk memasukkan kajian IPSK. Tanpa alat ditakutkan terjadi eksklusi padahal informasinya penting, niatnya adalah melakukan tindakan inklusi karena

---

<sup>11</sup> Format awal dari tulisan ini adalah berdasar pada diskusi oleh tim Demokrasi dan Civil Society yang terdiri dari Abdulrachman Patji, Syamsuddin Haris, Yekti Maunati, Sutamat Aribowo, Titik Handayani, Sri Yanuarti. Setelah mengalami beberapa perbaikan dan berdasar pada TOR policy paper dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2011. Artikel ini disiapkan oleh Widjajanti M Santoso, [widjasantoso@gmail.com](mailto:widjasantoso@gmail.com). Penulis berterima kasih kepada Yanuarti dan Henny Warsilah yang telah menyumbangkan pengetahuannya bagi penyempurnaan makalah ini.

upaya ini adalah upaya strategis IPSK untuk mengevaluasi dirinya dengan tujuan menghasilkan karya yang lebih baik. Pendekatan yang dibutuhkan karena tema demokrasi dan *civil society* adalah tema yang sangat luas, di mana kajian IPSK kebanyakan dapat dimasukkan dalam tema ini.

Pemikiran tentang tema ini sudah dimulai sejak LIPI Expo yang memberikan wadah awal untuk memikirkannya. Kesulitan timbul ketika harus menggambarkan tema ini dengan beberapa kalimat saja. Dalam pengalaman itu sudah dapat dilihat derajat kesulitannya. Konsep demokrasi dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat sipil. Dengan asumsi demokrasi yang baik akan memperlihatkan *civil society* yang baik pula, dan sebaliknya. Asumsi ini tidak memuaskan karena batasan konsep terlalu luas sehingga kurang tajam untuk memperlihatkan kaitannya dengan ragam aktifitasnya.

Demokrasi adalah wadah yang perlu dibentuk supaya *civil society* bisa melakukan aktifitasnya. *Civil society* adalah isi dari wadah tersebut. Jika demokrasi berhubungan dengan negara maka di dalam konsep *civil society* hubungan ini minimal. Individu atau kelompok yang berhubungan dengan negara tidak dapat disebut sebagai *civil society*

Sebagai konsekuensinya, makalah ini menjadi meluas dibandingkan dengan hasil diskusi di raker IPSK. Idealnya semua buku perlu dibaca tetapi keterbatasan waktu dan tenaga serta koordinasi, informasi diperoleh dari buku laporan tahunan. Oleh karena itu kebanyakan informasi berasal dari abstrak yang ada. Selain itu terdapat perubahan dari daftar isi yang disampaikan dalam raker terdapat beberapa perubahan. Perubahan yang pertama adalah analisa satu dekade penelitian IPSK tidak dapat dilakukan. Namun makalah ini melakukan beberapa perubahan. Situasi demokrasi satu dekade digambarkan melalui penilaian orang tentang situasi demokrasi. Paparannya menggunakan konsep demokrasi transisional. Harus diakui adanya pengaruh kelompok politik dalam penilaian tersebut tetapi dengan paparan beberapa sumber maka bias yang ada dapat dijembatani.

Jika demokrasi adalah wadah maka terdapat analisa tentang wadah ini, ada yang mengatakannya sebagai transisi demokrasi. Ada penilaian

lain tetapi untuk menunjukkan beberapa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut informasi mengenai hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada.

Demokrasi kita mengalami banyak masalah seperti korupsi, tekanan terhadap kelompok marginal, masalah HAM, dan lainnya. Tekanan ini terjadi tidak hanya dalam tindakan seperti *sweeping* atau perusakan, tetapi juga dalam peraturan. Perda tidak ramah perempuan adalah salah satu contohnya. Sehingga ada prinsip demokrasi yang bisa dipertanyakan seperti dominasi kelompok mayoritas dan hak kelompok minoritas, kebebasan berpendapat. Termasuk representasi yang tidak seimbang dalam menyuarakan kepentingan. Bahkan terdapat kecenderungan dominasi yang sangat besar pada partai politik sehingga berpengaruh pada masyarakat sipil.

### **3. Review Kebijakan dan Isu Terkini**

Bagian ini memuat paparan tentang demokrasi yang menjadi wadah dari *civil society* untuk bergerak dan memiliki dinamika yang positif. Bagi Indonesia masalah ini dianggap utama yang diperlihatkan melalui itikad untuk membuat IDI – Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Bappenas. Paparan tersebut memuat banyak definisi tentang demokrasi namun yang dipergunakan secara umum adalah :

“... definisi demokrasi, bila disederhanakan, tidak lain adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik”<sup>12</sup>.

Kajian ini menggunakan tiga indikator yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Kajian kuantitatif ini menjabarkan

---

<sup>12</sup> UNDP, Menakar Demokrasi di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia 2009, UNDP, hlm 11

demokrasi melalui 11 variabel dan 28 indikator. Kajian kuantitatif ini menghasilkan indeks demokrasi per propinsi dan juga gambaran demokrasi secara umum. Demokrasi dalam konteks ini menggambarkan hubungan negara dan masyarakat, dan mengambil kaitannya dengan perubahan rejim sejak 1998.

Dalam kaitannya dengan *civil society*, demokrasi pada masa transisi demokrasi memperlihatkan kecenderungan peran elit penguasa dan elit masyarakat. Hubungan ini memperlihatkan kompetisi dan juga dinamika dari keduanya. Asumsi yang tumbuh dari pemahaman seperti ini adalah demokrasi merupakan tindakan aktif negara dan *civil society* cenderung diposisikan dipengaruhi oleh negara. Khusus untuk kebebasan sipil yang berkaitan dengan isu makalah ini, indikator hanya melihat hubungan negara, dan kelompok dan tidak memasukkan hubungan antara individu karena keterbatasan metodologi.

Indeks yang muncul adalah indeks skala nasional adalah 67,30, aspek Kebebasan Sipil 86,97; Hak-Hak Politik 54,60; dan aspek Lembaga Demokrasi adalah 62,72. Di dalam indikatornya terdapat angka untuk kebebasan berserikat dan berkumpul 91.44, kebebasan berkeyakinan 90.67, kebebasan dari diskriminasi 88.92 dan kebebasan berpendapat 83.97.

Kajian lain yang juga menggambarkan tentang demokrasi adalah kajian IDEA tentang Penilaian Demokratisasi<sup>13</sup> di Indonesia memperlihatkan problematika sekitar Konstitusionalisme dan aturan hukum, Otonomi, Hubungan Sipil dan Militer, Masyarakat Sipil, Pembangunan Sosial Ekonomi, Gender, Pluralisme Agama. Sebagaimana kajian tentang indeks, kajian ini juga menggunakan perubahan rejim sebagai sebuah titik berangkat. Namun kajian ini memasukkan pula perjalanan sejarah demokratisasi di Indonesia. Kajian ini diperoleh melalui berbagai macam dialog dan menghasilkan beberapa butir usulan.

Pada kajian ini terdapat isu khusus tentang masalah yang berhubungan dengan *civil society*. *Civil society* sendiri didefinisikan sebagai:

---

<sup>13</sup> International IDEA, 2000, Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Stockholm.

“Ada dua sisi persoalan bagi masyarakat sipil: satu positif dan satu negatif. Untuk yang pertama, masyarakat perlu memastikan organisasi-organisasi dan perhimpunan-perhimpunan bekerja demi kontribusi positif kepada masyarakat dan untuk terlibat dalam proses konsolidasi demokrasi. Di lain pihak, masyarakat sipil harus berusaha mencegah pecahnya organisasi-organisasi menjadi faksi-faksi yang saling bertarung, menjadi pencari rente, ataupun bekerja dengan cara-cara yang tidak cocok dengan norma-norma dan praktek-praktek demokrasi, ataupun membahayakan perdamaian, keamanan, dan harmoni”<sup>14</sup>.

*Civil society* dilihat sebagai satu kaki dari segitiga yang saling berhubungan antara negara, dan bisnis. *Civil society* sendiri dilihat dari sisi pranata dan organisasi, asosiasi dan yayasan. Di dalam interaksinya kajian ini memperlihatkan pentingnya isu pemberdayaan, dan di dalam rekomendasinya terdapat butir-butir yang berkaitan dengan pemberdayaan, meskipun dinyatakan secara umum.

Posisi penting dari dua kajian ini adalah untuk memperlihatkan apa yang terjadi pada demokrasi dan bagaimana kita memahaminya. Dalam konteks seperti ini maka menjadi menarik untuk melihat bagaimana kajian IPSK berhadapan dengan kajian seperti ini. Tidak seperti kedua kajian ini, kajian yang berkembang di IPSK lebih merupakan inisiatif individu atau kelompok yang diwarnai oleh karakter masing-masing satuan kerja. Sehingga kajian tersebut memang tidak secara langsung mengacu pada cetak biru yang ada, kecuali apa yang tertera di Renstra secara umum.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan paparan kuantitatif yang menggambarkan situasi yang berbeda jika dilihat dari kajian dari IDEA, terutama yang berhubungan *civil society*. Angka di dalam indeks cukup baik bagi *civil society* karena indikator yang dipergunakan mengarah pada kegiatan berkelompok dan mengutarakan pendapat. Namun kajian IDEA menggambarkan posisi positif dan negatif dari kegiatan *civil society*. Sedangkan posisi kajian IPSK yang berkembang memberikan gambaran

---

<sup>14</sup> Ibid IDEA, 2000, hlm 19.

tentang apa yang terjadi di lapangan. Dalam paparan di bawah ini akan diperlihatkan kecenderungan dari kajian IPSK dalam dua konteks ini.

Di dalam diskusi yang dikembangkan untuk membahas isu ini dibahas tentang kaitan antara demokrasi dan *Civil society*. Untuk melihat kaitannya dalam dipergunakan 4 hal yang berpengaruh di dalam sebuah proses demokratisasi, yaitu *agenda setting*, kebijakan, implementasi program, dan proses monitoring dan evaluasi. Dua hal yang pertama merupakan wilayah negara dan masuk pada konteks demokrasi. Namun dua yang berada di bawahnya merupakan ranah masyarakat yang perlu melihat implementasi program dan proses monitoring dan evaluasinya. Dari dua hal yang terakhir ini maka butir yang terakhir merupakan hal yang belum menjadi bagian dari proses yang bergulir, artinya di dalam proses ini *civil society* masih belum berkembang dengan baik. Posisi untuk menilai kaitan antara demokrasi dan *civil society* dipengaruhi oleh bagaimana melihat kaitannya dengan institusi politik. Doherty melihat hubungan antara pemerintah, partai politik dan *civil society*<sup>15</sup>. *Civil society* menurut pandangannya adalah sekutu dari partai politik, keduanya adalah mitra. Posisi ini juga penting untuk diperhatikan untuk memperlihatkan posisi yang *civil society* yang lebih dekat dengan kajian demokrasi.

Dalam konteks umum ada baiknya kita melihat penggambaran tentang kondisi demokrasi di Indonesia

“kecenderungan asimetris yakni bahwa, di satu sisi, sebagai imajinasi emansipasi yang berjasa mendobrak politik otoritarian, hak asasi terus dianggap sebagai nilai perjuangan substantif, sementara pada arah yang lain, seiring dengan penjamakan kekuasaan dalam demokrasi, berbagai bentuk pengelolaan dan peralatan pengorganisasiannya justru semakin terfragmentasi”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ivan Doherty, tanpa tahun, Demokrasi Kehilangan Keseimbangannya Masyarakat Sipil Tidak Dapat Menggantikan Partai Politik, dalam [http://www.ndi.org/files/democracy\\_balance\\_indo.pdf](http://www.ndi.org/files/democracy_balance_indo.pdf), diunduh 19 Desember 2011.

<sup>16</sup> Robertus Robet, 2008, Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia Sebuah Tinjauan Kritis, ELSAM 2008, Jakarta. Hal 12

Dalam kutipan ini Robet memperlihatkan bahwa situasi yang hidup di Indonesia adalah merupakan paradok: ketika HAM dikumandangkan namun situasi yang menekan beberapa kelompok marginal dan juga masalah keadilan semakin tidak menentu. Terdapat banyak konteks di mana demokrasi dapat dipertanyakan, salah satunya adalah pejuang demokrasi masuk ke ranah politik sehingga posisi menjadi tidak jelas. Kemudian pada awal reformasi, mahasiswa dilihat sebagai tonggak demokrasi, namun pada saat ini situasinya diarahkan pada komisi dan partai dan beberapa tokoh tertentu. Sehingga memperlihatkan situasi yang kurang jelas. Kemudian tumbuh pula paham fatalistik terhadap demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi adalah alat Barat.

Kondisi tersebut menurut Robet juga dipengaruhi oleh lemahnya negara yang dapat dilihat dari kinerja badan legislatif, eksekutif dan yudikatif ditambah lagi kasus korupsi yang semakin mencuat. Isu lain yang dijelaskan oleh Robet yang berkaitan dengan isu makalah ini adalah tentang *civil society*. Isu *civil society* muncul dan diambil situasi Orde Baru sebagai patokannya. Pada masa Orde Baru yang dilihat sebagai adalah LPSM (Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat) yang berhadapan dengan negara di dalam kegiatannya.

“... konsep *civil society* yang kemudian berkembang dalam tema advokasi LSM di Indonesia menjadi konsepsi yang sangat homogen. Dipakai untuk menjelaskan semua pihak yang berada di luar negara dan tetap menjaga batas itu dapat disebut sebagai *civil society*”<sup>17</sup>.

Kondisi ini mempengaruhi pemahaman *civil society* secara umum terutama di dalam kekuatannya sebagai agen yang penting di dalam masyarakat. Oleh karena itu kelompok kecil seperti perempuan, etnis dsb cenderung tidak terlihat penting. Selain itu kelompok *civil society* yang diperhatikan adalah yang dimotori oleh para profesional, tinggal di kota, dan kelompok menengah, dan representasi grass roots tidak kelihatan.

---

<sup>17</sup> Ibid Robet 2008:27.

Walaupun demikian LPSM memang menjadi agen yang penting diantara negara dan pasar, dan memiliki kecenderungan phobi politik. LPSM dilihat sebagai sebuah lembaga yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun di dalam proses tersebut perlu dicatat bahwa kegiatan LPSM juga dilabel sebagai kegiatan yang mengungkapkan aib negeri sendiri<sup>18</sup>. Gerakan pasca Orde Baru juga ditandai dengan konsep "baru" yaitu korban sebagai alat yang mempersatukan ide(ologi) dibagi kegiatan masyarakat sipil.

Demokrasi di Indonesia juga melihat perubahan rejim setelah tumbanganya Orde Baru 1998. Pendekatan demokrasi seperti ini melihat bagaimana proses perubahan rejim terjadi. Berbagai cara dipergunakan untuk menunjukkan perubahannya antara lain model Donald Share dalam saduran terhadap tulisan Sutoro Eko

"1) Demokrasi secara bertahap dan kecepatannya bertahap dan melibatkan para pemimpin rezim, 2) Transaksi yang berjalan cepat dengan melibatkan rezim pemimpin. 3) Transisi lewat perjuangan revolusioner yang berlangsung secara bertahap dan tidak melibatkan pemimpin rezim 4) Transisi lewat perpecahan (revolusi, kudeta, keruntuhan, dan ekstiksi) yang berlangsung cepat tanpa melibatkan peran pemimpin rezim"<sup>19</sup>.

### ***Masyarakat Sipil***

Untuk mempermudah melihat kategori *civil society* yang ada adalah dengan menggunakan konsep, salah satunya adalah konsep *Civil Society Diamond*. Salah satunya adalah karena konsep ini menjanjikan

"The book's basic presmise is that social scientist, policy-makers and practitioners alike have not yet fond the conceptual and

---

<sup>18</sup> Ibid Robet 2008:42.

<sup>19</sup> Syarief Arifa'id <http://rimanews.com/read/20101217/9450/demokrasi-dan-stagnasi-transisi>, diunduh 1-12-2011

methodological repertoire adequate for discussing civil society in ways similar to how they would debate the state of the economy or the performance of government"<sup>20</sup>.

Tentunya dengan beberapa adaptasi yang menyesuaikan diri dengan data penelitian IPSK yang ada. Yang penting sebagai pegangan adalah definisinya tentang *civil society* yang diasumsikan dapat mencakup seluruh kegiatan dari IPSK

"Civil society is the sphere of institutions, organizations and individuals located between the family, the state and the market in which people associate voluntarily to advance common interest"<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Helmut K Anheier, 2004, *Civil Society, Measurement Evaluation Policy*, Earth scan, UK & USA, hlm 1.

<sup>21</sup> Ibid Anheier, 2004, hlm 22. institutions (for example, the rule of law) are structural patterns that address and regulate specific areas or task (23). Organizations: These comprise voluntary associations, non-governmental organizations, non-profit, foundations, charities, social movement, network and informal groups that make up the infrastructure of civil society. They are vehicles and forums for social participation, 'voice' processes, the expression of values and preferences, and service provision. Of particular interest are civil society organizations (CSOs), which are defined as self-organized groups characterized by: voluntary participation (which would exclude compulsory membership organization): relative autonomy from family, market and state and a: capacity for collective action to advance common interests (23). This category comprises citizen and participations in civil society, generally. This would include people's activities in civil society, such as membership, volunteering, organizing events or supporting specific causes; people's values, attitudes, preferences and expectations; and people's skill in terms of governance, management and leadership (24).

Dalam sumber yang sama diperoleh daftar tentang hal yang dimasukkan pada *civil society* seperti dibawah ini:

	<b>Institutions</b>	<b>Organizations</b>	<b>Individuals</b>
Included	<p>Freedom of expression, press associations, assembly etc</p> <p>Rule of law</p> <p>Legislative process</p> <p>Human rights</p> <p>Democratic process</p> <p>Philanthropy, charity</p> <p>Accountability and transparancy</p> <p>Citizenship</p> <p>Independent media</p>	<p>Civil society organizations (CSOs)</p> <p>Voluntary associations</p> <p>Non governemntal organizations (NGOs)</p> <p>Non profit service provider</p> <p>Foundations</p> <p>Advocacy groups</p> <p>Social movement organizations</p> <p>Coalitions and network among CSO's</p> <p>Community groups</p> <p>Self help groups</p> <p>Corporate responsibility programmes</p>	<p>Activist</p> <p>Volunteers</p> <p>Members</p> <p>Participatns</p> <p>Leaders</p> <p>Managers</p> <p>Employers</p> <p>Users</p> <p>Beneficiaries</p>
Excluded	<p>Institutions not directly related to civil society(eg market exchange; political process and elections; family forms etc)</p>	<p>Government agencies and organizations</p> <p>For profit and commercial organizations</p> <p>Organizations outside of the reals of civic rules and values</p>	<p>Non members</p> <p>Non participants etc</p> <p>Individual outside realms of civic rules and values</p>

Anheier, 2004, hlm 25.

Dalam kaitannya dengan demokrasi penggunaan cara ini mengharuskan kita berhati-hati terhadap interpretasi yang simplistik dalam melihat hubungannya dengan *civil society*. Jadi dapat disebutkan bahwa bisa terjadi pada negara yang demokratis terdapat *civil society* yang kurang berkembang dan sebaliknya. Sebagai sebuah konsep yang ingin memperlihatkan hubungan antar bagian dari masyarakat, maka *civil society* dapat dilihat dari sumber di mana dia berkembang.

"... *civil society* is grounded in a society's polity, economy, law and values, while at the same time providing the connecting tissue among them"<sup>22</sup>.

Dengan demikian terdapat empat hal di mana *civil society* dapat dipaparkan yaitu elemen "*structural, legal and political space, impact related, value added*". Kemudian dari paparan diatas juga dapat dilihat bahwa untuk menganalisanya dapat dilihat dari konteks makro, meso dan mikro.

Pendekatan ini mengembangkan upaya untuk menganalisa *civil society* karena terdapat kecenderungan untuk melihat *civil society* dalam hubungan market versus state. Sehingga mengaburkan adanya elemen lain yang berkaitan.

Berdasarkan dari paparan di atas maka alat ini akan digunakan untuk melihat kegiatan dan aktivitas yang sudah dilakukan di IPSK LIPI. Cetak biru dari *civil society* diamond adalah melakukan pengukuran kuantitatif dengan menggunakan indikator yang dapat diperbandingkan. Namun demikian disainnya dapat dipergunakan untuk melihat kecenderungan atau gambaran pemetaan dari apa yang sudah dilakukan di IPSK LIPI

Analisa pada level makro yang melihat masalah yang teridentifikasi di Indonesia berdasarkan pada masalah yang diangkat.

---

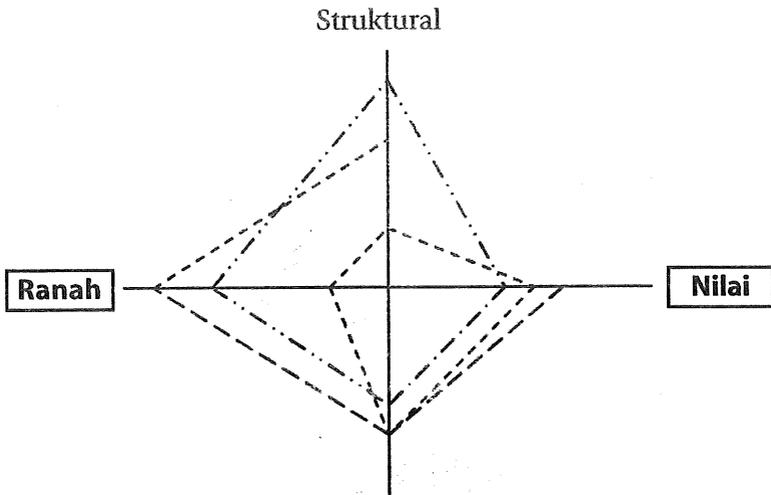
<sup>22</sup> Ibid Anheier, 2004, hlm 31.

Struktur	Nilai
<p>Kuncinya: seberapa luas <i>civil society</i> dalam konteks institusi, organisasi, jaringan dan individu. Apakah komponennya dan sumber daya apa yang dibutuhkannya.</p> <p>Sumber utama :infrastruktur</p>	<p>Kunci: Nilai apa yang melandasi <i>civil society</i>. Nilai, norma dan sikap seperti apa yang direpresentasikan dan bagaimana mempertahankannya. Sejauh apa situasi inklusi dan eksklusinya, bagaimana konsensus dan kesalahpahaman.</p> <p>Sumber utama sistem nilai</p>
Ruang Hukum dan Politik	Pengaruh
<p>Kunci: Bagaimana posisi ruang hukum dan politik dalam aturan yang lebih umum yang mempengaruhi <i>civil society</i>. Dan aturan seperti apa yang mendukung atau yang menekannya.</p> <p>Sumber utama :Tata Kelola</p>	<p>Kunci: Bagaimana kontribusi masyarakat sipil pada masalah sosial, ekonomi dan politik.</p> <p>Sumber utama pembangunan</p>

Anheier, 2004, 33

Indikator penerapan CSD, yang menggunakan kajian dari IPSK, namun untuk kajian awal ini informasi diperoleh dari Laporan Tahunan tahun 2010. Perbedaan antar satuan kerja dibedakan atas warna. Warna merah adalah kajian dari P2P, warna hijau adalah kajian dari PMB, warna ungu adalah kajian dari PSDR, jingga adalah kajian dari P2K dan biru adalah kajian dari P2E. Listing dari kajian IPSK dapat dilihat dari lampiran

Gambar di bawah ini merupakan rekaan dari jumlah kajian yang dilakukan oleh IPSK LIPI dengan melihat lingkup makro, meso dan mikro. Dari gambar ini terlihat persebaran dari kajian yang dilakukan di IPSK;



## Pengaruh

Garis dan titik-titik menandakan kajian tingkat makro, kemudian garis putus-putus memperlihatkan kajian pada tingkat meso dan titik-titik merupakan kajian pada tingkat mikro. Kajian pada tingkat makro pada umumnya terdapat pada masalah struktural yang menggambarkan infrastruktur dari berbagai segi. Sedangkan kajian pada tingkat meso adalah kajian yang mendominasi kajian yang dikembangkan pada setiap satuan kerja. Kajian pada tingkat meso didominasi kajian yang menggarap lingkup ranah. Sedangkan kajian yang cenderung kurang berkembang adalah kajian pada tingkat mikro. Pada tingkat mikro kajian yang berkembang terutama menggarap masalah nilai.

Pada kajian tingkat makro pada masalah struktural diwakili oleh 4 satuan kerja yaitu PSDR 2 kajian, P2E 8 kajian, P2P 5 kajian dan PMB 7 kajian. Sedangkan pada ranah terdiri dari tiga satuan kerja yaitu P2P 2, PMB 4 dan PSDR 1. sedangkan pada konteks nilai terdapat 2 kajian dari P2P dan pada tingkat pengaruh terdapat 6 kajian dari PMB.

Kajian pada tingkat meso telah diperlihatkan cukup beragam, pada tingkat struktural terdiri dari satu kajian dilakukan oleh PSDR, P2P, dan

P2E, sedangkan PMB memiliki lima kajian. Sedangkan pada ranah terdapat satu kajian dari PSDR, sedangkan P2P dan P2E memiliki masing-masing empat kajian dan pmb memiliki empat belas kajian. Pada konteks nilai terdiri dari empat kajian PSDR dan enam kajian PMB. Sedangkan pada tingkat pengaruh terdapat satu kajian yang dilakukan oleh PSDR, P2P, P2K, dan PMB memiliki 2 kajian.

Kajian pada tingkat mikro, pada tingkat struktural terdiri dari satu kajian di P2P dan PMB. Sedangkan kajian mengenai ranah dilakukan oleh P2P, satu kajian. Sedangkan pada tingkat nilai terdapat satu kajian yang dilakukan oleh P2K, P2E dan PSDR, dan ada tiga kajian yang dilakukan di PMB. Sedangkan pada tingkat pengaruh terdiri dari satu kajian P2K, dua kajian P2P dan tiga kajian di PMB.

Sedangkan kajian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kajian civil society, berdasarkan kategorisasi isu yang tidak termasuk pada civil society. Kajian yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori civil society dari satker P2P adalah Politik Luar Negeri dan Lingkungan hidup, Piagam ASEAN Perkembangan Isu Demokrasi dan HAM Studi Kasus Indonesia, Thailand, dan Filipina, Polisi di Era Demokrasi Dinamika Pemikiran Internal, Problematika Penggabungan Daerah. Keamanan Selat Makassar sebagai ALKI II Tantangan dan Peluang, Fungsi Militer dalam Operasi Militer selain Perang Pelibatan TNI dalam Pengelolaan Bencana di Indonesia. Sedangkan dari satker P2E adalah Efek Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN terhadap Perekonomian Indonesia, Pengembangan Industri Energi Alternatif Studi Kasus Bioetanol, Revitalisasi BUMD dalam Perekonomian Daerah, Peranan dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Mendorong Sektor Riil.

Dua satuan kerja ini menggarap isu yang berhubungan tugas dan fungsi negara dalam beberapa konteks. Konteks yang diangkat adalah konteks yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk mengembangkan potensinya.

Jika melihat persebaran dari isu yang dikembangkan di satuan kerja terdapat gambaran sebagai berikut;

## Tingkat Makro

### STRUKTURAL

RANAH	P2P 2	PSDR 2	
	PMB 4	P2E 8	
	PSDR 1	P2P 5	
		PMB 7	
	PMB 6	P2P 2	NILAI

### PENGARUH

Tabel makro ini memperlihatkan kecenderungan bahwa kajian terutama berada pada tema yang berhubungan dengan struktur dan juga pada institusi. Sedangkan kajian yang berhubungan dengan pengaruh dan nilai cenderung terbatas. Hal yang serupa juga terdapat pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan konsentrasi tema berada pada tingkat kelembagaan dengan berbagai macam kasus. Tabel ini memperlihatkan persebaran yang hampir seimbang, namun kotak nilai diisi oleh PSDR dan PMB.

## Tingkat Meso

### STRUKTURAL

RANAH	P2E 4	PSDR 1	
	P2P 4	P2E 1	
	PMB 14	P2P1	
	PSDR 1	PMB 5	
	PMB 11	PSDR 4	NILAI
	PSDR 1	PMB 6	
	P2P 1		
	P2K 1		

### PENGARUH

Sedangkan pada tingkat mikro kajian pada umumnya cenderung terbatas, dengan konsentrasi pada tema yang berhubungan dengan nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks kajian terlihat bahwa tema yang berhubungan dengan individu dan kepentingannya masih memperlihatkan potensi untuk dapat dikembangkan lebih jauh.

**Tingkat Mikro**

**STRUKTURAL**

RANAH	P2P 1	P2P 1 PMB 1	NILAI
	PMB 3	P2K 1	
	P2K 1 P2P2	P2E 1 PMB 3 PSDR 1	
PENGARUH			

Jika melihat dari judul penelitian yang dilakukan maka dapat digambarkan tema-tema yang berkembang pada tingkat struktural makro:

Masyarakat perbatasan Myanmar-Thailand Primordial – demokrasi agama versus keindonesiaan Manajemen dan otoda Sektor kelautan HP3 Perubahan UU Remitansi buruh migran Taman nasional	Pekerja Pekerja migran di Korea-peraturan Analisis upah dan produktifitas Masalah tenaga kerja dan ledakan penduduk Ekonomi Penanaman modal asing – OTODA – integrasi nasional Integrasi nasional – ekonomi – nasional dan daerah
--	---

	<p>Iklim bisnis di daerah Kebijakan aglomerasi</p> <p>Kesempatan kerja dan kemiskinan</p> <p>Kebijakan UMKM</p> <p>Peluang kerjasama Indonesia Afrika Selatan</p> <p>Syariah – model pembiayaan</p> <p>Demokrasi dan HAM</p> <p>ASEAN – Thailand, Filipina</p> <p>Media</p> <p>Keamanan energi non militer</p> <p>Politik Perkotaan</p> <p>Pangan</p> <p>Industri pertanian di Thailand</p> <p>Kelembagaan non beras</p> <p>Strategi pangan</p> <p>Strategi harga</p>
<p>Strategi nasional</p> <p>Kemiskinan dan peran NGO asing</p> <p>Ketahanan wilayah</p>	<p>Perdagangan perempuan</p> <p>Pengelolaan hutan masyarakat</p>

Pada tingkat meso dan pada konteks struktural terdapat isu

<p>Pilkada – perencanaan pembangunan                  Diapora                      Etnik Cham                      Perkotaan                      Komunikasi antar budaya                  Konflik                  Bencana                  Struktur penduduk dan ketahanan ekonomi                  Pekerjaan–kemitraan dunia usaha dengan tenaga kerja                  Infrastruktur                      Air                      Jabodetabekpunjur                      Transportasi – kereta api                      Industri – masyarakat                  Pandangan hidup konsep HAM                  Kemiskinan                      CSR                      CD                      Budaya                      Transfer cash                  Warganegara                      Modal sosial perkotaan                      Traficking                      Perlindungan BMI</p>	<p>Revitalisasi                  Wakaf                  Pengobatan tradisional                  Kesehatan terpadu                  Otoda – partisipasi publik                  Konflik – nelayan                  Kemiskinan                      TIK                      Transfer pendapatan                  Bencana – China</p>
<p>Daya saing TKI di Belanda                  Multikulturalisme                  Kemasyarakatan Asia Tenggara                  Strategi budaya                      Pandangan hidup                      Global warming                      Ekologi bahasa                      Kearifan lokal                  Keagamaan                      Pesantren dan kemandirian                      Faham keagamaan                      Pesan keagamaan di media massa</p>	<p>Transformasi sosial                  Otoda                      Pilkada - anarki                      Politik kebudayaan                      Nasionalisme                  Bahasa dan kepunahan                  Korupsi –UU</p>

Pada tingkat mikro terdapat isu

Gender dan kekuasaan lokal	Perempuan dan globalisasi Pengelola SDA dan masyarakat
Nelayan dan kesejahteraan melalui kebijakan	Diaspora Bugis
Perubahan iklim – perkotaan	Kesehatan
Hubungan anggota legislatif-konstituen	Pengobatan tradisional
Elit lokal	Demam berdarah
Generasi muda dan kepemimpinan	Konsumer – Muslim
Sikap anarkitis	Kemiskinan budaya
	Agama – pemahaman remaja

#### 4. Informasi dari Lapangan

Berdasarkan paparan di atas terlihat adanya beberapa kecenderungan yang patut diperhitungkan ketika kita berbicara tentang *civil society*. Posisi *civil society* menjadi penting setelah perubahan rejim yang dimulai pada 1998. Perubahan rejim tersebut memberikan ruang lebih luas pada *civil society* bahkan pada awalnya terdapat kecenderungan posisi negara lemah. Masalah yang berhubungan dengan otonomi daerah merupakan salah satu yang memberikan kerangka lebih luas terhadap partisipasi masyarakat. Otonomi daerah yang diamati oleh kajian yang ada menunjukkan beberapa gejala yang paradoks terhadap *civil society* seperti adanya Perda Syariah yang mengikat perempuan lebih 'buruk' dibandingkan dengan situasi rejim Orde Baru. Pada tingkat politik hal ini berkaitan dengan bagaimana hubungan dengan konstituen.

Pembahasan tentang Otoda berkaitan dengan ekonomi dan politik yang memperlihatkan kebutuhan untuk memberikan porsi lebih besar

bagi masyarakat. Masyarakat memiliki ketahanan yang perlu dibangkitkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia, seperti penguatan terhadap UMKM. Penguatan seperti ini juga berkaitan dengan kondisi pekerja dan buruh migran Indonesia terutama buruh migran perempuan. Sehingga pembahasan berkaitan dengan perlindungan buruh migran, posisi pekerja, prediksi upah dsb.

Secara umum terdapat kepedulian untuk menjadi sejahtera, sehingga kemiskinan menjadi perhatian baik dalam kaitannya dengan infrastruktur maupun dengan nilai budaya. Untuk menjadi sejahtera perlu memperhatikan kelompok rentan yang di dalam kajian diwakili oleh perempuan, nelayan, petani. Selain dari perlunya kebijakan yang memihak mereka, dibutuhkan juga kepedulian terhadap perubahan iklim global yang akan mempengaruhi dunia dan diprediksi akan merubah pola tanam. Dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan lingkungan membutuhkan dukungan baik kebijakan maupun tindakan untuk mengantisipasi perubahan yang ada.

Oleh karena itu di dalam tindakan yang dilakukan dibutuhkan juga strategi nasional dan strategi kebudayaan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan yang ada. Sejauh ini perubahan ekonomi masih bisa dihadapi oleh kegiatan dengan skala menengah, akan tetapi jika perubahan yang akan terjadi bersifat masif dan menyeluruh hal ini seharusnya sudah diantisipasi oleh negara dengan membuat kebijakan yang mendukung sektor pertanian, nelayan. Dalam konteks perubahan dibahas pula kemungkinan revitalisasi wakaf sebagai upaya penguatan dari sisi komunitas atas usaha sendiri dan mengurangi ketergantungan dengan bantuan asing.

Transformasi sosial bisa terjadi positif maupun negatif, hal ini adalah sesuatu yang umum di dalam bahasan *civil society* karena *civil society* juga dapat berdampak negatif. Konflik sosial, bencana, kepunahan bahasa merupakan situasi yang kita hadapi dan menjadi berita sehari-hari. Perubahan dan keberlanjutan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, seperti pembahasan tentang agama berbicara tentang tantangan dan fungsi dari kehidupan keberagamaan.

Dalam hubungannya dengan karakter masyarakat Indonesia, salah satu informasi yang penting adalah karakter pluralistik. Karakter ini kemudian menghadirkan pembahasan tentang multikulturalisme dan kewarganegaraan dalam beberapa sisi seperti adanya modal sosial. Dalam kajian seperti ini etnisitas merupakan tema penting yang perlu dikembangkan. Tema ini juga merupakan tema 'baru' yang muncul setelah 1998. Pada masa Orde Baru, diskusi yang berbau etnisitas ditekan atas nama Sara (suku, agama, ras dan antar golongan) untuk menekan potensi konflik yang didengung-dengungkan. Etnisitas juga dibahas dalam beberapa tema yang berbeda seperti pandangan hidup, cara kesehatan tradisional dsb.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, *civil society* juga membutuhkan infrastruktur yang menjadi domain dari pemerintah. Dalam hal ini infrastruktur tidak semata berarti jalan tetapi juga jaringan TIK, air, hubungan industri dengan masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian penting. Pada dasarnya inti dari masalah ini adalah pada pembangunan yang seringkali sulit ditebak karena minimnya informasi. Berbeda dari rejim terdahulu, saat ini kesadaran akan pentingnya transparansi menjadi salah satu kebertahanan yang mulai berkembang. Oleh karena itu pembangunan memperlihatkan kisaran dari resistensi dan pertanyaan yang harus dijawab oleh pelaku pembangunan.

Secara umum kajian yang ada menunjukkan analisa terhadap masalah yang ada di masyarakat, kemudian juga kemungkinan solusi yang langsung dikaitkan dengan masalah yang ada. Seringkali pandangan tentang solusi ini mendasarkan diri pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Posisi seperti ini adalah posisi yang berkembang dari kajian tentang *civil society*. Dalam kaitannya dengan demokrasi maka kajian yang ada memberi gambaran tentang apa yang terjadi dan bagaimana masyarakat dapat hidup dengan baik dan sejahtera.

Di bawah ini adalah sedikit paparan matrik dari perkembangan demokrasi dan *civil society* di Indonesia.

UNDP-Bappenas	Demokratisasi di Indonesia- IDEA	Kajian-kajian IPSK
Pendekatan kuantitatif dan menggambarkan demokrasi dalam tingkat nasional dan propinsi	Pendekatan kualitatif melalui serangkaian diskusi terarah dan espose para ahli	Mencoba (awal) untuk menetapkan kajian IPSK dalam konteks demokrasi dan <i>civil society</i> . Informasi beragam dari lapangan dan sisi akademis
Memasukkan pula <i>civil society</i> sebagai variabel namun terbatas pada kelompok dan pengelompokan	Kajian memasukan kaitan dengan sejarah, kondisi masa kini dan rekomendasi untuk masa depan	Umumnya mengarang masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi yang ada di masyarakat. Pada umumnya tidak secara langsung dikaitkan dengan Demokrasi dan <i>civil society</i> . Meskipun sebenarnya memperlihatkan problematika kedua konsep besar ini
Civil society tampak tidak bermasalah karena indeksinya bagus dibandingkan dengan indeks partisipasi politik	Civil society bermasalah dan bahkan memiliki kaitan dengan sejarah. Selain itu kasus-kasus kekinian dimasukkan sebagai pertimbangan walau tanpa penelitian khusus. Abstraksi dilakukan oleh pakar melalui serangkaian diskusi. Tema sesuai dengan IPSK	Civil society bermasalah dengan kebijakan, kedudukan dalam hukum, kepentingan, kesejahteraan, keberterahan pangan, energi, perekonomian daeran, UMKM, perilaku konsumen adanya konflik. Masalah juga muncul karena tipe masyarakat plural, dan kebutuhan akan diskusi kewarganegaraan dan keindonesiaan, dan perubahan iklim dunia.  Juga ada masalah kelembagaan pada masyarakat untuk mendukung posisi dan kehidupannya. Kajian civil society tidak langsung dikaitkan dengan demokrasi. Terdapat masalah nilai dan norma di dalam masyarakat yang belum tergal dengan seksama.

Matrik diatas memperlihatkan posisi kajian IPSK yang mengarah pada civil society yang digerakkan oleh kepedulian dan signifikansi akademis. Sehingga walaupun kajiannya dapat dikategorikan pada civil society namun tidak berhubungan secara langsung dalam konteks konsepnya. Kajian IPSK memperlihatkan masalah yang timbul dan bahkan tindakan antisipatif seperti perubahan iklim yang masih belum dianggap sebagai masalah penting. Kajian dari IDEA merupakan penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan di IPSK, terutama dengan penekanannya pada konteks dahulu-kini-mendatang. Konteks seperti ini merupakan tantangan bagi kajian di IPSK sendiri.

Sedangkan indeks demokrasi dapat dilihat sebagai gambaran umum tentang demokrasi, namun gambaran ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini konteks dari variabel yang diambil berbeda dari apa yang dikerjakan di IPSK pada umumnya. Sehingga bukan merupakan sebuah keanehan jika terdapat kecenderungan yang berbeda.

## **5. Permasalahan**

Kepentingan negara dilihat dari Keindonesiaan dari global, nasional hingga lokal. Kajian tentang negara muncul melihat masalah birokrasi pemerintahan, hubungan antar kelembagaan bahkan hingga masalah kemanusiaan dan kesejahteraan. Negara dilihat sebagai sumber otoritas yang penting untuk kemajuan, kesejahteraan dan keadilan.

Kajian tentang masyarakat memperlihatkan dinamika serta perubahan sosial yang terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Terdapat kepentingan kelompok yang nyata seperti perlindungan buruh migran, ketahanan pangan hingga pembahasan konsep seperti kemiskinan. Juga memperlihatkan ragam ruang dan waktu seperti perkotaan, pedesaan, pesisir, termasuk ruang maya yang akan menjadi penting di masa mendatang. Kesejarahan dan juga kekinian yang saling berkelindan, termasuk isu-isu yang jarang diperhatikan seperti bahasa yang hampir punah. Perubahan sosial memperlihatkan perubahan struktur penduduk hingga revitalisasi tradisi untuk keadilan dan kesejahteraan, yang dilihat

dari sisi individual, hingga komunitas, dari perhitungan ekonomi hingga nilai moralitas. Juga bangkitnya ikatan primordial hingga pembahasan tentang kewarganegaraan.

Kajian tentang nilai dan norma masih memperlihatkan tantangan yang besar bagi perkembangan isu demokrasi dan civil society. Sekaligus juga memberikan peluang bagi kajian IPSK. Paparan kajian yang tidak berimbang dalam sisi nilai dan norma memperlihatkan kebutuhan untuk melihat kedalam dengan pandangan kedepan.

Sedangkan kajian yang tidak masuk pada kategori *civil society* berada pada tingkat analisa tentang negara dan aparatusnya. Kajian tersebut memperlihatkan pada tingkat makro adalah kepentingan yang berhubungan dengan politik luar negeri, keamanan dalam negeri terutama yang berhubungan dengan fungsi militer, efek pasar, pertumbuhan kesempatan kerja, masalah industri dan industri alternatif. Sedangkan pada tingkat meso adalah perlunya memperhatikan polisi, penggabungan daerah, perkembangan BUMD, serta perbankan syariah.

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai masalah sosial dalam berbagai kasus dalam berbagai segi baik sosial, budaya, politik dan ekonomi. Masalah tersebut tidak terbatas pada kondisis dalam negeri tetapi juga dengan dunia global, karena ketersambungan dunia telah membuat sisi ini sebagai sisi yang tidak dapat dilepaskan sendiri-sendiri. Terdapat masalah kelembagaan, kesejahteraan, partisipasi, ekspresi sosial di masyarakat. Terdapat kebutuhan sinergi dan koordinasi untuk mengembangkan civil society. Civil society masih menjadi masalah di dalam partisipasinya dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia. Demokrasi dalam wacana masih sibuk dengan urusan politik dan elitis dan belum melihat kebutuhan masyarakat.

## **6. Beberapa Alternatif Pilihan Kebijakan**

Kebijakan yang dapat dikembangkan dapat memperlihatkan kebutuhan pada tingkat internal di satuan kerja, IPSK bahkan di LIPI secara umum. Kebijakan juga dapat ditujukan pada khalayak umum dan lembaga terkait lainnya untuk kepentingan Indonesia.

Mengembangkan diskusi kewarganegaraan sebagai mekanisme untuk mengakomodasi bentuk masyarakat plural yang kita miliki dan perkembangan kontemporer dari masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan kewarganegaraan maka dibutuhkan perhatian untuk mendiskusikan keIndonesiaan dalam perubahan sosial yang terjadi. Kajian yang ada memperlihatkan reaksi yang terjadi di masyarakat seperti konflik, marginalisasi, ketidaktahuan, guncangnya pengetahuan lokal karena perubahan iklim, penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan tema kewarganegaraan adalah perhatian terhadap keIndonesiaan di mana beberapa konflik horisontal bermunculan seperti sweeping atau kekerasan.

Secara internal kajian ini dapat diperdalam dengan melihat beberapa aspek seperti aspek akademis. Salah satu yang dapat dilakukan adalah meliha pendekatan yang digunakan dan potensinya menjadi kajian yang mendalam dalam aspek yang bersinergi dengan kegiatan pada satuan kerja lain dalam isu atau tema yang sama. Jika sinergi dan koordinasi menjadi masalah dalam hal ini perlu membuat penyempurnaan dalam proses penelitian dan diseminasinya. Koordinasi ini tidak hanya di dalam internal IPSK tetapi juga dengan peer group dan dunia akademis lainnya.

## **7. Rekomendasi**

Rekomendasi terdiri dari dua hal yang pertama adalah rekomendasi berdasarkan kebutuhan internal satuan kerja, IPSK dan LIPI. Dan yang kedua adalah rekomendasi eksternal yang berkaitan dengan situasi sosial di Indonesia pada umumnya.

## **Rekomendasi Internal**

Terlepas dari kelemahan yang ada baik pada metode maupun pada prosesnya, upaya kartographis ini ditujukan untuk memperlihatkan keunggulan dan potensi keunggulan yang dapat kita kembangkan. Selain itu gambaran ini memperlihatkan potensi sinergi dari kajian yang sudah dilakukan.

Ada beberapa kajian yang dapat dikembangkan secara bersama-sama karena memiliki subjek yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Kajian tersebut adalah gender, otonomi daerah, keagamaan, kemiskinan, perubahan iklim, buruh migran dan trafficking, pertumbuhan ekonomi pada sektor menengah seperti UMKM dan kelompok tertentu yang posisinya kurang bagus di dalam konteks ekonomi seperti nelayan, dan petani. Dengan demikian sumbangan pendekatan multidisiplin di IPSK memberikan gambaran yang lebih luas dengan kasus yang beragam.

## **Rekomendasi Eksternal**

Pada tingkat makro dapat dilihat adanya kebutuhan infrastruktur yang dilihat dari berbagai segi. Kajian yang dilakukan adalah melihat kebutuhan Indonesia yang belum atau kurang diperhatikan. Pada tingkat makro organisasi terlihat kebutuhan menjembatani masalah yang ada, terutama kebutuhan atas kepentingan masyarakat. Perlu disadari bahwa meskipun berbicara tentang infrastruktur akan tetapi di dalam kajiannya unsur masyarakat dan humaniora tetap menjadi perhatian utama. Dalam konteks TIK misalnya perlu dipikirkan tentang *media literacy* dan pemberdayaan. Dengan berkembangnya wacana demokrasi pola komunikasi pembangunan yang berkembang pada masa Orde Baru dilihat terlalu mendominasi. Namun yang terjadi adalah pembiaran pemberdayaan untuk dikembangkan oleh *civil society*. Meskipun dapat dilakukan seperti itu, namun konteksnya adalah peran negara tetap dibutuhkan dan dibicarakan.

Dalam konteks ilmu sosial, kajian memperlihatkan kebutuhan akan strategi kebudayaan dari beberapa kasus. Strategi kebudayaan menjadi

penting melihat masalah yang berkembang di masyarakat. Kajian yang ada memperlihatkan bahwa banyak hal diserahkan pada situasi tanpa memikirkan cetak biru yang dapat dipergunakan untuk mengembangkannya atau untuk me'lestarikannya', ataupun paling tidak mendokumentasikan.

Masalah kontemporer yang dianggap penting berkaitan dengan perubahan iklim. Selain itu juga mulai adanya kegiatan yang berhubungan dengan teknologi yang berkembang dari kajian yang berawal pada media menjadi kajian yang melihat TIK dalam konteks infrastruktur. Tentunya dalam hal ini infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat. masalah kontemporer lainnya adalah mengenai konteks keagamaan di mana terdapat beberapa masalah seperti paham keagamaan. Dalam beberapa segi perkembangan ini dilihat sebagai kecenderungan yang tidak kompatibel dengan berkembangnya demokrasi.

Kajian meso memperlihatkan masalah dalam konteks kelembagaan dan koordinasi di berbagai bidang dan menyangkut beberapa kelompok. Kelompok ini dapat disebutkan sebagai kelompok marginal seperti masyarakat di perdesaan, perkotaan, nelayan, buruh migran, perempuan, masyarakat di perbatasan, hutan,

Meskipun kajian pada tingkat mikro cukup terbatas, namun beberapa pendekatan, seperti gender menggunakan baik informasi pada tingkat mikro yaitu informasi dari subjek penelitian, maupun informasi dari tingkat meso atau makro. Pendekatan seperti ini merupakan cakupan dari metode penelitian yang dipergunakan. Dari empat hal yang mampu mengkaitkan antara demokrasi dan *civil society*, dapat dilihat bahwa meskipun kita memiliki beragam kebijakan, namun dalam kenyataannya terlihat adanya kekurangkoordinasian antara program satu dengan lainnya. Berdasarkan empat hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa tidak terdapat *agenda setting* yang menurunkan kebijakan yang ada. Kemudian di dalam implementasinya, dapat diperlihatkan melalui kasus-kasus yang ada implementasinya belum sepenuhnya memasukkan unsur *civil society*. Oleh sebab itu tema-tema yang mengangkat posisi konsumen, masyarakat secara umum masih menjadi tema utama. Namun di dalam

konteks *civil society*, hal yang belum dikembangkan adalah memasukkan *civil society* di dalam proses monitoring dan evaluasi. Padahal sebenarnya dalam konteks seperti inilah *civil society* secara ideal memainkan peran yang bagus. Hubungan demokrasi dan *civil society* adalah sebuah proses yang mengkaitkan banyak hal. *Civil society diamond* dalam hal ini menjadi alat yang mampu menggambarkan, meskipun di dalam artikel ini penggunaannya diadaptasi menjadi bentuk kualitatif.

### **Daftar Pustaka**

Anheier Helmut K, 2004, *Civil Society, Measurement Evaluation Policy*, Earth scan, UK & USA

Arifa'id Syarief <http://rimanews.com/read/20101217/9450/demokrasi-dan-stagnasi-transisi>, diunduh 1-12-2011.

Doherti Ivan, tanpa tahun, Demokrasi Kehilangan Keseimbangannya Masyarakat Sipil Tidak Dapat Menggantikan Partai Politik, dalam [http://www.ndi.org/files/democracy\\_balance\\_indo.pdf](http://www.ndi.org/files/democracy_balance_indo.pdf), diunduh 19 Desember 2011.

P2K, 2010, Laporan Tahunan 2010, P2K, Jakarta.

PMB, 2010, Laporan tahunan 2010. PMB, Jakarta.

PSDR, 2010, Laporan Tahunan 2010, PSDR, Jakarta.

P2P, 2010, Laporan Tahunan 2010, P2P, Jakarta.

Renstra Kedeputan IPSK 2010-1014, LIPI Press, Jakarta

Ritzer George, 2001, *Exploration in Social Theory, From Metatheorizing to Rationalization*, Sage Publication, London.

Robet Robertus, 2008, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia Sebuah Tinjauan Kritis*, ELSAM 2008, Jakarta.

## Lampiran

Dimensi	Individual/tingkat mikro	Organisasi/tingkat meso	Masyarakat /tingkat makro
Struktural	<p>Perempuan dan Globalisasi Studi Kasus Perdagangan Perempuan di Kabupaten Karawang</p> <p>Pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat</p>	<p>Negara masyarakat dan manajemen bencana di china</p> <p>Revitalisasi peranan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Aplikasi pengobatan tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan terpadu</p> <p>Partisipasi Publik di era otonomi daerah</p> <p>Konflik-konflik kenelayan distribusi, pola akar masalah dan solusinya</p> <p>Aplikasi pengobatan tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan terpadu</p> <p>Peran TIK dalam mengatasi kemiskinan strategi global basional lokal (K)</p> <p>Model pendekatan anti kemiskinan di Indonesia</p>	<p>Perkembangan kebijakan pekerja migran di korea selatan</p> <p>Pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja dan kemiskinan</p> <p>Piagam ASEAN Perkembangan Isu Demokrasi dan HAM Studi Kasus Indonesia, Thailand dan Filipina</p> <p>Strategi Pengelolaan Keamanan Energi Nasional Perspektif keamanan Non Militer</p> <p>Penanaman Modal Asing dan Otonomi Daerah di Era Reformasi Studi Kasus Banten</p> <p>Peluang Kerjasama Ekonomi Indonesia Afrika Selatan</p> <p>Studi pengembangan kelembagaan bank pangan nonberas di tingkat</p>

		<p>pendekatan transfer pendapatan dan transfer sosial</p>	<p>masyarakat untuk membangun ketahanan pangan di perdesaan (K)</p> <p>Cyberdemokrasi wacana emansipatoris dalam pemilihan presiden</p> <p>Penerapan hukum ekonomi syariah dan perkembangan masyarakat dalam konteks pembangunan hukum nasional</p> <p>Pola dan arah perubahan sosial politik di daerah perkotaan</p> <p>Media dan demokratisasi</p> <p>Integrasi nasional dalam konteks otonomi daerah</p> <p>Strategi peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah</p> <p>Efektifitas kebijakan dan kinerja UMKM dalam mendukung perekonomian Indonesia</p> <p>Analisis tingkat upah dan produktifitas tenaga kerja</p>
--	--	---	--

			<p>Membangun iklim bisnis dalam meningkatkan daya saing daerah</p> <p>Percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan karimata melaoui integrasi antar daerah</p> <p>Pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga produk pangan di Indonesia</p> <p>Efektifitas kebijakan aglomerasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>Model pembiayaan syariah dalam mengembangkan sektor agribisnis</p> <p>Kajian kebijakan perencanaan tenaga kerja menghadapi ledakan penduduk usia kerja</p> <p>Pembangunan industri pertanian di asia tenggara studi kasus Thailand.</p>
--	--	--	--

<p>Ramah</p>	<p>Gender, Perempuan dan Kekuasaan Lokal di Indonesia Studi Kasus NTB dan Papua</p>	<p>Diaspora etnik cham di asia atenggara pembentuk identitas dan jaringan transnasional</p> <p>Perubahan struktur penduduk dan strategi adaptasi dalam konteks ketahanan ekonomi</p> <p>rumah tangga di kabupaten lamongan provinsi jawa timur</p> <p>Optimalisasi peran jasa transportasi kereta api pendekatan model diamond's porter</p> <p>Analisis dampak conditional cash transfer untuk pengentasan kemiskinan studi kasus pada PNPM Mandiri</p> <p>Pilkada dan pergeseran sistem</p> <p>Perencanaan pembangunan daerah studi kasus provinsi Banten</p> <p>Sinergitas fungsi cooperative social responsibility (CSR) UMKM dan partisipasi</p>	<p>Masalah Ekonomi Politik Masyarakat Perbatasan Myanmar-Thailand</p> <p>Nasionalisme</p> <p>Demokratisasi dan Sentimen Primordial di Indonesia. Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindonesiaan (kasus Perda Bernuansa Syariah Islam di Bulukumba Sulsel dan Cianjur Jawa Barat.</p> <p>Manajemen sumber daya laut dalam perspektif otonomi daerah (respon daerah terhadap kebijakan otonomi sektor kelautan)</p> <p>Taman nasional pengelolaan dan tantangannya dalam era otonomi daerah</p> <p>Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah sejak tahun 1945 – 2007 (analisa histories yuridis distribusi</p>
--------------	---	--	---

		<p>masyarakat di wilayah pesisir karimata</p> <p>Pola hubungan stakeholder dalam mengelola sumber daya air danau toba di sumatera utara</p> <p>Pola Hubungan Industri Besar dengan Masyarakat Sekitar; Studi Kasus Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari di Tobasa Sumatera Utara</p> <p>Co-produksi dan sinergi reformasi hubungan masyarakat dengan pemerintah</p> <p>Model perlindungan hukum terhadap pengiriman buruh migan perempuan ke Malaysia</p> <p>Studi integritas dalam pelayanan publik di Indonesia kasus pelayanan kebutuhan air di jabodetabek</p> <p>Program Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya pada Masyarakat Sekitarnya</p>	<p>kekuasaan dan keuangan antara pusat an daerah)</p> <p>Hukum dan tata kelola pemerintahan</p> <p>Studi penerapan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) pada masyarakat pulau kecil sebagai solusi mengatas problem kemandirian masyarakat di wilayah perbatasan (K)</p> <p>Pengelolaan remittance buruh migran indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sosial ekonomi daerah</p>
--	--	--	--

		<p>Penguatan tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan studi kasus pengelolaan sumberdaya air tanah di wilayah jabodetabekpunjur</p> <p>Perlindungan warganegara – Buruh migran</p> <p>Pola dan Kecenderungan Konflik di Indonesia Analisa terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Ambon dan Aceh</p> <p>Strategi Penanganan Pasca Bencana Alam di Indonesia Dampak terhadap Kelompok Rentan</p> <p>Minoritas Muslim Bali Kasus Muslim di Gianjar dan Tabanan</p> <p>Human trafficking upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu terhadap perdagangan perempuan</p> <p>Kewargaan dan modal sosial komunitas perkotaan</p>	
--	--	---	--

		<p>Dinamika sosial di daerah perkotaan pantura</p> <p>Etnisitas dan pandangan hidup penegakan HAM dan respon masyarakat</p> <p>Komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultural</p> <p>Kemiskinan berdimensi sosial budaya upaya mencari model pengentasan kemiskinan berbasis participatory poverty assessment</p> <p>Kemitraan antara tenaga kerja dunia usaha dan pemerintah untuk keberlangsungan pekerjaan</p>	
Nilai	<p>Pemahaman dan perilaku kesehatan masyarakat perkotaan terkait perubahan iklim kasus demam berdarah di kota semarang</p> <p>Perilaku konsumen muslim dalam konsumsi halal</p>	<p>Mitos kearifan lokal dan manajemen hutan di asia tenggara</p> <p>Daya saing dan prospek tenaga kerja indonesia di belanda</p> <p>Multikulturalisme di eropa</p>	<p>Politik kebudayaan dan otonomi daerah</p> <p>Nasionalisme dalam konteks otonomi daerah</p> <p>Hukum dan perubahan sosial analisis perkembangan perundanganundangan dan kelembagaan</p>

	<p>Persoalan kemiskinan dari perspektif kebudayaan (K)</p> <p>Remaja dan pemahaman ajaran agama studi kasus agama Islam</p> <p>Sejarah dan filosofi berbagai praktek pengobatan tradisional kelompok etnis di Indonesia studi etnografi kebudayaan dan etnobotani terhadap praktek pengobatan moolong suku tau ta wana di pedalaman sulawesi tengah</p> <p>Diaspora bugis di sabah malaysia timur migrasi transnasional integrasi dan identitas budaya</p>	<p>Dinamika kemasyarakatan di asia tenggara</p> <p>Strategi sosial budaya dalam adaptasi perubahan lingkungan pesisir akibat pemanasan global</p> <p>Ekologi bahasa di daerah pesisir dan pedalaman</p> <p>Etnisitas dan pandangan hidup komunitas sukubangsa di Indonesia</p> <p>Muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia sebuah kajian sejarah</p> <p>Pesan keagamaan dalam media massa</p> <p>Pondok pesantren kemandirian santri dan pembangunan masyarakat</p>	<p>tentang pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>Transformasi sosial di perkotaan pantai utara jawa; studi perbandingan perkalongan dan jepara</p> <p>Anarki masyarakat dalam iklim demokrasi kasus pemilihan pilkada secara serentak di beberapa daerah di jawa</p> <p>Bahasa minoritas yang terancam punah di tanah papua dalam konteks sosiokulturalnya</p>
Pengaruh	<p>Pemahaman masyarakat perkotaan terhadap perubahan iklim dan lingkungan perkotaan</p>	<p>Etnisitas pengembangan sumberdaya lokal dan potensi perdagangan internasional dalam rangka peningkatan</p>	<p>Penanganan Kemiskinan di Indonesia Analisa Strategi Nasional dan Peran Negara Donor, MNCs dan Lembaga Internasional</p>

	<p>Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen. Studi Kasus Propinsi Banten Hasil Pemilu 2009</p> <p>Pergeseran Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru Studi Kasus di Sumbawa</p> <p>Generasi muda dan perubahan kepemimpinan</p> <p>Strategi nelayan dalam peningkatan kesejahteraan alternative kendala dan dukungan kebijakan</p> <p>Sikap anarkitis dan tindak kekerasan masyarakat dalam iklim demokrasi</p>	<p>kesejahteraan masyarakat nunukan kalimantan timur</p> <p>Pembangunan Good Governance dan Upaya Penanganan Kemiskinan di Perdesaan</p> <p>Kajian pengetahuan dan pemahaman masyarakat perdesaan terhadap perubahan iklim dan pengeloaan sumber daya alam terkait dengan keamanan insani</p> <p>Pondok pesantren dan pendidikan kewargaan di minoritas muslim</p> <p>Perjuangan nelayan dalam mengatasi kemiskinan strategi kendala dan dukungan kebijakan</p>	<p>Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketahanan Wilayah Pesisir di Kepulauan Riau Konteks Dinamika Wilayah Regional</p>
--	--	---	--

# **GLOBALISASI DAN REGIONALISME: KOMPLEKSITAS ISU DAN PERTALIAN KEPENTINGAN ANTAR AKTOR<sup>23</sup>**

*Oleh: Tim Peneliti Kedeputian IPSK-LIPI*

## **Pendahuluan**

Menurut Robertson dan Held,<sup>24</sup> perkembangan globalisasi telah dimulai sejak era imperium pada abad ke-15 dan berkembang dengan terbentuknya negara bangsa pada abad ke-17. Kemudian, penemuan-penemuan alat komunikasi dan transportasi telah mengakselerasi proses globalisasi sehingga memunculkan sebuah perubahan sosial akibat dari perkembangan teknologi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya dan transaksi ekonomi internasional. Dalam konteks ini, pengertian globalisasi tampaknya seringkali dipakai untuk merujuk pada perluasan dan pendalaman arus perdagangan, modal, teknologi, informasi internasional dalam sebuah pasar global yang cenderung terintegrasi.

---

<sup>23</sup> Tulisan ini disusun untuk Seminar Refleksi Akhir Tahun Kedeputian IPSK LIPI 2011 bertajuk "Mempersiapkan Indonesia Menyongsong Era Baru 2015" tanggal 16 Desember 2010. Gd. Widya Graha Lt. 1 Jakarta.

<sup>24</sup> Dalam A. Safril Mubah. 2010. *Perkembangan Proses Globalisasi*. Paper Cakra Studi Global-Strategis

Pengertian lainnya, globalisasi dipandang sebagai proses liberalisasi pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia.<sup>25</sup>

Dalam konsep yang lain, globalisasi juga bukan semata-mata terbatas pada ide kosmopolitanisme dalam arti semata gejala mondial, namun juga glokalisasi (*think globally act locally*). Di sini fenomena yang dikemukakan oleh Naisbit menjadi salah satu contoh yang mengemuka. Di mana perpindahan lokasi industri menjadi pilihan untuk kedekatan sumber daya, serta juga perampingan struktur perusahaan seperti yang berkembang dengan *e-company* semacam google[dot]com. Bila semua pandangan itu digabungkan, pengertian globalisasi dapat diartikan sebagai kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Artinya, pertukaran barang dan jasa, tidak hanya pertukaran modal, tetapi juga hal-hal lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi atau berbagai fenomena *human trafficking* yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun.<sup>26</sup> Dengan kata lain, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide maupun perusahaan transnasional.

Melalui gambaran awal di atas, terdapat asumsi bahwa fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti terjadi, dan mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan yang terjadi. Dalam kenyataan, fenomena globalisasi telah membawa implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia. Perubahan arus perdagangan internasional membuat produk yang diciptakan negara di belahan benua lain dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sampai

---

<sup>25</sup> James Petras & Henry Veltmeyer, 2001, *Globalization Unmasked. Imperialism in 21st Century*, oleh, Zed Books, London. Hlm.11.

<sup>26</sup> Riza Noer Arfani. 2010. Globalisasi. Karakter dan implikasinya. *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär* Edisi I/2004. Hlm. 1.

di pelosok kota/desa di benua lainnya. Arus modal internasional membawa implikasi dipindahkannya industri negara maju ke negara berkembang, misalnya untuk mendapatkan tenaga buruh murah. Perubahan teknologi informasi memungkinkan berita-berita internasional diketahui seluruh dunia hanya dalam beberapa saat. Liberalisasi pasar nasional dan global membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya berbagai produk dan jasa bagi para konsumen di suatu negara. Akhirnya globalisasi turut mengubah pola berpikir dan berperilaku masyarakat.

Globalisasi dan integrasi ekonomi berkembang menjadi tema kajian yang cukup sering dibahas, terutama karena fenomena ini sangatlah kompleks yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi.<sup>27</sup> Berkaitan dengan perkembangan proses globalisasi dan regionalisme, berikut kaitannya dengan tema-tema lain, pusat-pusat penelitian di bawah Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), telah menghasilkan banyak temuan dan analisa penelitian, yang sebagian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, terutama bagi pemerintah (para pengambil kebijakan) dan berbagai pihak/pemangku kepentingan di dalam negeri.

## **Perkembangan Globalisasi Saat Ini**

Melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya, globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dipahami. Fenomena umum yang disebutkan di atas berada di sekitar kita, bahkan *embedded* dengan

---

<sup>27</sup> Pandangan-pandangan yang muncul dalam melihat globalisasi antara lain; ada pandangan yang melihat bahwa globalisasi (terutama integrasi ekonomi) sebagai sebuah proses sejarah yang mendorong tercapainya peningkatan suatu kemajuan ekonomi suatu wilayah, menciptakan perdamaian, dan juga demokrasi bagi warga dunia. Di sisi yang lain ada pula yang memandang bahwa, globalisasi melalui integrasi ekonomi (justru) akan mengakibatkan bentuk-bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan, atau semakin mendorong terciptanya kemiskinan baru. Di kalangan ilmuwan, banyak perbedaan dalam memaknai proses globalisasi ini dan juga perbedaan definisi yang disesuaikan dengan lingkup kajian, idealisme, maupun perspektif yang mereka gunakan.

berbagai kepentingan kita. *Global governance*, integrasi ekonomi, regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, *common market*, migrasi transnasional, *political union*, *human security*, dan lain-lain adalah sebagian istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Persoalan globalisasi dan segala kaitannya di berbagai area tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalan dan kajiannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau berbagai alternatif bentuk pengelolaan dan penyelesaian persoalan di seputar isu tersebut.

Beberapa isu mengenai globalisasi antara lain dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

### **1. Dari Globalisasi ke Regionalisme**

Salah satu ciri penting globalisasi adalah dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan (*region*). Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah regionalisme ekonomi ASEAN dan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN.<sup>28</sup> Studi ini memperlihatkan bahwa Asia Tenggara yang menjadi bagian penting dalam rantai globalisasi merasa perlu membangun kerja sama regional. Pemerintah negara Asia Tenggara sebagai pelaku globalisasi ekonomi kemudian membentuk ASEAN yang berupaya (salah satunya) mengintegrasikan kawasan ke dalam ekonomi dunia. Melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor yang didukung oleh kebijakan untuk menarik masuk investasi modal asing dengan mendirikan kawasan perdagangan bebas (*ASEAN Free Trade Area/FTA*).

Secara bertahap negara-negara ASEAN mulai merapkan program, salah satunya yaitu membuka pasar dalam negerinya dan membuka perjanjian tentang pengembangan spesialisasi industri di antara negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri memilih untuk menjadi "sentra" industri otomotif, namun pada kenyataannya industri otomotif yang

---

<sup>28</sup> Lihat Adriana Elisabeth (ed). 2009. *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Isu-Isu Strategis*. LIPI Press, Jakarta.

berkembang justru terjadi di Thailand. Industri sepeda motor di Thailand bahkan telah menjadi sebuah sistem industri yang sudah mapan rantai produksinya. Sebenarnya, kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan diberlakukannya kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijakan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, di mana setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Terciptanya regionalisme ekonomi di Asia Tenggara diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini terutama bagi penanaman modal asing (*foreign direct investment/*FDI) agar kawasan ASEAN tidak hanya menjadi daerah produksi tetapi juga ekspor bagi negara lain. Dengan kata lain, integrasi ekonomi regional ASEAN berkembang ke arah yang lebih terbuka atau menjadi *open regionalism*.

Perkembangan terkini, studi regionalisme ASEAN adalah kesepakatan untuk membentuk Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada 2015 melalui tiga pilar: Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Berawal dari gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang dikaitkan dengan isu-isu perdagangan bebas barang, jasa dan investasi kemudian secara sistematis dan konseptual, analisis dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan konsep regionalisme dikaitkan dengan pembentukan AEC, serta pembahasan tentang pasar tunggal ASEAN. Satu hal yang paling kontroversial dalam pembentukan AEC adalah rencana pembentukan pasar tunggal ASEAN (*ASEAN single market*).

Persoalannya bukan hanya mengenai pencapaian target waktu yang telah ditetapkan pada 2015, melainkan juga kemungkinan ASEAN membentuk pasar tunggal tanpa melalui unifikasi kepastian. Indonesia dalam hal ini telah ditetapkan sebagai koordinator sektor otomotif, salah satu dari 12 sektor prioritas dalam AEC. Peran ini merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan daya saing secara regional, sekaligus

menjadi tantangan, khususnya dalam memanfaatkan peluang dan menyiapkan langkah-langkah strategis menuju AEC pada 2015.

Upaya Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN sangat relevan dengan kesepakatan untuk mempertahankan kerjasama ekonomi regional yang terbuka, agar mampu berkontribusi dalam liberalisasi perdagangan global, serta menciptakan kawasan yang kompetitif dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif setara (*equitable*).

Tantangan utama dalam membentuk pasar tunggal ASEAN ini sangat berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang masih dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap negara anggota ASEAN. Sedangkan integrasi ekonomi kawasan yang utuh membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk “mengurangi derajat kedaulatan negara” melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang dapat berlaku di setiap negara ASEAN. Sampai saat ini, ASEAN masih mengutamakan pendekatan harmonisasi, termasuk dalam harmonisasi peraturan, meskipun sudah ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kebijakan *ASEAN single window* yang harus terlebih dahulu diterapkan di tingkat nasional.<sup>29</sup>

Selain isu regionalisme ASEAN, yang patut diperhatikan juga adalah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di kawasan Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Cina Daratan) yang berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan pesat dalam perdagangan antarnegara dari kedua kawasan ini.<sup>30</sup> Di samping itu negara-negara dari kawasan Asia Timur Laut sejak akhir 1980-an juga telah muncul sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan Asia Tenggara.<sup>31</sup> Suatu aspek lain yang menarik dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan

---

<sup>29</sup> Lihat Laporan Tim ASEAN P2P, Ganewati Wulandari (ed). 2009. *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. LIPI Press, Jakarta.

<sup>30</sup> Lihat Thee Kian Wie. 2010. *Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Kajian Wilayah dalam PSDR LIPI*. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widy Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hlm.1-8). Paper dalam proses penerbitan.

<sup>31</sup> The Kian Wie. 2010. *Ibid*.

Asia Timur Raya adalah apa yang dinamakan fragmentasi produk (*product fragmentation*), yaitu penyebaran produksi dan perakitan komponen mobil (*auto parts*), komponen elektronika, dan komponen computer serta komponen-komponen dari barang-barang lain (kamera, pesawat TV, barang optik, perlengkapan musik, arloji, mesin jahit, barang-barang kimia dan farmasi, garmen) di berbagai negara dalam proses produksi yang terintegrasi secara vertikal. Fragmentasi produk ini dipicu oleh perluasan yang amat pesat dari kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations/TNCs*) dalam ekonomi global selama tiga dasawarsa terakhir.<sup>32</sup> Beberapa aspek dari integrasi ekonomi regional di atas menunjukkan dengan jelas bahwa integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) selama beberapa dasawarsa terakhir telah berlangsung dengan pesat dan saling menguntungkan. Oleh karena ini ditinjau dari segi kajian wilayah, berbagai aspek dari integrasi ekonomi regional di Asia Timur patut dikaji secara lebih mendalam.<sup>33</sup>

## **2. Globalisasi, Investasi, dan Liberalisasi Perdagangan**

Globalisasi dalam salah satu definisi yang dikemukakan Jan A. Scholte (2000) berarti liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Liberalisme ekonomi menjamin adanya kebebasan bagi semua insan/pelaku ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan bebas untuk memperdagangkannya. Namun bukan berarti liberalisme tanpa aturan. Aturan dan pengaturan merupakan keharusan dan harus disepakati bersama. Tanpa aturan dan pengaturan, kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi. Salah satu bentuk liberalisasi perdagangan yang berkembang terwadahi dalam World Trade Organisation/WTO dengan

---

<sup>32</sup> Athukorala (2007) dikutip dari The Kian Wie. 2010. Hlm. 6.

<sup>33</sup> The Kian Wie. 2010. Hlm. 7.

neoliberalisme sebagai ideologi utamanya. Hal inilah yang lebih jauh menjadi fokus penelitian Puslit Politik dan Puslit Ekonomi IPSK LIPI (2007)<sup>34</sup> dalam melihat kaitan globalisasi dengan isu-isu perdagangan dan juga dampaknya terutama di sektor pertanian, industri dan tenaga kerja.

Salah satu penelitian ini melihat bahwa globalisasi telah berdampak luas pada pertanian di negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia. Ketimpangan, kemiskinan, dan ketergantungan pada berbagai input luar adalah bukti konkritnya. Pencabutan subsidi, privatisasi sumber daya dan institusi pemerintah, longgarnya kran impor sebagai prasyarat untuk ekspor, lenyapnya berbagai sumber daya dan budaya lokal, membiasnya pemberdayaan, dan mandeknya inovasi merupakan dampak langsung dari globalisasi. Penelitian ini telah menjawab konsekuensi-konsekuensi yang diterima Indonesia dengan tergabungnya dalam WTO. Tampaknya kondisi dan posisi sektor pertanian di era globalisasi secara umum masih memprihatinkan, perlu upaya meningkatkan produksi beras melalui produksi dan pengelolaan pascapanen, perkembangan ekspor komoditas pertanian juga belum menggembirakan, perhatian terhadap pembangunan agro industri sangat diperlukan, kemudian subsektor perikanan perlu diidentifikasi sebagai subsektor yang dapat mendukung ketahanan sektor pertanian, dan terakhir pengembangan subsektor kehutanan yang masih terbatas perlu untuk ditingkatkan.

Di level masyarakat, bagaimana masyarakat Indonesia merespon konsekuensi yang timbul dan juga posisi pemerintah Indonesia menghadapi respon masyarakat ini dijawab pula. Globalisasi secara bersamaan mengandung dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi ini kemudian menjadi fokus respon

---

<sup>34</sup> Lihat Agus R. Rahman dkk. 2007. *Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia*. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2004. *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.

kelompok *civil society* (LSM) yang tertuang dalam berbagai bentuk agenda, termasuk komunikasi dengan pemerintah. Pemerintah perlu menyadari bahwa komitmen Indonesia terhadap globalisasi tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif globalisasi.

Dalam bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, bahwa selain globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan (ketimpangan) dalam struktur ketenagakerjaan global (di mana pemecahan masalah perlu dilakukan secara bersama-sama), globalisasi juga telah mengubah dinamika perekonomian nasional yang membuat mekanisme pasar jauh menentukan ketimbang peran pemerintah. Berkurangnya peran pemerintah dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengorbankan pelaku ekonomi dengan daya saing rendah. Namun di sisi lain, globalisasi perlu untuk memberikan motivasi setiap pelaku ekonomi untuk bertindak efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Lantas bagaimana dengan keadaan perdagangan dan investasi di Indonesia. Tampaknya, keadaan perdagangan dan investasi mulai mengalami perubahan secara perlahan. Peningkatan laju investasi domestik dan asing mulai berkembang seiring dengan membaiknya dinamika iklim usaha yang telah dirumuskan dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun secara umum, upaya pengembangan investasi dan perdagangan nasional di era globalisasi harus terus dilakukan.

Pemikiran penting yang lain; *pertama*, investasi dan perdagangan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian, melainkan juga pada sektor atau komoditi yang spesifik dapat diproduksi oleh berbagai daerah di Indonesia. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam memanfaatkan perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pemanfaatan investasi dan perdagangan di daerah lintas batas telah memberikan kontribusi yang besar tidak hanya bagi perekonomian daerah, namun juga bagi perkembangan makro ekonomi nasional. *Kedua*, dominasi kapital terhadap buruh juga dapat menyebabkan mereka hanya menerima proporsi nilai tambah yang kecil. *Ketiga*, sektor finansial yang mendominasi sektor industri menyebabkan akumulasi nilai tambah semu, sehingga gelembung ekonomi (*economic*

*bubble*) terjadi. Hal ini juga menyebabkan proses deindustrialisasi, sehingga menurunkan kemampuan sektor industri nasional dalam menyerap tenaga kerja. *Keempat*, proses pemiskinan dapat terjadi bila sistem persaingan pasar menyebabkan redistribusi kepemilikan aset (misalnya tanah) kepada korporasi. Sementara itu, alokasi anggaran program anti-kemiskinan memiliki keterbatasan akibat efektivitas program yang masih rendah.

### **3. Globalisasi, Transnasional Migrasi, dan HAM**

Migrasi internasional adalah produk dari ekonomi global, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka. Migrasi internasional antara lain memunculkan gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat regional dan global menjadi semakin marak, terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global, dan munculnya segala bentuk aktivitas yang sifatnya 'transnasional'. Dalam konteks migrasi, lapangan transnasional dapat berarti bahwa pergerakan manusia sangat dekat dengan tujuan ekonomi, namun di sisi yang lain juga sangat rentan dengan persoalan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pada kasus moratorium TKI misalnya,<sup>35</sup> pemerintah pada tanggal 22 Juni 2011 menetapkan soal kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2011 kebijakan moratorium resmi diberlakukan. Kebijakan moratorium adalah kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke suatu negara karena adanya persoalan-persoalan yang belum diseepakati antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja. Kebijakan moratorium ini diberlakukan untuk menjawab maraknya TKW Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi, mulai dari gaji tidak dibayar, penyiksaan oleh

---

<sup>35</sup> Lihat PSDR LIPI. 2011. *Policy Paper Moratorium Tenaga Kerja: Pragmatisme vs Idealisme*. Tidak di terbitkan

majikan, pelecehan seksual, dan hukum pancung yang dikenakan kepada TKW Indonesia. Pada awal November 2011, Menteri Perburuahan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia yang salah satu agendanya soal moratorium TKW sektor informal.

Pemerintah Indonesia tetap pada pendirian yaitu menerapkan kebijakan moratorium TKW sektor informal. Hal ini artinya pihak Pemerintah Arab Saudi belum bersedia menandatangani MOU tersebut dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi belum bergeming dari posisinya untuk lebih bersikap adil dalam struktur hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga. Moratorium TKW sektor informal ke Arab Saudi dari perspektif jangka pendek adalah kebijakan yang berakibat tertundanya keberangkatan pekerja migran dan menghambat peluang usaha PJTKI serta pihak-pihak terkait. Dari perspektif ideal dan jangka panjang kebijakan moratorium merupakan upaya konsolidasi dan perbaikan sistem pengiriman tenaga kerja. Kebijakan ini juga sebagai upaya memperbaiki posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim. Upaya ini dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan Pemerintah Indonesia.

Pada kasus mobilitas korban penyelundupan manusia juga merefleksikan gambaran besar wilayah atau negara asal mereka pada persoalan-persoalan politik yang sedang berkembang.<sup>36</sup> Persoalan penyelundupan manusia yang masuk kawasan Asia Tenggara meskipun hanya sebagian kecil dari persoalan *displaced people* di dunia, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari ancaman keamanan negara dan wilayah ASEAN. Bentuk-bentuk ancaman baru telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan ekonomi internasional,

---

<sup>36</sup> Lihat Tri Nuke Pudjiastuti. 2010. *Ancaman Keamanan Transnasional di ASEAN: Upaya Indonesia Menanggulangi dan Mencegah Migrant Smuggling*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.

kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kehadiran pencari suaka dan juga pengungsi ataupun *stateless* di wilayah negara lain menimbulkan persoalan pelanggaran HAM dan memicu konflik antarnegara, yang pada ujungnya menjadi persoalan politik keamanan yang kompleks. Upaya Indonesia untuk dapat tetap menghormati HAM bagi para pencari suaka dan pengungsi tersebut yaitu dengan memperbanyak dan memperbaiki rumah detensi, membangun kerjasama bilateral dengan berbagai pihak antara kepolisian dan imigrasi Indonesia dengan Australia.

#### **4. Globalisasi, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia**

Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di sisi lain permasalahan internal juga datang silih berganti, isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen suprasistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas adalah modal pembangunan, sehingga strategi pembangunan seharusnya memperhitungkan aspek dari pengembangan SDM, melalui proses pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Namun, fakta yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan konvensional pada saat ini kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada malah semakin memperlebar kesenjangan yang ada.

Pengembangan SDM di masa depan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan belajar yang paling cocok di masa depan adalah pembelajaran inovatif (*innovative learning*) yang memadukan belajar mengantisipasi (*anticipative learning*) dan *participatory learning method* atau belajar bersama orang lain. Pendidikan non formal perlu lebih proaktif dalam mereformasi visi, misi dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang sedianya berorientasi pada

menghasilkan lulusan sebagai pencari kerja (*worker society*) menjadi upaya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mandiri dan pencipta lapangan kerja (*employee society*). Oleh karenanya, pengembangan SDM lewat program-program pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai keterampilan dan citra diri yang positif mengenai keanekaragaman budaya dalam menghadapi era globalisasi<sup>37</sup>.

## **5. Globalisasi, Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan**

John Perkins dalam bukunya, *Confession of an Economic Hitman* mengungkap perselingkuhan korporasi, pemerintah dan intelektual untuk menguasai sebuah negara. Para intelektual-intelektual tersebut mendatangi setiap negara-negara yang baru merdeka; memperkenalkan konsep pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sebanyak-banyaknya, jalan raya, pelabuhan, bandara pembangkit listrik dan lain-lain. Negara-negara yang kemudian menyetujui hal tersebut diberikan utang dari institusi keuangan global, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Utang ini tidak secara gratis diberikan tapi diikuti dengan berbagai persyaratan-persyaratan atau disebut *Structural Adjustment Program*. Program penyesuaian struktural, di mana setiap negara penghutang harus tunduk pada aturan-aturan liberalisme; pengurangan peran negara dalam pengelolaan sumber daya, membuka usaha-usaha milik negara untuk dimiliki oleh pihak swasta, privatisasi, merevisi undang-undang yang dianggap menghambat korporasi, deregulasi dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya.<sup>38</sup>

Kemiskinan dan pemiskinan global didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi yang berasal dari pasar bebas dan atau

---

<sup>37</sup> Lihat Laila Nagib & Priyono Tjiptoherijanto (ed). 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di antara Peluang dan Tantangan*. PPK LIPI. LIPI Press, Jakarta

<sup>38</sup> Globalisasi dan Proses Pemiskinan Negara Berkembang diunduh dari <http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan.html> 12/13/2011 8:59:12

akibat ulah negara maju.<sup>39</sup> Pengalaman Indonesia selama kurun waktu dua dekade terakhir memberikan gambaran bahwa kapitalisme atau membanjirnya modal asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan pihak masyarakat ekonomi lemah. Sejatinya kapitalisme dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan kesejahteraan penduduk, tetapi kapitalisme juga mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antarkelompok negara. Kesenjangan seperti ini merupakan akibat logis dari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis, diantaranya adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat mengutamakan kepemilikan individu. Bahwa kebebasan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dan pasar bebas merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi kapitalis, namun pasar sempurna (*perfect market*) sebagai persyaratan terwujudnya pemerataan kesejahteraan tidak pernah terjadi. Semua ini akibat adanya praktik-praktik pengejaran kebutuhan ekonomi manusia yang tak terbatas. Perpaduan dari prinsip-prinsip ini dalam kegiatan ekonomi membawa sekelompok masyarakat ke jenjang kesejahteraan atas dasar pengorbanan kelompok lain. Selama tidak dilakukan rekonseptualisasi prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis, selama itu pula proses pemiskinan masyarakat atau negara lemah oleh negara kapitalis kuat akan terus berlanjut.

Pada tataran praktis, globalisasi—dalam hal tertentu—telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya juga membahayakan keamanan manusia. Saat ini perekonomian global terasa dekat dalam lingkungan pembangunan di mana ' korporasi' (perusahaan transnasional) berperan sebagai mesin utamanya. Aktivitas ekonomi terus digenjot demi memenuhi hasrat segelintir orang yang ingin menumpuk keuntungan pribadi dan mengorbankan mayoritas lainnya terkena dampak dari aktivitas mereka. Contoh kasus di sektor pertambangan di kawasan Asia-Pasifik mengindikasikan hal tersebut. Di Cina, Indonesia dan Papua Nugini, aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah,

---

<sup>39</sup> Lihat Sukarna Wiranta. 2007. *Kemiskinan dan Pemiskinan Global*. P2E LIPI. LIP1 Press, Jakarta

mencemari air, udara, danau, pantai dan hutan. Salah satu dampak serius yang ditimbulkan adalah penyakit (pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru), keberadaan sumber penghidupan bagi beberapa kelompok masyarakat juga menjadi semakin terancam, dan konflik sosial yang terjadi oleh karena langkanya sumber daya akibat aktivitas korporasi pertambangan terjadi hampir di seluruh tempat. Meski berbagai aturan sudah dikenakan kepada mereka, tetap saja tidak mampu membendung langkah korporasi-korporasi ini mewujudkan kepentingannya yang berujung pada kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan di atas adalah korporasi. Oleh karena itu, penting untuk menagih komitmen mereka untuk membenahi persoalan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan mereka secara langsung dalam setiap konferensi lingkungan global.<sup>40</sup>

## **Globalisasi dan Ketahanan Budaya**

Pada era global, percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari, sebagai akibat dari interaksi manusia antar bangsa yang berbeda budaya. Dalam interaksi tersebut, masing-masing akan berusaha mempertahankan budayanya sekaligus menembus kepada bangsa lain. Hal ini bisa dimaklumi, karena budaya merupakan suatu sistem nilai yang memengaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, di dalam globalisasi terdapat proses hibridisasi. Hibridisasi diartikan sebagai suatu cara, di mana suatu bentuk dipisahkan dari kesatuannya (keberadaannya) untuk kemudian digabungkan dengan bentuk lain yang baru. Dalam konsep ini, berarti ada unsur yang dianggap unggul, yang dipindahkan atau diambil dari asalnya, untuk kemudian digabungkan dengan unsur lain (yang juga

---

<sup>40</sup> Lihat Ulil Amri. 2010. *Globalisasi, Degradasi Lingkungan, dan Keamanan Manusia di Kawasan Asia-Pasifik: Kasus China, Indonesia, dan Papua Nugini*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.

dianggap unggul). Inilah salah satu isu penting yang ingin di sampaikan dari hasil penelitian Puslit Masyarakat dan Budaya LIPI.<sup>41</sup>

Kekuatan globalisasi yang ditopang oleh kekuatan finansial lembaga asing, kekuatan perdagangan bebas, dan kekuatan kebudayaan dunia, kemudian membentuk nilai dan standar etika sesuai dengan kepentingan pemilik modal melalui media global seperti iklan dan lainnya. Oleh karenanya, budaya lokal semakin terancam akibat hegemoni satu arah dari negara maju, padahal negara berkembang memiliki kekayaan lokal. Akibatnya terjadi resistensi yang menolak globalisasi karena moral globalisasi hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan tertutupnya akses rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas. Salah satu contohnya, perusahaan waralaba KFC, McDonalds, dan Pizza Hut yang banyak tersebar di kota-kota Indonesia adalah kepanjangan tangan dari pemilik modal asing dan pemegang lisensi, sehingga keuntungan tetap mengalir ke mereka. Secara budaya sangat jelas belum memberikan manfaat kecuali membuka akses informasi dan keterbukaan budaya luar negeri bagi masyarakat.<sup>42</sup>

### **Kompleksitas Masalah dan Tantangan Globalisasi**

Menurut Kamus Merriam Webster (2010) kata globalisasi (*globalization*) pertama kali digunakan pada tahun 1951.<sup>43</sup> Sejak itu, globalisasi lantas didefinisikan sebagai: *the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets*. Kata globalisasi memang cenderung dilekatkan pada aktivitas ekonomi.<sup>44</sup> Lebih jauh, beberapa sarjana

---

<sup>41</sup> Endang Retnowati, (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.

<sup>42</sup> Sutamat Ariwibowo,. 2007. Industri Budaya di Kota Mataram dalam Era Globalisasi. Hlm.55-56 dalam Retnowati, Endang (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.

<sup>43</sup> Merriam Webster Dictionary. 2010. Globalization.

<sup>44</sup> Ulil Amri. 2010. Hlm. 2.

kemudian mengidentikkan globalisasi dengan dinamika kapitalisme global yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Waters misalnya, merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi di samping politik, sosial, dan budaya.

Demikian pula dengan Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) yang juga menitikberatkan aktivitas ekonomi sebagai pilar utama globalisasi. Dalam bukunya yang berjudul *A Global World? Re-Ordering Political Space*, ketiganya meletakkan ekonomi sebagai faktor utama pengubah tatanan politik dunia. Pun halnya dengan Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi dari para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh korporasi transnasional yang hadir pasca Perang Dunia II. Dengan dibantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi korporasi transnasional tersebut menjadi semakin lancar. Perlahan-lahan akhirnya kekuasaan negara diintervensi, atau bahkan dilemahkan.<sup>45</sup>

Globalisasi tampaknya merupakan suatu fenomena yang luas, namun sebenarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rejim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan baik tarif maupun nontarif. Globalisasi di bidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan HAM. Semangat demokratisasi yang terjadi di suatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi di bidang budaya bisa

---

<sup>45</sup> Lihat Malcom Waters. 1995. *Globalization*. (London: Routledge) Marshall, Brent K. 1999. "Globalisation, Environmental Degradation and Ulrich Beck's Risk Society". *Environmental Values*, 8: 253-275. Anderson, James dkk. 1995 (Ed.). "A Global World? Reordering Political Space". (Oxford: Oxford University Press)

dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat menikmati McDonalds, Coca Cola, Kentucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *blue jeans* merk Levi's yang disukai kaum muda AS, seperti Levi's juga disenangi oleh masyarakat di negara lain<sup>46</sup>.

Selain beberapa hal di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan munculnya beberapa isu lain seperti; *global governance* yang mengatur berbagai kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, pemerintah nasional Indonesia adalah anggota dari WTO yang terikat dengan aturan-aturan yang diratifikasi di dalamnya. Dalam hal perburuhan kita juga adalah anggota ILO (*International Labor Organization*) yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip penerapan HAM dalam kehidupan kaum buruh. Demikian pula, dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak pola relasi antaraktor dalam hubungan internasional. Dahulu, orang hanya bisa terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi, hubungan antar manusia semakin meluas melintasi batas wilayah. Bersama dengan itu, negara-negara di dunia juga kian meningkatkan hubungannya. Proses globalisasi yang di satu sisi melemahkan peran negara, namun di sisi lain menguatkan peran masyarakat internasional. Di era sekarang, internasionalisme yang lebih menekankan peran negara dihadapkan secara diametral dengan globalisasi yang kadang kala menisbikan peran negara.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Siswanto. 2010. Masyarakat Eropa Dalam Merespon Globalisasi Diteropong Dari Kajian Wilayah. dalam PSDR LIPI. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hlm.1-8). Paper dalam proses penerbitan.

<sup>47</sup> Ibid Riza Noer Arfani. 2010. Hlm. 1

<sup>48</sup> Ibid A Safril Mubah. 2010. Hlm. 1.

Dari beberapa perspektif ide maupun praktis yang tercakup dalam tema globalisasi di atas, globalisasi sendiri dihadapkan pada kompleksitas masalah dan tantangan. Secara umum, kompleksitas ini dapat diuraikan dalam tiga pemahaman; *pertama*, globalisasi tidak bisa dihindari, namun perlu dipikirkan upaya mengurangi dampak negatif bagi kepentingan setiap aktor, terutama bagi setiap warga negara, baik secara ekonomi maupun politik, keamanan dan kebudayaan. *Kedua*, dampak globalisasi yang terjadi di tingkat regional dan nasional terhadap masyarakat, pemerintah dan pasar/pelaku ekonomi. *Ketiga*, masalah penataan struktur dan pola hubungan antar aktor-aktor yang lebih simetris yang bekerja dalam ranah globalisasi. Atau dengan kata lain, luntarnya batas negara yang bergiat di bidang globalisasi ekonomi dapat membangun suatu kekuatan negara, kelompok masyarakat atau korporasi perusahaan transnasional. Penjelasan mengenai ketiga persoalan ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Dari berbagai kecenderungan isu globalisasi di atas, paling tidak terdapat dua aspek yang mengemuka dalam globalisasi dan pola relasi di dalamnya yakni adanya aktor yang berperan dalam gerak globalisasi dan konsep status/peran yang mengikutinya. Hubungan aktor/pelaku dan status/peranan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap 'perilaku' atau 'cara-cara mempengaruhi/menguasai' subyek yang ingin mereka kuasai. Seperti telah diketahui bahwa wacana aktor dalam globalisasi telah meninggalkan dikotomi aktor negara dan aktor non-negara. Dalam kaitan globalisasi, di mana jaringan aktor-aktor melibatkan pelaku mulai dari tingkat lokal sampai global, kini sebagian orang semakin cenderung menggunakan istilah "aktor transnasional" daripada "aktor non-negara".<sup>49</sup> Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Selain negara, aktor

---

<sup>49</sup> Don K Marut. 2010. Globalisasi, Aktor non-Negara dan Hak-hak Azasi Manusia. Paper pengantar Seminar "Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak-hak Azasi Manusia dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik", yang diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, HUMA, 3 - 5 Agustus 2010, Jakarta. Hlm 1-2

transnasional ditandai oleh kelompok-kelompok seperti *Multi National Corporations* (MNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs), *International Non Governmental Organizations* (INGOs) dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime* (TOC).<sup>50</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs semakin rumit dikarenakan keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkoba. Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara. Namun demikian, masih banyak teoritikus kajian hubungan internasional yang mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa "*nation states are the most important actors for understanding international relations*"<sup>51</sup>.

2. Dalam tata kelola ekonomi global, liberalisasi perdagangan dan investasi adalah salah satu faktor pendorong proses percepatan akumulasi kapital.<sup>52</sup> Hal ini menjadi masalah pula dalam proses globalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Strategi liberalisasi perdagangan dan investasi ini diyakini akan meningkatkan volume perdagangan dan investasi global, nasional maupun lokal. Sehingga dengan proses harmonis yang terjadi akan menghasilkan akumulasi kapital pada setiap pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi menggunakan kekuatan (*power*) yang dimiliki untuk mencapai

---

<sup>50</sup> Yanyan Mochamad Yani. 2010. *Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia*. Hlm 3-4

<sup>51</sup> Yanyan Mochamad Yani. 2010. Hlm. 4.

<sup>52</sup> Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. Hlm. 3.

maksimisasi manfaat (seperti akumulasi kapital) dan memperoleh// memperkuat kekuatan pasar (*market power*) dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Karena itu, dapat dipahami bahwa liberalisasi sebagai suatu 'ideologi' berusaha diimplementasikan sebagai upaya memperkuat kekuatan pasar terutama bagi kapitalis raksasa seperti perusahaan transnasional (MNCs) dengan dukungan pemerintahnya. Dukungan ini bukan hanya dari sisi finansial tetapi juga non-finansial, termasuk pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dan sebagainya.

3. Abstraksi lain mengenai kritik masalah terhadap proses globalisasi adalah pandangan mengenai keberhasilan mengintervensi dan melemahkan kekuasaan negara yang tidak melulu bukan semata-mata hasil upaya korporasi transnasional. Menurut Robinson (1996),<sup>53</sup> terdapat agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional yang gencar mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran negara. Mereka kemudian menciptakan ketergantungan negara-negara Selatan yang tertinggal terhadap negara-negara Utara yang maju melalui utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di negara Selatan itu sendiri. Dalam perkembangannya, akibat ketidakmampuan mengelola keuangan, negara-negara peminjam (Selatan) ini mengalami kegagalan percepatan ekonomi sehingga tidak mampu membayar utang. Akibatnya, mereka pun 'dipaksa' untuk menerima skenario yang bernama Program Perbaikan Struktural (*Structural Adjustment Program*) yang intinya mengharuskan mereka untuk melakukan liberalisasi ekonomi, menderegulasi sektor keuangan, dan melakukan privatisasi atas sumber daya alam, industri, perbankan, dan sektor publik lainnya (Casanova 1996)<sup>54</sup>. Dengan demikian, negara-negara peminjam ini semakin dibuat tidak berdaya dengan aksi-aksi aktor-aktor globalisasi di atas.

---

<sup>53</sup> William I Robinson. 1996. *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony*. (New York: Cambridge University Press).

<sup>54</sup> Gonzales Casanova. 1996. "Globalism, Neoliberalism, and Democracy". *Social Justice*, 23 (1-2): hlm. 39-48.

Dengan ketidakberdayaan negara-negara ini mengakibatkan aktor (korporasi) transnasional menemukan peluangnya untuk semakin bebas beraksi. Perlahan tapi pasti mereka menggerogoti sumber daya alam negara-negara Selatan tersebut yang pada gilirannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Studi mengenai hubungan antara globalisasi—aktivitas korporasi transnasional—dan kerusakan lingkungan ditunjukkan oleh Lofdahl (2002:8-9)<sup>55</sup> dan Broswimmer (2002)<sup>56</sup>. Menurut Lofdahl, aktivitas ekonomi global saat ini telah jauh dari yang dicita-citakan. Alih-alih ingin memperjuangkan pemerataan kemakmuran, harmoni sosial, sembari menjaga kelestarian lingkungan, korporasi transnasional malah melakukan sebaliknya. Aktivitas ekonomi global justru membawa dampak negatif, salah satunya, pada kelestarian lingkungan. Misalnya, negara-negara Utara yang maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara Selatan yang tertinggal. Akibatnya, kondisi lingkungan negara-negara Selatan menjadi terpuruk.

4. Sejalan dengan poin 3 di atas, masalah globalisasi muncul melihat keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap tamak dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global. Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, di samping kian bertambahnya jumlah penduduk dunia. Tidak heran mengapa kemudian Broswimmer (2002) menyebut abad ini sebagai periode kemusnahan ekologis (*the period of Ecocide*) karena berbagai indikasi telah muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim.

---

<sup>55</sup> Corey Lofdahl. 2002. *Environmental Impacts of Globalization and Trade: A Systems Study*. (USA: Massachusetts Institute of Technology).

<sup>56</sup> Franz Broswimmer. 2002. *“Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species”*. (London: Pluto Press).

Berbagai persoalan lingkungan ini diyakini bermuara pada persoalan keamanan manusia (*human security*).<sup>57</sup>

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit kronik. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan.<sup>58</sup> Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumber daya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara Selatan yang terbelakang.<sup>59</sup> Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.

---

<sup>57</sup> Ada beberapa sarjana yang mendefinisikan konsep keamanan manusia, di antaranya adalah MacLean (1999); Newman (2001); King dan Murray (2002). Menurut MacLean keamanan manusia merupakan perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera. Ancaman politik yang dimaksud dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin pada aksesibilitas manusia terhadap lingkungannya. MacLean mendefinisikan keamanan manusia ini sebagai keamanan atas diri pribadi, komunitas, dan lingkungan. Sementara itu, Newman mendefinisikannya sebagai bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Adapun King dan Murray mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para sarjana ini kemudian turut mengubah pengertian mengenai konsep keamanan itu sendiri yang sebelumnya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bermuansa politik menuju manusia atau individu yang melihat kerusakan lingkungan juga sebagai ancaman. *Human security* di sini dapat diartikan peningkatan peran dan perhatian individu dibandingkan sebelumnya yang lebih fokus pada negara/masyarakat. Perubahan ini juga dibarengi dengan sejumlah masyarakat yang membutuhkan tindakan bersama (*collective action*) yang berbeda (persoalan lingkungan hidup). Fenomena *collective action* dan individu ini menunjukan ciri yang unik ketika dibarengi dengan tingginya penggunaan internet yang menjadikan peran individu menjadi lebih berarti berkat wahana jejaring sosial yang semakin marak sekarang ini.

<sup>58</sup> Mark Rosegrant dkk. 2002. "World Water and Food to 2025". Washington (DC): International Food Policy Research Institute.

<sup>59</sup> Mark Rosegrant dan Sarah Cline. 2003. Global Food Security: Challenges and Policies". *Science*, 302: 1917-1919.

5. Dalam bidang kebudayaan, keistimewaan kondisi sosial dewasa ini dengan segala macam perangkat komunikasi dan informasi mutakhir bukan terletak pada kadar maupun intensitas proses globalisasi, tetapi pada kejelasan, keterbukaan, dan sifat kasat mata pengaruh berbagai macam kebudayaan dunia yang masuk dalam ranah kehidupan manusia.<sup>60</sup> Dalam konteks ketahanan budaya atau pelestarian budaya dalam era globalisasi, masih banyak yang mengkhawatirkan bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi. Namun, menilik pada sifat/kodrat kebudayaan itu sendiri yang bersifat dinamis, cair serta hibrid, dan dengan menghindari serta mengkritik representasi budaya yang bersifat esensialis dan statis, maka kita pun seharusnya menjadi paham bahwa proses globalisasi dan perubahan budaya sesungguhnya tak pernah absen dari kehidupan sosial manusia. Mengutip Lévi-Strauss, identitas atau jati diri para pendukung suatu kebudayaan menjadi kuat bukan karena isolasi tetapi justru karena adanya interaksi antara budaya. Dalam proses globalisasi tak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan yang menjurus pada *xenophobia*, justru yang terpenting adalah bagaimana memahami proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian.<sup>61</sup>
6. Kecenderungan terakhir dari globalisasi adalah regionalisme. Artinya, bahwa saat ini para pengusaha multinasional mulai mengalami kemandekan karena sumber daya yang kian terbatas. Strategi yang dilakukan salah satunya adalah mereka mulai masuk ke suatu wilayah atau region, pengelompokan beberapa negara. Strategi ini diikuti pula oleh pengusaha kecil dan menengah yang sering kesulitan melawan globalisasi. Jalan sama yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah. Kerjasama dapat terjadi sebagai kerjasama antara beberapa daerah dalam suatu negara, antarnegara, atau keduanya. Otonomi regional tidak berarti

---

<sup>60</sup> Bachtiar Alam. 1998. Globalisasi dan Perubahan Kebudayaan: Perspektif Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* No 54 Tahun 1998. Hlm. 1-11.

<sup>61</sup> Bachtiar Alam. 1998. Hlm. 11

tiap daerah bekerja sendiri-sendiri dan melupakan keterkaitan dan kerjasama dengan daerah lain.<sup>62</sup> Dengan kata lain, regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil. Menjadi menarik, bila kita memikirkan paradigma pembangunan dalam konteks regionalisasi dan globalisasi. Salah satu contoh pemikiran yang perlu dikaji lebih jauh dan lebih mendalam adalah kemungkinan melakukan *Borneo Regional Economic Cooperation*, meliputi semua propinsi ke Kalimantan, Sabah dan Serawak di Malaysia, dan Brunei. Dalam kaitan dengan globalisasi, salah satu tantangan yang kini banyak dialami banyak negara, termasuk Indonesia, adalah adanya gejala "*global consumers, local earners*". Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan standar dunia dan harga dunia, tetapi masyarakat masih berproduksi lokal. Untuk negara seperti Jepang, gejala ini menguntungkan karena harga dan gaji mereka tinggi untuk ukuran dunia. Untuk negara seperti Indonesia, gejala ini membuat orang Indonesia mengalami kesulitan dalam persaingan internasional.<sup>63</sup>

## Beberapa Kebijakan Terkait Globalisasi

Globalisasi seperti gambaran di atas tampak sebagai sesuatu yang menakutkan, namun bisa juga sekaligus tantangan. Ada yang menilai merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah pandangan lain melihat globalisasi justru dinilai sebagai ancaman. Namun, seperti di katakan Hadi Soesastro bahwa kenyataan globalisasi itu sulit dihindari, bahwa dalam kurun saat ini telah banyak yang telah terjadi, baik di belahan dunia, di kawasan Asia, atau di Indonesia sendiri.<sup>64</sup> Pada

---

<sup>62</sup> Aris Ananta, 2008. *Suatu Wacana mengenai Paradigma Pembangunan di Indonesia*. Radar Banjarmasin, 12 Maret 2008

<sup>63</sup> Ibid Aris Ananta, 2008.

<sup>64</sup> Hadi Soesastro. 2004. "Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu". *Economics Working Paper Series* diunduh dari <http://www.csis.or.id/papers/wpe082> tanggal 12/13/2011. Hlm. 8.

tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin laju. Yang melintasi batas-batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Dunia telah menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan teknologi bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan dan dalam perkembangannya hambatan-hambatan itu sendiri kini dapat semakin dikurangi. Globalisasi dalam hal ini lantas menyisakan pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun masyarakat.<sup>65</sup> Tulisan berikut memaparkan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan persoalan-persoalan globalisasi, namun hanya beberapa saja yang dapat dimasukkan karena keterbatasan data yang dimiliki.

Terkait dengan soal kebijakan terhadap masalah globalisasi ini, salah satu strategi terhadap globalisasi yang dapat dibaca dari paparan di atas adalah proses deregulasi dan liberalisasi ekonomi, kerjasama ekonomi regional dan pembentukan *political union*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sedikit banyak menerapkan pola strategi yang sama. Yang paling kentara adalah strategi liberalisasi melalui berbagai deregulasi di sektor perdagangan, investasi dan keuangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak jaman Orde Baru. Revisi UU penanaman modal tahun 2007, salah satunya contohnya, memberi ruang gerak kepemilikan asing yang semakin besar, mulai dari 60% hingga 99%.<sup>66</sup> Model pertumbuhan

---

<sup>65</sup> Stiglits (2006) dalam bukunya *Making Globalization Work* menyatakan ada 6 pekerjaan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) perhatian terhadap upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan; (2) perlunya bantuan asing dan pengurangan utang; (3) perdagangan yang adil; (4) liberalisasi perdagangan dan pasar modal; (5) perlindungan terhadap masalah lingkungan; dan (6) pemerintahan yang bersih dalam Carunia Mulya Firdausy (Ed.). 2006. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi. Di Sektor Industri Manufaktur*. P2E LIPI, Jakarta. Hlm.iii.

<sup>66</sup> Untuk skala hypermarket, dominasi kekuatan pasar berada ditangan Carrefour dengan penguasaan omset sebesar 48.70%, kemudian disusul oleh Hypermart, Giant dan Makro dengan porsi omset masing-masing sebesar 22.08% dan 17.75% dan 9.52%. Dari sudut pandang strategi *pro-growth*, struktur pasar monopolistik menguntungkan karena akan mampu menciptakan profitabilitas yang besar sehingga akan memperbesar akumulasi capital, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, struktur pasar monopolistik di sektor retail berpotensi memarginalisasikan pedagang kecil dan pasar tradisional, di mana mayoritas penduduk miskin dengan usaha kecilnya melakukan aktifitas bisnis. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan; P2E-LIPI. 2009. *Dominasi Asing Dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta P2E-LIPI.

ekonomi yang didukung oleh pemerintah yang mendukung liberalisasi perdagangan di satu sisi mempercepat akumulasi kapital, tetapi di sisi lain dapat menghasilkan pemiskinan. Sebagai contoh, dominasi korporasi pada sektor retail di atas menunjukkan pola persaingan yang tidak sehat, antara si kaya (perusahaan besar) dan si miskin (pedagang kecil). Akibatnya, marginalisasi pedagang kecil di pasar tradisional mengindikasikan terjadinya proses pemiskinan. Demikian pula halnya terjadi di sektor keuangan perbankan dan investasi.

Diterapkannya kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi melalui penanaman modal asing, salah satunya adalah pengaruh tidak langsung dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan kerjasama ekonomi dan kerjasama regional. Misalnya, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Proyek ini yang dikenal sebagai program AFTA atau *ASEAN Free Trade Area* yang diluncurkan pada Januari 1993 dan rencananya akan direalisasikan 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008 namun pada tahun 1998 diputuskan untuk dipercepat realisasinya menjadi 1 Januari 2002. Selain AFTA, pada tahun 2002 melalui KTT ASEAN-Cina, Indonesia juga turut menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and PRC* sebagai cikal bakal pembentukan *China ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) yang telah diberlakukan efektif pada 1 Januari 2010.

AFTA dan CAFTA adalah jawaban terhadap globalisasi dan regionalisasi sekaligus, yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari liberalisasi ekonomi. Kesepakatan ini adalah keputusan bersama, namun sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, Indonesia kini dibanjiri barang-barang murah buatan Cina dan terlebih lagi barang-barang tidak resmi banyak tersedia di pasaran. Barang-barang yang diimpor dari Cina sebagian besar berupa perkakas listrik, mesin, produk besi baja, tekstil, keramik, plastik, makanan olahan, garmen, kerajinan tangan, pupuk, aluminium, produk makanan dan minuman, serta produk laut. Tidak hanya barang-barang dari negara Cina, dari sesama negara-negara ASEAN pun menunjukkan keadaan yang sama. Tekanan impor barang negara lain tentu saja

mengganggu ekonomi Indonesia, terutama daya saing produksi dalam negeri yang memiliki kemiripan dengan barang-barang impor<sup>67</sup>.

Pasca penandatanganan kesepakatan AFTA maupun CAFTA, pemerintah RI juga telah mengadopsi kebijakan pangan yang sangat berorientasi pro-pasar bebas (*free-market*). Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh, dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah Bulog dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum milik pemerintah). Kebijakan ini secara tidak langsung akan membuat impor barang pertanian/*supply* produk pertanian menjadi semakin besar. Pasar pangan Indonesia yang cukup besar memang banyak diincar oleh produsen pangan luar negeri. Diterbitkannya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pembebasan tanah bagi kepentingan umum, ini berkaitan dengan tujuan untuk memudahkan investasi asing, dan semakin mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri tampaknya turut memperburuk kondisi pertanian Indonesia secara umum.<sup>68</sup>

Kenyataan ini juga terjadi pada industri manufaktur terutama dalam era globalisasi yang semakin menunjukkan kerapuhannya. Kerapuhan industri manufaktur tidak hanya terjadi pada industri padat karya seperti industri alas kaki dan tekstil, juga terjadi pada industri padat modal (otomotif, mesin, elektronika, dan semen).<sup>69</sup> Penyebabnya dipengaruhi beberapa faktor; selain daya saing, produktifitas dan rendahnya investasi menjadi sumber penyebab utama. Beberapa paket kebijakan (industri maupun investasi; PP 20 tahun 1994, UU No 22 tahun 1999, dan INPRES No 3/2006) yang cukup memadai namun kurang ditunjang oleh komitmen

---

<sup>67</sup> Perdagangan Indonesia - China. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China.12/14/2011.4:40:06.AM>.

<sup>68</sup> Carunia Mulya Firdausy (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta

<sup>69</sup> Carunia Mulya Firdausy (peny). 2006. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi. Di Sektor Industri Manufaktur*. P2E LIPI, Jakarta.

dalam pelaksanaannya, sehingga globalisasi ekonomi yang terjadi justru malah mengakibatkan kecenderungan penurunan pada sektor industri manufaktur.<sup>70</sup>

Sementara itu kebijakan globalisasi lain, misalnya, dalam bidang pengelolaan SDA di Indonesia juga tidak luput dari masalah. Kisah mengenai membajirnya korporasi transnasional pertambangan dimulai dari naiknya Suharto sebagai pemimpin pada tahun 1966. Pemerintahan Suharto mula-mula menyiapkan perangkat hukum bagi masuknya korporasi tersebut, sebagaimana pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 1/1967 berisi tentang investasi luar negeri. Tidak lama berselang, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 11/1967 yang khusus mengatur sektor pertambangan. Dengan dua perangkat hukum ini, pemerintah kemudian membuka kesempatan yang sangat luas kepada korporasi transnasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Adapun korporasi yang pertamakali memperoleh kontrak karya (*Contract of Work*) dari pemerintah adalah Freeport dan mulai beroperasi pada tahun 1972 (Ballard 2001: 13 & 23). Selanjutnya menyusul Rio Tinto (Australia), Inco (Kanada), dan Newmont (Amerika).

Kerja korporasi internasional ini semakin mudah dengan diberlakukan perijinan kontrak karya bagi mereka. Sebagai contoh, UU No. 4/2009 mengenai mineral dan batu bara hanya dirancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah namun tidak mengoreksi keberadaan korporasi global yang telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Terbukti, pasal 169 menyatakan bahwa korporasi yang telah memegang Kontrak Karya tetap memiliki hak untuk beroperasi hingga masa kontraknya berakhir. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan akan timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengancam keamanan manusia Indonesia di masa depan.

Kebijakan paling rumit terkait globalisasi adalah kebijakan menyangkut budaya, mungkin karena sulit dijabarkan. Misalnya masalah kepemilikan budaya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 batik telah di tetapkan

---

<sup>70</sup> Ibid Carunia Mulya Firdausy (peny). 2006.

oleh UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Namun bila mencermati soal kepemilikan budaya Indonesia masih banyak bermasalah, yang paling kentara sekali adalah klaim produk budaya dari Malaysia. Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif "Parang Rusak", angklung, wayang kulit hingga rendang, kemudian lagu yang sangat mirip "Rasa Sayang" menjadi lagu tema iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu "Rasa Sayange" dan lagu "Indang Bariang" yang juga digunakan untuk iklan merupakan lagu asal daerah Sumatera.

Klaim Tari Barongan sebagai warisan dari Batu Pahat, Johor dan Selangor Malaysia padahal Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo sementara Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo dan mendapatkan Hak Cipta No.026377 pada 11 Februari 2004. Ada pula klaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu dengan slogan mereka "Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia", dan terakhir Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk "Enigmatic Malaysia". Berkaitan dengan persoalan sengketa budaya ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta *Eminent Persons Group* (EPG) agar difungsikan lebih baik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. EPG yang dibentuk tahun 2006 bertujuan mengelola sengketa kedua bangsa, termasuk isu hak cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-lain.<sup>71</sup>

Terakhir, terkait isu migrasi internasional tenaga kerja Inonesia ke luar negeri tahun 1999 ditetapkan KEPPRES No. 29 tentang *Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia* (BKPTKI). Badan ini bersifat lintas-sektoral dan melibatkan sembilan instansi yang berhubungan dengan TKI atau buruh migran. KEPPRES ini sebagai respon dari pemerintah atas semakin banyak masalah yang dihadapi oleh TKI atau buruh migran saat bekerja di luar negeri. Sedangkan, di daerah khususnya di tingkat Propinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Hal ini merupakan pelayanan agar proses

---

<sup>71</sup> Saiman. 2009. *Tantangan Budaya Nasional Di Era Globalisasi*. Jurnal Bestari Universitas Muhamadiyah Malang. Vol 42 (2009) diunduh dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/10512/15/201110:02:32PM>.

pengurusan dokumen bagi calon buruh migran lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Di samping itu, badan ini juga memberi perlindungan bagi calon TKI dan TKI purna yang kembali ke Indonesia. Selanjutnya untuk menyikapi perkembangan dinamika tenaga kerja di luar negeri, pemerintah melakukan revisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Perpres No 61. tahun 2006. BNP2TKI ini sekaligus secara yuridis adalah melaksanakan perintah UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Diharapkan kebijakan ini dapat menyentuh segi pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.<sup>72</sup>

Sebagai catatan penutup, tampaknya belum ada strategi khusus menyangkut kebijakan globalisasi karena belum menunjang pada beberapa aspek seperti: bagaimana penjelasan pemahaman mengenai perkembangan dan dampak globalisasi bagi peradaban umat manusia bagi masyarakat Indonesia melalui media oleh pemerintah; kemudian mengenai pemetaan aktor (pelaku globalisasi), apa saja kepentingan yang saling diharapkan dan hubungan antar aktor negara dan non-negara dalam dinamika proses globalisasi tidak terjelaskan dengan tuntas dalam rumusan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban mereka terutama bagaimana mengenai penataan hubungan antar aktor di level nasional, regional dan global.

---

<sup>72</sup> Laporan PSDR LIPI. 2009. *Pengelolaan Remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi Remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 25-28

## Rekomendasi

1. Terkait dengan isu globalisasi dan regionalisme, sejauh ini sangat diperlukan pengembangan riset dan teknologi untuk menunjang aturan main dan ketersediaan informasi mengenai globalisasi di masa depan. Sebenarnya sudah banyak lembaga riset yang melakukan terobosan dalam konteks ancaman globalisasi semisal menciptakan pola daya saing lokal terhadap gempuran perusahaan asing, di antaranya adalah Puslit Ekonomi dan Puslit Politik, IPSK LIPI atau *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Akan tetapi, yang paling penting adalah mengubah strategi orientasi globalisasi (dari *state security* ke *human security*) yang mendukung kepentingan masyarakat banyak, dan tentu saja, untuk mencapai langkah ini perlu menghadirkan cara pandang ilmu sosial-kemanusiaan. Oleh karena itu, kontribusi ilmuwan sosial-kemanusiaan amat sangat dinantikan kehadirannya. Tidak sekadar menyelesaikan persoalan atau melakukan perubahan tentu saja, melainkan juga memberikan cahaya penunjuk jalan ke mana arah dan bagaimana seharusnya peradaban manusia dalam globalisasi dikembangkan ke depannya. Studi/kajian yang komprehensif dan kerjasama lintas Puslit tentang perkembangan globalisasi dan dampaknya di tingkat regional dan nasional penting untuk dilakukan terutama oleh Kedeputian IPSK LIPI.
2. Program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk pemerintah, masyarakat dan pasar/pelaku ekonomi. Dengan perkembangan masalah (politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan), penambahan jumlah aktor (aktor negara dan non-negara) maupun kompleksitas pola relasi antar para aktor, baik di tingkat global, nasional maupun lokal, maka kemampuan setiap aktor harus ditingkatkan secara proporsional. Tujuan utamanya agar mampu memahami setiap perkembangan, memanfaatkan peluang yang ada, serta yang terpenting adalah untuk menata kembali hubungan yang lebih simetris antara ketiga aktor utama (Negara/Pemerintah, Masyarakat dan Pasar). Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi

komunikasi dan informasi (ICT) yang semakin canggih, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan para birokrat untuk menggunakan fasilitas elektronik (*e-government*) secara tepat dan optimal. Selain membangun infrastruktur yang memadai dan membuat kebijakan untuk mengatur pemberdayaan aparatur negara serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. *Capacity building* ini dapat berupa seminar, workshop, pelatihan, konferensi, dan lain-lain. Perhatian terhadap perkembangan ICT dan penguatan SDM harus sama besar dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk pelatihan tidak hanya menyangkut bagaimana menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, tetapi juga dalam pemahaman mengenai peluang pasar, teknik produksi, pengawasan kualitas, meningkatkan efisiensi kerja, pengetahuan hak paten, pengetahuan mengenai perkembangan perdagangan, pertanian, pelestarian budaya, pemahaman ketentuan-ketentuan dalam konteks WTO, AFTA, dan lain-lain. Kerjasama dalam bentuk *joint ventures* dan aliansi strategis di antara pemerintah, aktor transnasional dan masyarakat sangat bermanfaat guna menghadapi persaingan dan juga penyelesaian-penyelesaian sengketa yang muncul. Pemerintah bisa memfasilitasi upaya-upaya tersebut.

# **NOTULEN REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011 KEDEPUTIAN IPSK LIPI “MEMPERSIAPKAN INDONESIA MENYONGSONG ERA BARU 2015”**

## **Beberapa poin-poin penting yang disampaikan penyaji:**

### **1. Globalisme dan Regionalisme (Paulus Rudolf Yuniarto, MSi)**

Isu mengenai globalisasi dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut :

- **Globalisasi ke Regionalisme**

Dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan (region). Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah regionalisme ekonomi ASEAN dan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN. Isu regionalism ASEAN yang patut diperhatikan juga adalah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di kawasan Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Cina Daratan) yang berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan pesat dalam perdagangan antar negara dari kedua kawasan.

- **Globalisasi, Investasi dan Liberalisasi Perdagangan**

Globalisasi telah berdampak luas pada pertanian di negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia. Ketimpangan, kemiskinan dan ketergantungan pada berbagai input luar adalah bukti konkritnya. Dalam bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, bahwa selain globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan (ketimpangan) dalam struktur ketenagakerjaan global (dimana pemecahan masalah perlu dilakukan secara bersama-sama), globalisasi juga telah mengubah dinamika perekonomian nasional yang mana mekanisme pasar jauh menentukan ketimbang peran pemerintah.

- **Globalisasi, Transnasional Migrasi dan HAM**

Produk dari ekonomi global adalah migrasi internasional dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan capital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan capital banyak dan tenaga kerja langka

- **Globalisasi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia**

Selain pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas adalah modal pembangunan, sehingga strategi pembangunan seharusnya memperhitungkan aspek dari pengembangan SDM, melalui proses pendidikan .

- **Globalisasi, Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan**

Pada tataran praktis, globalisasi dalam hal tertentu telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya juga membahayakan keamanan manusia

- **Globalisasi dan Ketahanan Budaya**

Pada era global, percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari, sebagai akibat dari interaksi antar bangsa yang berbeda budaya.

## 2. Ketahanan Ekonomi (Purwanto M.Econ St)

- Latar belakang

Upaya memperkuat ketahanan ekonomi bukan hal yang mudah karena kompleksitas permasalahan dalam perekonomian yang bersifat dinamis. Pada dasarnya ketahanan ekonomi mencerminkan ketanggahan dan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala kompleksitas perekonomian global untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

- Permasalahan

Apa saja bentuk kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat perekonomian domestik dalam menghadapi pengaruh gejolak secara internal maupun eksternal

Cara meningkatkan daya saing ekonomi dan memperbaiki iklim investasi

Cara mengatasi permasalahan mismatch antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta menciptakan kebijakan kerja yang pro job

- Alternatif Solusi

Kelembagaan Domestik dapat dikembangkan sesuai dinamika perekonomian yang berkembang melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik didalam beberapa aspek

Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif bagi daya saing ekonomi dengan memenuhi setidaknya lima prasyarat dasar yaitu stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, harmonisasi peraturan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, reformasi birokrasi, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM

Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM, yang tidak terpisah dari kondusifitas iklim investasi sehingga pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang mendorong agar investor percaya untuk menginvestasikan dananya di Indonesia

Innovator and Trader Entrepreneur merupakan salah satu alternative keberhasilan pembangunan sektor riil dalam perekonomian nasional

- Rekomendasi

Keseriusan dari pihak pemerintah dan dukungan dari berbagai stakeholder, sinkronisasi pemenuhan prasyarat dasar (infrastruktur, SDM terampil, kepastian hukum) dan penyediaan sistem insentif. Pemerintah perlu mengintegrasikan pembanguna sektor industry dengan sektor pertanian melalui pengembangan agricultural based industries. Perlu adanya koordinasi intensif antar lembaga pemerintah. pengusaha dan swasta untuk mewujudkan grand design yang lebih komprehensif.

## Sesi Diskusi dan Tanya Jawab:

### 1. Mochtar

- Tadi Ibu Deputy mengatakan bahwa untuk pertama kalinya diadakan refleksi akhir tahun dengan merangkum tema-tema penelitian dari keseluruhan puslit di lingkup kedeputian IPSK. Akan tetapi tidak tepat kalau disebut refleksi akhir tahun, *policy research* atau rekomendasi akhir tahun harus merujuk pada masing-masing Puslit. Kalau merangkum maka akan menjadi *research policy*, bukan itu yang diperlukan dalam suatu refleksi akhir tahun.
- Klo ingin memberikan *policy recommendation* mau tidak mau bukan kesitu arahnya, bukan sebanyak itu yang harus diberikan kepada Pemerintah. Karena tidak mungkin Pemerintah akan mendengarkan *policy recommendation*
- Untuk penyaji pertama, perlu pertanyaan tujuan, definisi yang dipakai, terlalu banyak deskriptif, perlu ditampilkan problematika dari globalisasi. Misal globalisasi versus partikularisasi, globalisasi versus negara, borok-borok globalisasi, korupsi korporat, golongan kaya yang *occupied* terhadap wall street, marginalisasi terhadap nation state.

- Untuk penyaji kedua ,banyak pengulangan dalam pemaparan mengenai ketahanan ekonomi yang tidak perlu, ada beberapa kalimat yang tidak tepat pada penyerapan kata bahasa inggris konjungtivitnes, perlu diganti menjadi keadaan kondusif. Perlu adanya sorotan mengenai tiadanya strategi pembangunan ekonomi secara nasional, perlu dicari tahu sebenarnya apa yang menguntungkan dan merugikan bangsa Indonesia. Asimetri ekonomi perdagangan global sebaiknya harus diangkat, asimetri ekonomi perdagangan nasional juga harus ditelaah lebih lanjut, karena ada sistem yang tidak sempurna berjalan di situ seperti yang terjadi di sektor pertanian yang menyedihkan, terutama nasib petani di Indonesia.

## **2. Rusdi**

- Penyaji yang didepan hanya merupakan perwakilan atau juru bicara dari semua peneliti keseluruhan di deputi IPSK.
- Secara umum, hal yang disampaikan belum menyangkut hal yang substansial, memang apa yang disampaikan oleh para penyaji sudah cukup komprehensif, tetapi perlu pemaparan secara deskritif. Hal yang disampaikan belum menyangkut secara filosofi contoh nya mengenai globalisasi yang menyangkut ideologi yang substansial.
- Tadi ada banyak rekomendasi yang disampaikan dalam makalah ketahanan ekonomi, pertanyaan adalah hambatan apa yang menyebabkan rekomendasi tersebut tidak berjalan? Karena sebagian rekomendasi tersebut telah menjadi suatu kebijakan, akan tetapi tidak berjalan. Seharusnya harus lebih mengetahui penyebab kebijakan tersebut tidak berjalan.

## **3. Herman**

- Tentang masalah lingkungan energi terbarukan dalam suatu wacana, subsidi BBM yang terlalu besar merupakan sampah, bagaimana pemerintah menyiapkan energi alternatif.

- Energi terbarukan mengenai panas bumi memang sangat potensial di Indonesia, tapi permasalahannya juga sangat kompleks, tidak sinerginya kebijakan
- Ekspor Indonesia ke European Union adalah no 4, sungguh ironis negara yang besar, dengan potensi sumber daya alam sangat kaya tapi ekspor jauh dari negara singapura dan Malaysia, ternyata salah satu penyebabnya adalah *Research and Development* di Indonesia tidak berjalan dengan baik, insentif ekonomi tidak berjalan, bank tidak memberikan dukungan, dan *packaging* yang kurang. Infrastruktur dan raw material kurang memenuhi syarat. Dimana letak kebijakan yang tidak tune in dengan masalah yang disebutkan tersebut

#### 4. Ikrar Nusa Bakti

- Pertama dari topik yang mengambil tema yaitu "mempersiapkan Indonesia menyongsong era baru 2015". Kenapa harus 2015, apakah itu pasca SBY, padahal sekarang sudah membahas Indonesia tahun 2025 dan tahun 2050. Di harian kompas sudah bicara Indonesia 2025
- Dari semua penyaji hanya pembahas yang membahas mengenai ketahanan energi dan kerawanan pangan yang lebih mengena pada tema refleksi akhir tahun 2011.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya ditentukan oleh konsumsi yang mencapai 70 persen.
- Harusnya ada bahasan mengenai HDI (*Human Development Index*) untuk menyongsong Indonesia 2025 atau 2050
- Kedeputan IPSK menjadi seolah-olah membahas hasil penelitian sendiri, tidak membahas persiapan ke depan (Indonesia 2025 atau 2050). Kalau bisa diubah bentuk format refleksi akhir tahun, yang dilihat persiapan Indonesia dalam pertarungan ekonomi dan politik.

## 5. Carunia Mulya F

- Ada catatan umum, sedikit bertanya-tanya dengan judul tema refleksi, tidak ada sesuatu baru, isunya hanya itu-itulah saja, perlu adanya prioritas. Hal yang disampaikan terlalu umum, tidak ada spesifik untuk daerah, sehingga bisa dijadikan masukan bagi target group yang ingin dicapai
- Masalah *human security*, pindah dari *state security*, hubungan simetri antara negara dan pemerintah, pasar dan swasta. Ide tersebut mimpi, karena UUD 1945 yang mengatur mengenai *human security* tidak digubris sekarang lebih beralih pada kapitalisme
- Harusnya ditambah angkat masalah konsumsi kalangan menengah, fokus pada kelayakan investasi Indonesia.

## 6. Rifki

- Pada saat ini membicarakan suatu hal yang berbeda dengan tema yang refleksi 2011. Sebaiknya apa yang dibicarakan oleh penyaji harusnya menjadi tema refleksi tersebut diatas.
- Penyaji hanya memaparkan review atas hasil penelitian IPSK sekian tahun. Setelah ada *review* tersebut *what next?* Apakah berkaitan ada pengembangan *policy research* IPSK, atau *social research Indonesia*. Ketika membahas review tersebut, kemudian hanya berhenti begitu saja.
- Sebaiknya ada penjelasan mengenai tema refleksi akhir tahun, seperti apa yang dimaksud era baru, mengapa tahun 2015 tidak 2025, 2030 atau 2050.
- Seharusnya refleksi ini harus membicarakan langkah ke depan, kajian sosial harus melakukan pendekatan-pendekatan tersebut untuk melihat kondisi kedepan, seperti analisa trend dan tentu saja akan lebih menarik untuk dibahas

## **Tanggapan dari Penyaji:**

### **1. Paulus Rudolf Yuniarto, MSi**

- Struktur penulisan memang masih terlalu umum, belum menohok pada akar permasalahan
- Memahami bahwa refleksi akhir tahun ini membahas dan mereview mengenai hasil penelitian
- Globalisasi dan ideologi sudah disebutkan hanya berupa deskriptif belum secara mendalam
- Kebijakan yang tune in dalam meningkatkan ekspor Indonesia, seperti diketahui ekspor Indonesia didukung oleh produk bahan mentah. Variasi produk, industrialisasi, peningkatan skill tenaga kerja akan mendorong ekspor dengan lebih baik.
- Mengenai human security, idenya berasal dari keterkaitan globalisasi dengan kerusakan lingkungan.

### **2. Purwanto M.Econ St**

- Masalah mengenai strategi pembangunan nasional, ketika berbicara mengenai ekonomi maka tujuan akhir adalah kesejahteraan. Ketika berbicara strategi ya berbicara mengenai strategi yang menuju ke tujuan akhir yaitu kesejahteraan. Tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.
- Berbicara memperbaiki sistem tapi sistem tersebut tidak berjalan baik, sehingga tidak bisa diselesaikan secara parsial, akan tetapi juga tidak mudah diselesaikan secara komprehensif
- Mengenai konsumsi kalangan menengah, terus terang belum banyak diskusi mengenai konsumsi kalangan menengah, lebih banyak bicara mengenai kemiskinan. Tim tidak memiliki referensi studi mengenai konsumsi kalangan menengah
- Mengenai masalah investasi, data menunjukkan Indonesia tidak pernah mendapat nilai terbaik investasi.





